

RISTANSI

RISET AKUNTANSI

VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2022



RISTANSI : RISET AKUNTANSI

Program Studi Akuntansi - Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA

Jl. Soekarno Hatta - Rembuksari 1 A, Malang - 65141, Jawa Timur

Telp. (0341) 478877 / (Hunting) Fax. (0341) 4345225

RISTANSI RISET AKUNTANSI

VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2022

DEWAN REDAKSI

PIMPINAN REDAKSI

FADILLA CAHYANINGTYAS, SE., MSA., Ak., CA

EDITOR

ADITYA HERMAWAN, SE., Ak., MSA
DITYA WARDANA, S.ST., M.S.A

REVIEWER

DEWI DIAH FAKHRIYYAH, SE, MSA - *Universitas Islam Malang*

Dr. DWIYANI SUDARYANTI, SE, M.Si - *Universitas Islam Malang*

FERRY DIYANTI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

DHINA MUSTIKA SARI, SE, MSA, Ak, CA - *Universitas Mulawarman*

MOHAMMAD FAISOL, SE, M.SA, Ak, CA - *Universitas Wiraja*

SELVA TEMALAGI, SE, MSA - *Universitas Pattimura*

I GUSTI AYU AGUNG OMIKA DEWI, SE, MSA - *Universitas Pendidikan Nasional*

MURTIANIGSIH, SE, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

SYAIFUL BAHRI, SE, MSA, Akt, ACPA - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

Dr. AGUS RAHMAN ALAMSYAH, S.Pd, MM - *Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang*

PENGARUH LIKUIDITAS, <i>LEVERAGE</i> , DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP <i>TAX AVOIDANCE</i> DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI <i>Khusnul Khasanah, Nyimas Wardatul Afiqoh</i>	110
BAGAIMANA ADAPTASI SISTEM KERINGANAN PEMBAYARAN PT JASA RAHARJA MADIUN SAAT COVID-19? <i>Selvia Angger Sari, Supri Wahyudi Utomo, Elana Era Yusdita</i>	133
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI <i>Dewi Nasiroh. Nyimas Wardatul Afiqoh</i>	152
PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI <i>Rizma Nadiah Safitri, Nyimas Wardatul Afiqoh</i>	165
<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE</i> DAN KINERJA PERUSAHAAN <i>Celine Florencia Wedjaja, Rizky Eriandani</i>	178
PENGARUH <i>FINANCIAL PRESSURE</i> , <i>STABILITY</i> , DAN TARGET TERHADAP <i>FINANCIAL STATEMENT FRAUD</i> <i>Indra Lukmana Putra</i>	190
MEMAHAMI SUASANA DILEMATIS ANTARA HUTAN DAN UANG MELALUI SEMIOTIKA AKUNTANSI <i>Sudrajat Martadinata</i>	203

Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi

Khusnul Khasanah, Nyimas Wardatul Afiqoh

Universitas Muhammadiyah Gresik

khusnulkhasanah340@gmail.com

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1159

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	11 Juli, 2022
Tanggal Revisi	20 November, 2022
Tanggal diterima	23 November, 2022

Keywords:

*Liquidity,
Leverage,
Company Size,
Tax Avoidance,
Independent
Commissioner*

Abstract:

The purpose of this research is to test whether liquidity, leverage, and firm size have an influence on tax avoidance by using a moderating variable in the form of an independent commissioner. The population used are basic and chemical industrial companies that have been listed on the IDX in 2018-2020. The technique to collect the sample is using purposive sampling technique which produces a sample of 70 data. The source of research data is in the form of company annual financial report data called secondary data from the IDX official website, namely www.idx.co.id. Analysis of the data using moderated regression with the method of absolute difference value. This study provides results that the liquidity and firm size variables affect tax avoidance, but the leverage variable has no effect on tax avoidance. Furthermore, the results of the moderation show that independent commissioners cannot moderate (weaken) the effect of liquidity, leverage, and firm size on tax avoidance.

Kata Kunci:

Likuiditas,
Leverage,
Ukuran
Perusahaan,
Tax Avoidance,
Komisaris
Independen

Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menguji apakah likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan variabel moderasi berupa komisaris independen. Populasi yang dipakai yakni perusahaan industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. Teknik untuk mengumpulkan sampelnya menggunakan teknik *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 70 data. Sumber data penelitian berupa data laporan keuangan tahunan perusahaan yang disebut data sekunder dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Analisis datanya menggunakan regresi moderasi dengan metode nilai selisih mutlak. Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, tetapi variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya hasil moderasi menunjukkan bahwa komisaris independen tidak bisa

memoderasi (memperlemah) pengaruh antara likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sektor penerimaan anggaran terbesar di Negara Indonesia. *Self assesment system* diterapkan di Indonesia untuk pemungutan pajak. Sistem tersebut membuat Wajib Pajak cenderung akan mengurangi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan dikarenakan sistem tersebut memberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan, membayarkan serta melaporkan besarnya pajak yang wajib dibayarkan (Halim, dkk 2020:7). Adanya perbedaan kepentingan dari pihak pemerintah dan pihak perusahaan yakni pemerintah menginginkan perolehan penerimaan pajak yang maksimal tetapi perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang minimal dikarenakan perusahaan menganggap pajak sebagai beban sehingga mengakibatkan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Diantari & Ulupui, 2016).

Pentingnya peran masyarakat dalam pembayaran pajak maka diperlukan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Namun terlepas dari kesadaran itu, kebanyakan masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari hal inilah mengakibatkan perlawanan terhadap pajak yakni perlawanan aktif yang secara nyata ditunjukkan dalam bentuk tindakan kepada pemerintah yang bertujuan untuk penghindaran pajak atau praktik *tax avoidance* (Waluyo, 2011:13). *Tax avoidance* yakni tindakan yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam meminimumkan pajak yang terutang menggunakan cara yang dilegalkan. Walaupun dilegalkan tetapi menjadi masalah bagi pemerintah dikarenakan pajak perusahaan adalah kontribusi terbesar dalam membantu pendanaan pemerintah (Sarasati & Asyik, 2018).

Pada tahun 2019 PT. Adaro Energy telah diduga melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yakni dengan melaksanakan transfer pricing yaitu dengan memindahkan keuntungan dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah. Dari tindakan tersebut PT. Adaro Energy membayar pajak senilai Rp 1,75 triliun lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. (www.kompasiana.com, 10 Oktober 2021).

Hal-hal yang bisa mempengaruhi tindakan *tax avoidance* didalam perusahaan yakni likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Likuiditas merupakan rasio keuangan yang dipergunakan dalam mengukur sejauh mana perusahaan mampu untuk pemenuhan

liabilitas lancarnya (Sudana, 2015:24). *Leverage* merupakan rasio keuangan yang berguna dalam mengukur besarnya dana yang berasal dari utang dalam pembiayaan perusahaan (Sudana, 2015:23). Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian besar atau kecilnya perusahaan yang bisa dilihat dari total aset perusahaan (Wati, 2019:32).

Keterlibatan lainnya yang bisa mempengaruhi praktik *tax avoidance* yakni tata kelola perusahaan melalui dewan komisaris independen. Manajemen sering memiliki sifat *opportunistic*, manajemen mempunyai motivasi untuk memaksimalkan laba bersih untuk bisa meningkatkan bonus. Upaya yang bisa dilakukan yakni dengan cara menekan biaya-biaya seperti pembayaran pajak, hal ini membuat manajer bersikap agresif untuk melakukan praktik *tax avoidance* (Yogiswari & Ramantha, 2017). Dengan keberadaan komisaris independen pengawasan akan meningkat menjadi lebih baik sehingga tindakan manajemen bisa sesuai dengan peraturan yang ditetapkan termasuk ketentuan perpajakan sehingga bisa mencegah terjadinya praktik *tax avoidance* dalam perusahaan (Fahmi & Adi, 2020).

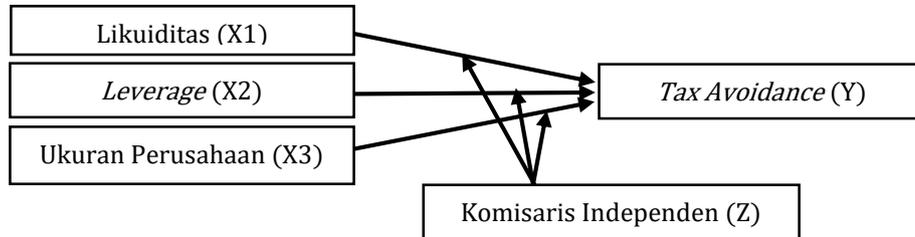
Hasil penelitian terdahulu yakni penelitian Alam & Fidiana (2019) membuktikan bahwa likuiditas tidak dapat berpengaruh pada *tax avoidance* tetapi Pasaribu & Mulyani (2019) membuktikan bahwa likuiditas dapat berpengaruh pada *tax avoidance*. Selanjutnya Khoirunissa & Ratnawati (2021) membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak dapat berpengaruh pada *tax avoidance* tetapi Suryani (2020) membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat berpengaruh pada *tax avoidance*. Berikutnya Sinaga & Suardikha (2019) membuktikan bahwa komisaris independen tidak bisa memoderasi pengaruh *leverage* pada *tax avoidance* tetapi Rani, dkk, (2021) membuktikan bahwa komisaris independen bisa memoderasi pengaruh *leverage* pada *tax avoidance*.

Sesuai latar belakang diatas dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan tentang *tax avoidance* tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut tidak konsisten (*inconsisten*). Sehingga penelitian ini mengangkat topik *tax avoidance* yang dapat dihitung dengan rumus *Effective Tax Rate* dikarenakan masih banyak perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak dimana perusahaan beranggapan bahwa pajak adalah beban yang bisa menjadi pengurang laba oleh karena itu perusahaan ingin membayar pajak seminimal mungkin. Namun tindakan *tax avoidance* dapat mengakibatkan pengoptimalan sektor penerimaan pajak negara menjadi terhambat. Maka dari itu judul penelitian ini "Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, dan

Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi”.

Berikut merupakan kerangka penelitian ini :

Gambar 1
Kerangka Penelitian



Teori yang mendasari penelitian ini yakni *theory agency*. *Theory agency* ialah teori yang menjadi dasar hubungan antara *principal* dan *agent*. *Principal* selaku pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab serta kewajiban untuk memberi fasilitas serta dana yang diperlukan untuk operasi perusahaan. Sedangkan *agent* selaku manajer perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengoperasikan suatu perusahaan yang didelegasikan oleh *principal* untuk kemakmuran dan keuntungan. Oleh karena itu *agent* akan menerima gaji, bonus, dan *reward* lainnya (Santoso, 2015:8).

Tax avoidance ialah sebuah perencanaan pajak yang dilaksanakan dengan memperkecil objek pajak yang mendasari pengenaan pajak tetapi tidak melanggar undang-undang yang berlaku (Halim, dkk, 2020:8). Usaha yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam menghindari pajak salah satunya ialah pemanfaatan pemberian tunjangan yang diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1 terkait tunjangan yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang. Perusahaan akan memanfaatkan pemberian natura agar bisa diberikan kepada karyawan dengan memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. Berdasarkan atas beban inilah bisa dibiayakan dikarenakan perusahaan memberikan uang pada penyalur beras, sehingga dapat menjadi biaya yang bisa menjadi pengurang atau mengurangi dari penghasilan bruto perusahaan.

Likuiditas ialah rasio keuangan yang dipergunakan dalam mengukur suatu kemampuan perusahaan untuk pemenuhan liabilitas lancarnya (Sudana, 2015:24). Sesuai dengan teori agensi, kontrak atau hubungan antara pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen) bergantung atas penilaian pemegang saham terhadap kinerja manajemen. Jika manajemen tidak bisa mengelola likuiditas maka kepercayaan

pemegang saham terhadap manajemen akan berkurang (Malau, 2021). Manajer sebagai *agent* berusaha untuk memenuhi kepentingan *principal* yaitu dengan memaksimalkan kinerja manajemen dengan cara menjaga likuiditasnya. Namun apabila suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, maka perusahaan akan lama untuk membayar utang (Brigham & Houston, 2015:135). Suatu perusahaan yang kesulitan dalam membayar utang lancarnya maka memiliki tingkat likuiditas yang rendah sehingga cenderung melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut membuktikan bahwa jika tingkat likuiditas rendah maka praktik *tax avoidance* dalam perusahaan semakin tinggi (Artinasari & Mildawati, 2018). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H1 : likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Leverage ialah rasio keuangan yang dipergunakan untuk mengukur dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). Sesuai teori agensi, prinsipal bisa mempergunakan rasio *leverage* dalam mengevaluasi kemampuan agen dalam mengorganisasikan utang untuk mencukupi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan (Ramdhania & Kinasih, 2021). Dalam sistem pendanaan suatu perusahaan sering terjadi permasalahan atau konflik antara *principal* dengan *agent*. Terdapat kemungkinan bahwa prinsipal tidak setuju akan adanya penambahan dana sehingga agen melakukan pinjaman dana dari pihak luar (Malau, 2021). Perusahaan dengan jumlah utang yang tinggi akan menimbulkan laba yang terkena pajak menjadi kecil karena adanya bunga utang yang dapat meminimalkan beban pajak, dengan demikian jika perusahaan mempunyai tingkat *leverage* tinggi maka kecenderungan untuk melaksanakan praktik *tax avoidance* akan semakin tinggi (Triyanti, dkk, 2020). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H2 : *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan ialah gambaran kecil atau besarnya suatu perusahaan yang bisa ditunjukkan dengan jumlah aset (Wati, 2019:31). Sumber daya yang terdapat dalam perusahaan besar akan lebih menarik pengawasan serta perhatian dari pihak pemerintah agar membayar pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Berdasarkan teori agensi, agen bisa mempergunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan guna memaksimalkan kompensasi atas performa agen (Dewi & Noviari, 2017). Agen yang bertugas dalam menjalankan operasi perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan laba dan ukuran perusahaan (Malau, 2021). Jika

ukuran perusahaan semakin besar maka praktik *tax avoidance* yang dilaksanakan akan rendah, hal itu disebabkan perusahaan yang berukuran besar lebih bisa memanfaatkan sumber dayanya dalam membuat perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018). Perusahaan berukuran besar lebih memilih untuk membayar pajak tanpa adanya tindakan *tax avoidance* demi mempertahankan citra perusahaan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H3 : ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota komisaris lainnya, direksi, dan pemegang saham pengendali (Rani, dkk, 2021). Sesuai dengan teori agensi jika jumlah komisaris independen semakin banyak tentu semakin baik pengawasan di perusahaan tersebut. Manajemen seringkali bersifat oportunitik karena mempunyai motivasi guna memaksimalkan laba supaya terdapat peningkatan bonus. Cara yang dilakukan yakni menekan biaya termasuk pembayaran pajak (Yogiswari & Ramantha, 2017). Pembayaran pajak termasuk kewajiban lancar perusahaan. Apabila perusahaan berada dikondisi likuiditas yang rendah akan mengakibatkan perusahaan tidak taat dengan ketentuan pajak. Sehingga dengan keberadaan komisaris independen maka peningkatan dalam pengawasan yang dilakukan tentu lebih baik dalam mengarahkan tindakan manajemen yang sesuai peraturan, termasuk ketentuan perpajakan sehingga dapat mencegah terjadinya *tax avoidance* (Fahmi & Adi, 2020). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H4 : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*

Leverage ialah rasio yang dapat mengukur dana yang berasal dari utang dalam pembiayaan investasi pada aset perusahaan (Sudana, 2015:23). Semakin besar penggunaan utang maka laba yang terkena pajak akan menjadi kecil hal ini dikarenakan adanya bunga atas utang tersebut (Rani, dkk, 2021). Berdasarkan teori keagenan, tata kelola perusahaan yang efektif dalam waktu yang lama dapat memberikan peningkatan terhadap kinerja perusahaan serta menguntungkan pemegang saham. Dalam tata kelola perusahaan terdapat komisaris independen yang bertanggung jawab untuk melaksanakan *monitoring* terhadap kualitas informasi didalam laporan keuangan. Peran komisaris independen sangat penting karena perannya dalam mengawasi kebijakan perusahaan tentang kebijakan utang perusahaan maka akan berjuang demi ketaatan

pajak sehingga bisa menjadi pencegah terjadinya *tax avoidance* (Wicaksana, dkk, 2021). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H5 : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan ialah gambaran kecil atau besar perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan jumlah aset (Wati, 2019:31). Sumber daya yang terdapat dalam perusahaan besar tentu akan menarik pengawasan pemerintah agar perusahaan besar membayar pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Sesuai teori keagenan, sumber daya dalam perusahaan bisa dipergunakan dalam memaksimalkan atas performa agen (Dewi & Noviani, 2017). Kinerja perusahaan yang baik dapat memaksimalkan laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga kemakmuran pemegang saham bisa tercapai. Jika ukuran perusahaan semakin besar maka tindakan *tax avoidance* yang dilakukan akan rendah dikarenakan perusahaan berukuran besar dapat memanfaatkan sumber dayanya guna membuat suatu perencanaan yang lebih baik (Handayani & Mildawati, 2018). Dengan kehadiran komisaris independen, jika ukuran perusahaan semakin besar maka komisaris independen akan mengawasi manajer lebih ketat lagi agar bisa mencegah terjadinya *tax avoidance* (Andini, dkk, 2021). Sesuai uraian diatas maka hipotesis yang bisa dirumuskan :

H6 : Komisaris independen memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Penelitian mengenai *tax avoidance* sudah dilaksanakan oleh banyak peneliti yakni Dillareta & Wuryani (2021) yang menggunakan variabel bebas berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). Selain itu Abdullah (2020) yang menggunakan variabel bebas berupa likuiditas dan *leverage*. Selanjutnya Aulia & Mahpudin (2020) dimana variabel bebasnya ialah *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian diatas seluruhnya variabel terikatnya ialah *tax avoidance* diukur dengan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Perbedaannya yakni variabel bebas yang dipergunakan penulis berupa likuiditas, *leverage*, serta ukuran perusahaan sedangkan variabel terikatnya yaitu *tax avoidance* diukur dengan rasio *Effective Tax Rate* (ETR), serta menambah variabel moderasi yaitu komisaris independen. Penelitian ini mempunyai tujuan yakni guna membuktikan pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* serta diharapkan komisaris independen dapat memoderasi hubungan likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan ialah metode pendekatan kuantitatif karena dalam memecahkan masalah dibutuhkan pengukuran, perhitungan setiap variabel serta dibutuhkan pengujian hipotesis yang sudah ditentukan. Metode kuantitatif ialah metode yang didasarkan atas data penelitian berbentuk angka serta dengan statistik dalam hal analisisnya (Sugiyono, 2018:11).

Objek penelitian yakni perusahaan industri dasar dan kimia yang sudah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Sumber data yakni data sekunder yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapat dari www.idx.co.id. Populasi penelitian yakni perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2018-2020. Teknik pengumpulan sampel yakni metode *purposive sampling* dimana teknik tersebut dengan pertimbangan dan kriteria yang sudah ditentukan (Sugiyono, 2018:301).

Pengukuran variabel *tax avoidance* dihitung dengan rasio ETR (*Effective Tax Rate*). Jika rasio ETR besar artinya tindakan *tax avoidance* rendah (Asri & Suardana, 2016). Perusahaan dikategorikan melakukan tindakan *tax avoidance* apabila ETR kurang dari 22%, rumus ETR adalah :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Likuiditas yakni tolak ukur yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pemenuhan liabilitas lancarnya (Horne & Wachowicz, 2014:167). Likuiditas dihitung dengan rasio CR (*Current Ratio*) (Sudana, 2015:24) :

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

Leverage yakni tolak ukur yang dipergunakan untuk peran penting pendanaan utang dengan menentukan besarnya presentase aset yang didukung dengan pendanaan utang (Horne & Wachowicz, 2014:170). *Leverage* dihitung dengan rasio DAR (*Debt to Asset Ratio*) (Sudana, 2015:23) :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran perusahaan ialah pengelompokan kecil atau besarnya perusahaan yang dapat dilihat melalui jumlah aset perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan rumus (Wati, 2019:31) :

Ukuran Perusahaan (size) = Ln(Total Aset)

Komisaris independen yakni anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota komisaris lainnya, direksi, dan pemegang saham pengendali (Rani, dkk, 2021).

Rumus menghitung proporsi dewan komisaris independen :

$$PKI = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Seluruh Dewan Komisaris}}$$

Teknik analisis data penelitian yakni analisis regresi moderasi berupa metode nilai selisih mutlak. Hubungan antar variabel bukan hanya ditentukan oleh variabel bebas ataupun variabel terikatnya tetapi sering muncul keberadaan variabel yang bisa memperlemah atau memperkuat hubungan keduanya yang disebut dengan variabel moderasi (Suliyanto, 2011:205). Persamaan regresi metode nilai selisih mutlak yakni :

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX_1 + \beta_2 ZX_2 + \beta_3 ZX_3 + \beta_4 ZZ + \beta_5 | ZX_1 - ZZ | + \beta_6 | ZX_2 - ZZ | + \beta_7 | ZX_3 - ZZ | + e$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

α = Nilai konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Nilai koefisien regresi

ZX₁ = Likuiditas terstandarisasi

ZX₂ = *Leverage* terstandarisasi

ZX₃ = Ukuran perusahaan terstandarisasi

ZZ = Komisaris independen terstandarisasi

| ZX₁ - ZZ | = Selisih mutlak likuiditas dengan komisaris independen

| ZX₂ - ZZ | = Selisih mutlak *leverage* dengan komisaris independen

| ZX₃ - ZZ | = Selisih mutlak ukuran perusahaan dengan komisaris independen

e = Standar error

HASIL PENELITIAN

Populasi yang dipergunakan yakni perusahaan industri dasar dan kimia tahun 2018-2020 yang sudah terdaftar di BEI. Pengumpulan data didapatkan dari website BEI yaitu www.idx.co.id dengan populasinya sebanyak 80 perusahaan. Mengumpulkan sampel penelitian yakni dengan teknik *purposive sampling* yang diperoleh sebanyak 33 data dikali tiga tahun pengamatan sehingga menghasilkan 99 data. Berikut hasil dari penentuan sampel :

Tabel 1
Hasil Penentuan Sampel

Kriteria	Sampel
Perusahaan industri dasar dan kimia yang sudah terdaftar di BEI tahun 2018-2020	80
Perusahaan yang telah menyajikan laporan keuangan 3 tahun berturut-turut tahun 2018-2020	71
Perusahaan yang telah menyajikan laporan keuangan berupa mata uang rupiah	55
Perusahaan yang mengalami laba selama masa pengamatan	34
Perusahaan yang mempunyai data lengkap untuk memenuhi variabel penelitian	33
Jumlah data	99
Data <i>outlier</i>	(29)
Jumlah data setelah <i>outlier</i>	70

Deskripsi data terhadap variabel yang dipergunakan adalah *tax avoidance*, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, serta komisaris independen. Dibawah ini tabel analisis statistik deskriptif :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CR (X1)	99	,70	208,44	4,7399	20,87825
DAR (X2)	99	,09	,78	,4033	,17415
SIZE (X3)	99	26,48	32,01	28,5857	1,36415
ETR (Y)	99	,03	2,94	,3431	,32445
PKI (Z)	99	,25	,67	,4091	,09577
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Hasil output SPSS

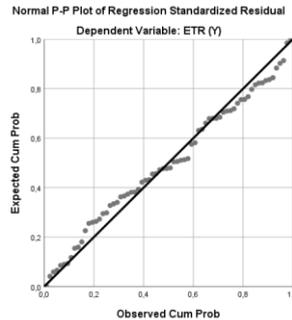
Sesuai dengan tabel statistik deskriptif, variabel ETR yakni nilai minimumnya 0,03, nilai maksimumnya 2,94, nilai *meamya* 0,3431 dan standar deviasinya 0,32445. Variabel CR yakni nilai minimumnya 0,70, nilai maksimumnya 208,44, nilai *meamya* 4,7399 dan standar deviasinya 20,87825. Variabel DAR yakni nilai minimumnya 0,09, nilai maksimumnya 0,78, nilai *meamya* 0,4033 dan standar deviasinya 0,17415. Variabel SIZE yakni nilai minimumnya 26,48, nilai maksimumnya 32,01, nilai *meamya* 28,5857 dan standar deviasinya 1,36415. Variabel PKI yakni nilai minimumnya 0,25, nilai maksimumnya 0,67, nilai *meamya* 0,4091 dan standar deviasinya 0,09577.

Hipotesis-hipotesis dalam penelitian akan di uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini ada 29 data *outlier* yang dikeluarkan sehingga total data yang bisa di uji asumsi klasik sebanyak 70 data.

Uji Normalitas

Analisis untuk uji normalitas di penelitian ini dengan grafik normal *probability plot* dan uji *Kolmogorov-smirnov test*. Dibawah ini ialah hasil grafik dan ujinya :

Gambar 2
Grafik Normal Probability Plot



Sumber : Hasil Output SPSS

Dari gambar tersebut menggambarkan bahwa grafik *normal probability plot* memperlihatkan penyebaran *plotting* dengan mengikuti garis diagonalnya, dengan demikian bisa diartikan bahwa data yang ada di penelitian telah terdistribusi normal.

Tabel 3
Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06296851
Most Extreme Differences	Absolute	,072
	Positive	,071
	Negative	-,072
Test Statistic		,072
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output SPSS

Uji *Kolmogorov-smirnov test* dan nilai Asymp.Sig (2-tailed) diatas menunjukkan angka 0,200 yang artinya $> 0,05$. Hal ini membuktikan data yang ada di penelitian telah terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Analisis untuk uji multikolinieritas melalui nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Dibawah ini ialah hasil ujinya :

Tabel 4
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Zscore: CR (X1)	,333	3,005
	Zscore: DAR (X2)	,194	5,156
	Zscore: SIZE (X3)	,512	1,953
	Zscore: PKI (Z)	,684	1,463
	ModerasiCR_Z	,645	1,551
	ModerasiDAR_Z	,599	1,671
	ModerasiSIZE_Z	,453	2,205

a. Dependent Variable: ETR (Y)

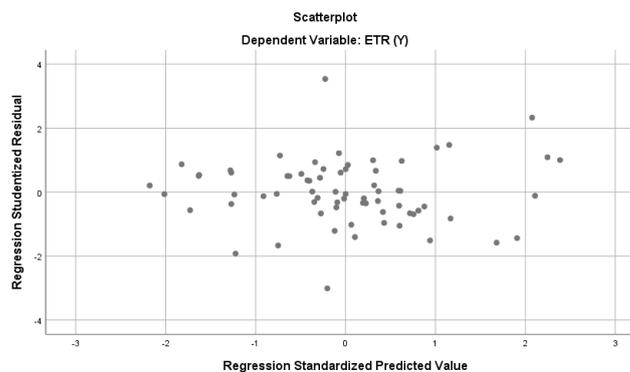
Sumber : Hasil Output SPSS

Nilai *Tolerance* yakni 0,333; 0,194; 0,512; 0,684; 0,645; 0,599 dan 0,453 nilai tersebut > 0,10 sedangkan nilai VIF yakni 3,005; 5,156; 1,953; 1,463; 1,551; 1,671; dan 2,205 nilai tersebut < 10. Dengan demikian dikatakan data tidak terindikasi korelasi antar variabel dan terbebas dari multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Analisis untuk uji heteroskedastisitas dengan grafik *Scatter Plot* dan uji glejser. Dibawah ini ialah hasil grafiknya :

Gambar 3
Grafik *Scatter Plot*



Sumber : Hasil Output SPSS

Titik-titik dalam gambar tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y sehingga bisa dibuktikan tidak terjadi heteroskedastisitas didalam penelitian ini.

Tabel 5
Uji Uji Glejser
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,061	,015		4,074	,000
Zscore: CR (X1)	-,010	,009	-,243	-1,165	,249
Zscore: DAR (X2)	-,004	,012	-,103	-,375	,709
Zscore: SIZE (X3)	-,001	,007	-,015	-,090	,929
Zscore: PKI (Z)	,009	,006	,217	1,490	,141
ModerasiCR_Z	-,008	,007	-,159	-1,057	,295
ModerasiDAR_Z	-,005	,010	-,071	-,454	,652
ModerasiSIZE_Z	,000	,008	,003	,019	,985

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Hasil Output SPSS

Nilai signifikansi variabel bebas dengan absolut residual secara berurutan ialah 0,249; 0,709; 0,929; 0,141; 0,295; 0,652; dan 0,985. Nilai tersebut >0,05 yang bisa diartikan tidak terjadi heteroskedastisitas didalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Analisis uji autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW). Dibawah ini ialaha hasil ujinya :

Tabel 6
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,533 ^a	,284	,203	,06643	2,020

a. Predictors: (Constant), ModerasiSIZE_Z, Zscore: CR (X1), Zscore: PKI (Z), Zscore: SIZE (X3), ModerasiCR_Z, ModerasiDAR_Z, Zscore: DAR (X2)

b. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS

Dapat diketahui bahwa DW-Test diatas ialah nilai Durbin Uper (DU) sebesar 1,8375 sedangkan nilai DW hitung sebesar 2,020. Rumus uji autokorelasi ialah $DU < DW < 4 - DU$ agar mendapatkan kesimpulan tidak terjadi autokorelasi dimana dalam penelitian ini didapatkan nilai $1,8375 < 2,020 < 2,1625(4 - 1,8375)$ yang menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Moderasi dengan Metode Nilai Selisih Mutlak

Analisis regresi moderasi mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi yang dipergunakan bisa memperlemah maupun memperkuat hubungan antara variabel independen dengan dependennya. Berikut uji regresinya berupa metode nilai selisih mutlak :

Tabel 7
Analisis Regresi Moderasi dengan Metode Nilai Selisih Mutlak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,280	,024		11,881	,000
	Zscore: CR (X1)	-,032	,014	-,447	-2,397	,020
	Zscore: DAR (X2)	-,012	,018	-,153	-,629	,532
	Zscore: SIZE (X3)	-,026	,011	-,361	-2,406	,019
	Zscore: PKI (Z)	,016	,010	,214	1,650	,104
	ModerasiCR_Z	-,001	,011	-,015	-,114	,910
	ModerasiDAR_Z	-,020	,016	-,177	-1,271	,208
	ModerasiSIZE_Z	,007	,013	,086	,536	,594

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS

Dari hasil uji regresi moderasi diperoleh hasil persamaannya :

$$Y = 0,280 + (-0,032)ZX_1 + (-0,012)ZX_2 + (-0,026)ZX_3 + 0,016ZZ + (-0,001) | ZX_1 - ZZ | + (-0,020) | ZX_2 - ZZ | + 0,007 | ZX_3 - ZZ | + e$$

- a. Nilai konstanta yakni 0,280, artinya bahwa apabila variabel likuiditas terstandarisasi (ZX_1), *leverage* terstandarisasi (ZX_2), ukuran perusahaan terstandarisasi (ZX_3), komisaris independen terstandarisasi (ZZ), nilai selisih mutlak likuiditas dengan komisaris independen ($|ZX_1 - ZZ|$), nilai selisih mutlak *leverage* dengan komisaris independen ($|ZX_2 - ZZ|$), dan nilai selisih mutlak ukuran perusahaan dengan komisaris

independen ($|ZX_3-ZZ|$) tidak mengalami perubahan atau konstan dengan nilai 0, maka variabel ETR bernilai 0,280.

- b. Koefisien regresi variabel likuiditas terstandarisasi (ZX_1) bernilai -0,032, berarti bahwa tiap kenaikan variabel likuiditas sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* menurun sebesar 0,032.
- c. Koefisien regresi variabel *leverage* terstandarisasi (ZX_2) bernilai -0,012, berarti bahwa tiap kenaikan variabel *leverage* sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* menurun sebesar 0,012.
- d. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan terstandarisasi (ZX_3) bernilai -0,026, berarti bahwa tiap kenaikan variabel ukuran perusahaan sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* menurun sebesar 0,026.
- e. Koefisien regresi variabel komisaris independen terstandarisasi (ZZ) bernilai 0,016, berarti bahwa tiap kenaikan variabel komisaris independen sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* naik sebesar 0,016.
- f. Koefisien regresi variabel moderasi nilai selisih mutlak likuiditas dengan komisaris independen ($|ZX_1-ZZ|$) bernilai -0,001, berarti bahwa tiap kenaikan variabel moderasi nilai selisih mutlak likuiditas dengan komisaris independen sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* menurun sebesar 0,001.
- g. Koefisien regresi variabel moderasi nilai selisih mutlak *leverage* dengan komisaris independen ($|ZX_2-ZZ|$) bernilai -0,020, berarti bahwa tiap kenaikan variabel moderasi nilai selisih mutlak *leverage* dengan komisaris independen sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* menurun sebesar 0,020.
- h. Koefisien regresi variabel moderasi nilai selisih mutlak ukuran perusahaan dengan komisaris independen ($|ZX_3-ZZ|$) bernilai 0,007, berarti bahwa tiap kenaikan variabel moderasi nilai selisih mutlak ukuran perusahaan dengan komisaris independen sebesar satu satuan maka artinya variabel *tax avoidance* naik sebesar 0,007.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dari dilakukannya uji koefisien determinasi ialah guna mengukur dan mengetahui sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel *tax avoidance*. Di bawah ini hasil ujinya :

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,533 ^a	,284	,203	,06643	2,020

a. Predictors: (Constant), ModerasiSIZE_Z, Zscore: CR (X1), Zscore: PKI (Z), Zscore: SIZE (X3), ModerasiCR_Z, ModerasiDAR_Z, Zscore: DAR (X2)

b. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS

Tabel berikut membuktikan bahwa *Adjusted R Square* bernilai 0,203 artinya 20,3% yang membuktikan variabel dependen (terikat) yakni *tax avoidance* bisa dipengaruhi variabel ZscoreCR, ZscoreDAR, ZscoreSIZE, ZscorePKI, serta moderasi CR(Z), moderasi DAR(Z), dan moderasi SIZE(Z) sebesar 20,3% namun sisanya 79,7% dipengaruhi variabel lain diluar dari model penelitian.

Uji t (Uji Parsial)

Analisis uji parsial dipergunakan untuk membuktikan apakah tiap variabel bebas yang ada di penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dibawah ini hasil ujinya :

Tabel 9
Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,280	,024		11,881	,000
	Zscore: CR (X1)	-,032	,014	-,447	-2,397	,020
	Zscore: DAR (X2)	-,012	,018	-,153	-,629	,532
	Zscore: SIZE (X3)	-,026	,011	-,361	-2,406	,019
	Zscore: PKI (Z)	,016	,010	,214	1,650	,104
	ModerasiCR_Z	-,001	,011	-,015	-,114	,910
	ModerasiDAR_Z	-,020	,016	-,177	-1,271	,208
	ModerasiSIZE_Z	,007	,013	,086	,536	,594

a. Dependent Variable: ETR (Y)

Sumber : Hasil Output SPSS

Pada variabel likuiditas didapatkan t hitung bernilai -2,397 dan signifikansi bernilai 0,020 < 0,05. Hal itu bisa diartikan H₁ diterima, yang diartikan likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya variabel *leverage* didapatkan t hitung

bernilai -0,629 dan signifikansi bernilai $0,532 > 0,05$. Hal itu bisa diartikan H_2 ditolak, yang diartikan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berikutnya variabel ukuran perusahaan didapatkan t hitung bernilai -2,406 dan signifikansi bernilai $0,019 < 0,05$. Hal itu bisa diartikan H_3 diterima, yang diartikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pada variabel moderasi CR_Z yang didapatkan t hitung bernilai -0,114 dan signifikansi bernilai $0,910 > 0,05$. Hal itu bisa diartikan H_4 ditolak, yang diartikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) hubungan likuiditas pada *tax avoidance*. Selanjutnya variabel moderasi DAR_Z yang didapatkan t hitung bernilai -1,271 dan signifikansi bernilai $0,208 > 0,05$. Hal itu bisa diartikan H_5 ditolak, yang diartikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) hubungan *leverage* pada *tax avoidance*. Berikutnya pada variabel moderasi SIZE_Z yang didapatkan t hitung bernilai 0,536 dan signifikansi bernilai $0,594 > 0,05$. Hal itu dapat diartikan H_6 ditolak, yang diartikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) hubungan ukuran perusahaan pada *tax avoidance*.

Uji F (Uji Simultan)

Analisis uji simultan dipergunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh pada variabel terikat. Dibawah ini hasil ujinya :

Tabel 10
Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,108	7	,015	3,511	,003 ^b
	Residual	,274	62	,004		
	Total	,382	69			

a. Dependent Variable: ETR (Y)

b. Predictors: (Constant), ModerasiSIZE_Z, Zscore: CR (X1), Zscore: PKI (Z), Zscore: SIZE (X3), ModerasiCR_Z, ModerasiDAR_Z, Zscore: DAR (X2)

Sumber : Hasil Output SPSS

Tabel tersebut membuktikan F bernilai 3,511 dan signifikansi bernilai 0,003. Itu membuktikan variabel bebas berupa likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan serta variabel moderasi berupa komisaris independen secara simultan dapat berpengaruh

pada variabel terikat yakni *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan signifikansinya bernilai $0,003 < 0,05$.

PEMBAHASAN

Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian telah membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dari signifikansi likuiditas bernilai $0,020 < 0,05$ dan t hitung berarah negatif -2,397. Sehingga H_1 diterima yang artinya jika tingkat likuiditas semakin tinggi dalam suatu perusahaan artinya *tax avoidance* semakin rendah. Penelitian ini selaras dengan penelitian Pasaribu & Mulyani (2019) dan Artinasari & Mildawati (2018) membuktikan likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sesuai *agency theory*, kontrak atau hubungan antara manajemen dan pemegang saham tergantung pada penilaian pemegang saham terhadap kinerja manajemen (Malau, 2021). Manajer perusahaan sebagai *agent* berusaha untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yaitu dengan memaksimalkan kinerja manajemen dengan cara menjaga likuiditasnya. Jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas tinggi, *tax avoidance* dalam perusahaan cenderung akan rendah (Sarasati & Asyik, 2018).

Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian telah membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dari signifikansi *leverage* bernilai $0,532 > 0,05$ dan t hitung berarah negatif -0,629. Sehingga H_2 ditolak yang artinya jika tingkat *leverage* semakin tinggi dalam suatu perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini selaras dengan penelitian Siboro & Santoso (2021) dan Saputro, dkk (2018) membuktikan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu disebabkan karena jika tingkat utang semakin tinggi tentu manajemen akan lebih konservatif lagi untuk melaksanakan pelaporan keuangan mengenai operasional perusahaan (Hidayat, 2018). Menurut teori agensi, prinsipal dapat mempergunakan rasio *leverage* untuk mengevaluasi kemampuan agen untuk mengorganisasikan utang perusahaan dalam mencukupi kepentingan operasional perusahaan (Ramdhania & Kinasih, 2021).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang

ditunjukkan dari signifikansi ukuran perusahaan bernilai $0,019 < 0,05$ dan t hitung berarah negatif $-2,406$. Sehingga H_3 diterima yang artinya jika ukuran perusahaan semakin besar, *tax avoidance* semakin rendah. Penelitian ini selaras dengan penelitian Suryani (2020) dan Handayani & Mildawati (2018) membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sesuai teori agensi bahwa agen bisa memanfaatkan sumber daya yang ada pada suatu perusahaan guna memaksimalkan kompensasi performa agen (Dewi & Noviani, 2017). Jika ukuran perusahaan besar, *tax avoidance* yang dilaksanakan perusahaan akan rendah, hal tersebut dikarenakan perusahaan besar lebih bisa memanfaatkan sumber dayanya untuk membuat suatu perencanaan yang baik (Handayani & Mildawati, 2018).

Komisaris Independen Memoderasi (Memperlemah) Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dari signifikansi bernilai $0,910 > 0,05$ dan t hitung $-0,114$. Sehingga diartikan H_4 ditolak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Yogiswari & Ramantha (2017) membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris membutuhkan komisaris independen untuk meminimalkan konflik agensi yang dimungkinkan terjadinya perilaku oportunitik. Namun karena kuatnya kendali kepemilikan saham dan pendiri perusahaan yang mayoritas akan menjadikan tanggung jawab komisaris independen dalam melakukan pengawasan menjadi tidak efektif (Yogiswari & Ramantha, 2017).

Komisaris Independen Memoderasi (Memperlemah) Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dari signifikansi bernilai $0,208 > 0,05$ dan t hitung $-1,271$. Sehingga diartikan H_5 ditolak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Sinaga & Suardikha (2019) membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, tata kelola perusahaan yang baik maka performa perusahaan mengalami peningkatan serta menguntungkan pemegang saham dimana komisaris independen dapat memonitoring

tindakan manajemen. Namun dengan adanya komisaris independen tidak bisa berpengaruh pada tindakan manajemen termasuk *tax avoidance* dikarenakan perilaku manajemen dalam pengambilan keputusan perpajakannya didasarkan atas niat dan keinginannya sehingga upaya dalam melakukan tindakan *tax avoidance* dengan menggunakan utang atau tidak sepenuhnya berada ditangan manajemen (Sinaga & Suardikha, 2019).

Komisaris Independen Memoderasi (Memperlemah) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dari uji yang sudah dilaksanakan dalam penelitian membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dari signifikansi bernilai $0,594 > 0,05$ dan t hitung $0,536$. Sehingga diartikan H_0 ditolak. Penelitian ini selaras dengan penelitian Azzam & Subekti (2019) membuktikan komisaris independen tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki sumber daya yang berlimpah bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan kinerja agen (Dewi & Noviari, 2017). Jika ukuran perusahaan besar tentu komisaris independen akan mengawasi semakin ketat lagi. Namun kehadiran komisaris independen tidak bisa menjadi pencegah *tax avoidance* dikarenakan komisaris independen yang ada dalam perusahaan telah independen tetapi dalam tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan tidak berjalan dengan efektif dalam upaya untuk mencegah terjadinya *tax avoidance* (Oktavia, dkk, 2020).

KESIMPULAN

Sesuai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan beserta pembahasan atau interpretasinya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel likuiditas dan ukuran perusahaan terbukti bisa mempengaruhi *tax avoidance* tetapi *leverage* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu komisaris independen juga tidak bisa memoderasi (memperlemah) pengaruh likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sehingga dengan adanya komisaris independen didalam perusahaan belum bisa efektif untuk mencegah terjadinya *tax avoidance*.

Keterbatasan yang ada di penelitian ini hanya mempergunakan perusahaan industri dasar dan kimia, jangka waktunya sebatas tiga tahun yakni 2018-2020 sehingga jumlah sampelnya juga terbatas serta variabel yang dipergunakan hanya likuiditas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan komisaris independen. Peneliti bisa memberikan saran

yakni bisa menggunakan sampel penelitian yang lainnya misalnya perusahaan sektor pertambangan, sektor *property* dan *real estate*, dan lain-lain, selain itu bisa menambahkan variabel lainnya seperti *corporate social responsibility*, komite audit, dewan direksi dan lain-lain, serta bisa menggunakan periode pengamatan penelitian tahun terbaru sehingga hasil penelitian dapat lebih menggambarkan kondisi perusahaan saat ini.

REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22.
- Alam, M. H., & Fidiana. (2019). Pengaruh Manajemn Laba, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–22.
- Andini, R., Arditya Dian Andika, & Ari Pranaditya. (2021). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 1–10.
- Artinasari, N., & Titik Mildawati. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1–18.
- Asri, I. A. T. Y., & Ketut Alit Suardana. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100.
- Aulia, I., & Endang Mahpudin. (2020). Pengaruh profitabilitas , leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance The effect of profitability , leverage , and company size on tax avoidance. *Akuntabel*, 17(2), 289–300.
- Azzam, A., & Khalisah Visiana Subekti. (2019). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.
- Brigham, E. F., & Joel F. Houston. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Jakarta:Salemba Empat.
- Dewi, N. L. P. P., & Naniek Noviyari. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 830–859.
- Diantari, P. R., & IGK Agung Ulupui. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 16(1), 702–732.
- Dillareta, I. S., & Eni Wuryani. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 84–94.
- Fahmi, A. A., & Priyo Hari Adi. (2020). Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak dengan Pemoderasi Corporate Governance. *Perspektif Akuntansi*, 3(2), 85–107.
- Halim, A., Icut Rangga Banowo, & Amin Dara. (2020). *Perpajakan*. Jakarta: Jakarta:Salemba Empat.
- Handayani, M. F., & Titik Mildawati. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*,

- 7(2), 1-16.
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19-26.
- Horne, J. C. Van, & John M. Wachowicz, J. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Jakarta:Salemba Empat.
- Khoirunissa, O., & Juli Ratnawati. (2021). Analysis of The Factors Affect Tax Avoidance In Mining Companies On The Stock Exchange (IDX) 2018-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 38-48.
- Malau, M. S. M. B. (2021). Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Leverage Terhadap Agresivitas Pajak : Profitabilitas Sebagai Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, (e-ISSN: 2810-0921), 83-96.
- Oktavia, V., Ulfi Jefri, & Jaka Wijaya Kusuma. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue*, 01(02), 143-151.
- Pasaribu, D. M., & Susi Dwi Mulyani. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity Terhadap Tax Avoidance Dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi, *11(02)*, 211-217.
- Ramdhania, D. Z., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan*, 10(2), 93-106.
- Rani, A. M., Mulyadi, & Dwi Prastowo Darminto. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Dan Akuntansi Perpajakan*, 8(02).
- Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency)*. Bogor: Bogor:Ghalia Indonesia.
- Saputro, D. A., Dudi Pratomo, & Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(1), 713-719.
- Sarasati, D. H., & Nur Fadrih Asyik. (2018). Pengaruh Good Corporate Governace, Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1-21.
- Siboro, E., & Hendra F. Santoso. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 21-36.
- Sinaga, C. H., & I Made Sadha Suardikha. (2019). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity pada Tax Avoidance dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(1), 1-32.
- Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Jakarta:Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Bandung:Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Suryahadi, A. (2019). Penjualan tertekan, pendapatan Unggul Indah Cahaya (UNIC) di kuartal III-2019 turun.
- Suryani. (2020a). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Return On Asset , Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1),

83–98.

- Suryani. (2020b). Pengaruh Ukuran Perusahaan , Return On Asset , Debt To Asset Ratio dan Pengaruh Ukuran Perusahaan , Return On Asset , Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), 83–98. doi:10.51211/joia.v5i1.1322
- Triyanti, N. W., Kartika Hendra Titisari, & Riana Rachmawati Dewi. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113–120.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Jakarta:Salemba Empat.
- Wati, L. N. (2019). *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Ponorogo: Ponorogo:Myria Publisher.
- Wicaksana, S. A., Syahril Djaddang, & Darmansyah. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 264–281.
- Wijayanti, Y. C., & Ni Ketut Lely A. Merkusiwati. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 20(1), 699–728.
- Yogiswari, N. K. K., & I Wayan Ramantha. (2017). Pengaruh Likuiditas Dan Corporate Social Responsibility Pada Agresivitas Pajak Dengan Corporate Governace Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 730–759.

Bagaimana Adaptasi Sistem Keringanan Pembayaran PT Jasa Raharja Madiun Saat Covid-19?

Selvia Angger Sari, Supri Wahyudi Utomo, Elana Era Yusdita
Universitas PGRI Madiun
elaradita@unipma.ac.id

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1185

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	07 Juli, 2022
Tanggal Revisi	11 November, 2022
Tanggal diterima	29 November, 2022

Keywords:

Income
JR-Ku
application
system
Jasa Raharja

Abstract:

This study aims to determine the application system for IWKBU payment relief and the implementation of the tax relief system during the pandemic for taxpayers for 3 months to ease the payment of SWDKLLJ at PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch Representative Office during the Covid-19 period. The type of research used is descriptive qualitative, researchers conducted interviews with informants, namely employees of PT Jasa Raharja (Persero) Madiun Branch. The results of this research are Jasa Raharja Madiun employees that income during this pandemic is very low, as well as a system of asking for waivers for PO Buses and a 3 month tax relief system is applied for taxpayers because with the pandemic the community's economy is declining and the PO Bus cannot operate. Then the JR-Ku application can make payments easier and can be more effective and efficient in time.

Kata Kunci:

Pendapatan
Sistem aplikasi
JR-Ku
Jasa Raharja

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengajuan keringanan pembayaran IWKBU dan pemberlakuan sistem pemutihan selama pandemi bagi wajib pajak selama 3 bulan untuk meringankan pembayaran SWDKLLJ pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun pada masa Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, peneliti melakukan wawancara kepada tiga orang informan yaitu karyawan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun. Hasil dari penelitian ini adalah pegawai Jasa Raharja Kota Madiun bahwa pendapatan dimasa pandemi ini sangat menurun, begitu juga diberlakukan sistem meminta keringanan untuk PO Bus dan diberlakukan sistem pemutihan selama 3 bulan untuk wajib pajak karena dengan adanya pandemi perekonomian masyarakat menurun dan pihak PO Bus tidak dapat beroperasi. Kemudian adanya aplikasi JR-Ku dapat mempermudah pembayaran dan dapat lebih efektif dan efisien dalam waktu.

PENDAHULUAN

PT Jasa Raharja disingkat Jasa Raharja merupakan suatu perseroan yang bergerak di bidang asuransi sosial. Tugas Jasa Raharja merupakan membagikan proteksi dasar kepada penumpang angkutan umum serta pula kepada pihak ketiga di luar kendaraan pemicu musibah. Tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga memberikan santunan untuk korban yang mengalami musibah. Santunan yang diberikan Jasa Raharja buat korban musibah telah didapatkan buat tiap orang yang hadapi musibah dengan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di setiap wajib pajak membayar pajak di Samsat. Sumbangan wajib sudah tertera di STNK wajib pajak. Wajib pajak mendapatkan santunan ketika terjadi kecelakaan. Tidak hanya untuk kecelakaan pribadi, kecelakaan kendaraan umum juga mendapatkan santunan dari Jasa Raharja, karena penumpang membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) pembayaran diterapkan lewat karcis yang diberikan kepada penumpang buat menjamin kala terjalin musibah laka lintas.

Jasa Raharja Madiun tidak hanya menangani di Kota Madiun saja, tetapi Jasa Raharja juga menangani beberapa daerah yaitu mulai dari daerah Pacitan, Ponorogo, Madiun Kabupaten, Ngawi, Widodaren, dan Magetan. Dari ketujuh daerah ini berpusat pada cabang Jasa Raharja Kota Madiun sehingga pengumpulan data dan pendapatan dari wajib pajak disetorkan ke pada Jasa Raharja Madiun. Karena Jasa Raharja merupakan BUMN satu-satunya yang menangani asuransi kecelakaan. Dalam hal ini masyarakat masih belum sadar akan bahaya yang akan terjadi di jalan, banyak ditemui kasus kecelakaan yang terjadi akibat tidak berhati-hati dan faktor-faktor lain dalam berkendara. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena kecerobohan pengemudi itu sendiri maupun dari pihak lain. Tetapi tanpa sadar masyarakat saat terjadi kecelakaan masih belum paham dengan langkah-langkah apa saja yang wajib dilakukann buat memperoleh santunan dari Jasa Raharja. Ketika kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan beruntun terjadi, sebagian masyarakat masih mencari bergantung dari biaya rumah sakit padahal ketika kecelakaan itu terjadi seluruh biaya sudah ditanggung oleh Jasa Raharja untuk biaya santunan.

Sumber dana yang diterima oleh Jasa Raharja diperoleh dari pembayaran yang dibayarkan setiap tahun oleh wajib pajak. Pembayaran yang dibayarkan meliputi SWDKLLJ dan IWKBU. Terdapat perbedaan tarif disetiap kendaraan. Kendaraan motor membayarkan Rp35.000, Bus dan Elf Rp90.000, Mobil pribadi Rp143.000, Bus Reguler

sheet 40 Rp125.000/bulan, dan Bus Pariwisata Rp100.000/bulan. Menurut Wahyu Wibowo, pada saat pandemi Covid-19 memberi pengaruh besar terhadap pemasukan Jasa Raharja secara agregat. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang mengalami kesulitan dalam pembayaran akibat dampak Covid-19 dikutip Retno (2020). Permasalahan ini juga terjadi di Jasa Raharja Perwakilan Madiun, dimana terdapat penurunan dalam pemasukan selama Covid-19. Pendapatan yang diperoleh dari SWDKLLJ dan IWKBU keduanya berdampak mengalami penurunan. Karena adanya diskon pajak dari Bulan Juni-Agustus, penghapusan denda pada Bulan Juni-September, dan pemutihan pada Bulan September-November.

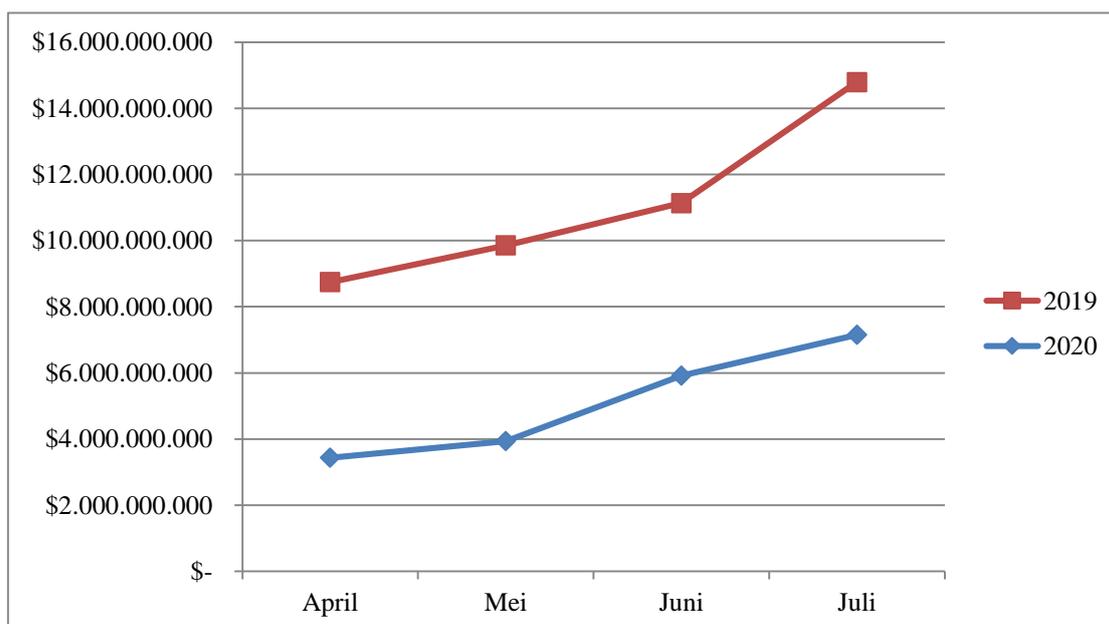
Pemasukan selama Bulan April-Mei mengalami penurunan drastis dikarenakan pada periode tersebut merupakan awal penyebaran Covid-19 di Indonesia. Bahkan sampai sekarang pemasukan di Jasa Raharja masih belum juga stabil karena kebijakan pemutihan masih berlaku. Terdapat potongan selama 3 bulan dari kantor pusat untuk keringanan wajib pajak yang menyebabkan penurunan pemasukan selama pandemi Covid-19 ini. Perbandingan pemasukan dari sebelum terdampak covid-19 dan sesudah terdampak covid-19 sangat jauh. Sumber data yang peneliti lampirkan ini hanya bersumber dari daerah cabang Madiun saja. Bisa dilihat pada Gambar 1.

Usaha yang dilakukan Jasa Raharja agar pemasukan menjadi stabil lagi dengan cara berkomunikasi melalui telepon dan mengunjungi ke PO bus, setelah dari pihak Jasa Raharja berkomunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan. Bila pihak yang bersangkutan tidak dapat membayar lewat transfer hingga pihak Jasa Raharja langsung terjun ke lapangan untuk menagih tagihan yang harus dibayar.

Hasil penelitian Fauzi (2018) menyatakan bahwa pengakuan pendapatan premi selama periode yang bersangkutan sangat penting untuk menciptakan profitabilitas yang sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua risiko dari tertanggung, perusahaan asuransi membutuhkan dana yang cukup besar untuk menutupi semua tanggungan sehingga perusahaan tetap dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Hasil penelitian Putri (2015) menyatakan bahwa sistem dan prosedur penagihan kas yang diterapkan perusahaan mendukung penuh pengendalian internal dan mendukung pelaksanaan prosedur pembayaran klaim kecelakaan. Setiap kwitansi dari kantor Samsat diotorisasi dan disetujui oleh penanggung jawab perwakilan, kemudian diproses oleh kasir. Jadi sistem penerimaan kas yang baik mendukung ketersediaan dana klaim yang memadai. Hasil penelitian Suratno et al.,

(2016) menyatakan bahwa pemasukan di Jasa Raharja terdiri dari penerimaan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Perkembangan kendaraan sektor penumpang umum terus menyusut serta berbanding lurus dengan penyusutan pemasukan pada bagian IWKBU, sebaliknya buat bagian penerimaan dari SWDKLLJ mengalami peningkatan perkembangan rata-rata 8% sd. 10% masing-masing tahun. Hal ini tidak didukung dengan pendataan jumlah aktual kendaraan penumpang umum yang disumbangkan untuk sebagian pendapatan IWKBU. Hasil penelitian Sugiastuti et al., (2014) menyatakan bahwa sistem dan prosedur pembayaran klaim yang memadai perlu diterapkan untuk mendukung pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk melindungi aset perseroan. Pengendalian internal ialah sesuatu metode buat membimbing, mengawasi serta berfungsi berarti dalam menghindari bermacam wujud kecurangan yang bisa merugikan kepentingan perseroan. Hasil penelitian Riftiasari dan Sugiarti (2020) menyatakan bahwa asuransi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia dan memiliki arti perlindungan diri, salah satunya adalah asuransi kecelakaan lalu lintas yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko kecelakaan saat berkendara. Serta pada dikala korban membutuhkan santunan itu hingga wajib membayar SWDKLLJ pada dikala membayar pajak bermotor.

Gambar 1
Perbandingan pemasukan di PT Jasa Raharja pada saat sebelum Covid-19 dan sesudah Covid-19



Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pengakuan pendapatan premi pada Jasa Raharja. Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu belum membahas tentang sistem keringanan IWKBU di Jasa Raharja. Jadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem pengajuan keringanan IWKBU dan pemberlakuan sistem pemutihan selama pandemi bagi wajib pajak selama 3 bulan untuk meringankan pembayaran SWDKLLJ pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti fokus meneliti tentang sistem pengajuan keringanan pembayaran IWKBU dan pemberlakuan sistem pemutihan selama pandemi bagi wajib pajak selama 3 bulan untuk meringankan pembayaran SWDKLLJ pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pengajuan keringanan pembayaran IWKBU dan pemberlakuan sistem pemutihan selama pandemi bagi wajib pajak selama 3 bulan untuk meringankan pembayaran SWDKLLJ pada PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Cabang Madiun pada masa Covid-19.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada bagian teknik, bagian kasir dan penanggung jawab di SAMSAT Madiun dan Magetan dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai kriteria masalah yang diteliti. Ketiga informan tersebut berinisial (E), (A), dan (S). Informan (E) merupakan bagian teknik dan juga bagian penerimaan pendapatan di PT Jasa Raharja. Informan (E) mengetahui bagaimana prosedur penerimaan selama di PT Jasa Raharja dan menerima pendapatan dari berbagai Samsat dengan bukti Laporan Harian Penerimaan Samsat (LHP). Ada 7 Samsat yang setiap sore hari setor pemasukan yaitu dari Samsat Madiun Kota, Samsat Madiun Kabupaten, Samsat Ponorogo, Samsat Pacitan, Samsat Magetan, Samsat Ngawi, Samsat Widodaren. Wawancara penelitian ini juga mewawancarai informan (A) merupakan bagian penanggung jawab di SAMSAT Madiun Kabupaten bekerja dibagian penerimaan pendapatan dari wajib pajak di SAMSAT yang kemudian disetorkan ke PT Jasa Raharja. Alasan peneliti memilih informan (A) karena bersangkutan dengan penerimaan

pendapatan. Selanjutnya ada informan (S) bekerja dibagian kasir juga bersangkutan dengan penerimaan pendapatan yang diterima dari bagian teknik untuk dimasukkan kedalam sistem komputer. Peneliti mendapat informasi dari beberapa sumber, seperti konsultasi yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan pada PT Jasa Raharja (Persero) cabang Madiun. Sumber dokumentasi didapat dari data Jasa Raharja (Persero) cabang Madiun yang berhubungan dengan adanya permasalahan pendapatan saat terjadi Covid-19 dan perubahan sistem pendapatan. Bukti dokumentasi lain didapat dari hasil wawancara yang berupa rekaman wawancara dan transkrip hasil wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dimulai bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa kualitatif, dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di perusahaan PT Jasa Raharja yang disusun menurut kenyataan dilapangan dan membentuk definisi data yang sudah di triangulasi.

Pendapatan pada PT Jasa Raharja, Pendapatan yang diterima Jasa Raharja dilihat dari hasil wawancara dan triangulasi data dengan jawaban yang sama.

"Sumber pemasukan yang diterima Jasa Raharja itu dari SWDKLLJ dan IWKBU. Jadi SWDKLLJ itu dari wajib pajak yang membayar di SAMSAT setiap tahunnya yang tertera dilembar STNK untuk disetor di Jasa Raharja. Untuk IWKBU itu pembayaran yang dilakukan oleh kendaraan roda 4 atau angkutan umum."(Informan E)

"Ada perbedaan setiap tarif kendaraan, dimana kendaraan bermotor membayarkan Rp35.000, Bus dan Elf Rp90.000, Mobil pribadi Rp143.000, Bus regular sheet 40 Rp125.000, Bus pariwisata Rp100.000/bulan."
(Informan A)

"Prosedur penerimaan untuk Jasa Raharja itu pertama disetorkan ke bagian teknik setelah semua terkumpul baru disetorkan ke bagian kasir."(Informan S)

Dari semua informasi yang peneliti dapat dari informan, peneliti simpulkan bahwa pendapatan di Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun ini bersumber dari SWDKLLJ dan IWKBU, pembayaran yang dilakukan wajib pajak yang sudah diterterakan di masing-

masing STNK. Sudah ada tarif paten yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang diterterakan di STNK masing-masing wajib pajak. Setiap prosedur penerimaan untuk Jasa Raharja ada beberapa langkah, mulai dari pembayaran di SAMSAT kemudian disetorkan kepada bagian teknik melalui sistem dan langkah terakhir baru disetorkan kepada pihak kasir untuk dicatat.

Ancaman pemasukan pada PT Jasa Raharja itu dikarenakan adanya pandemi saat ini. Bukan hanya pendapatan SWDKLLJ, tetapi pendapatan dari IWKBU juga mengalami penurunan drastis. Diberlakukannya diskon pajak dan penghapusan denda selama pandemi adalah salah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan.

“Kondisi penerimaan saat ini sangatlah menurun karena adanya pandemi.”

(Informan E)

“Semua (SWDKLLJ dan IWKBU) mengalami penurunan drastis, pemasukan belum stabil karena adanya pandemi.” (Informan A)

“Faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan itu diberlakukan diskon pajak selama 3 bulan, dan penghapusan denda selama 3 bulan.” (Informan S)

Dari semua informasi yang peneliti dapat dari informan, peneliti simpulkan bahwa untuk meringankan wajib pajak diberlakukan sistem pemutihan selama masa pandemi. Karena selama pandemi semua masyarakat diisolasi mandiri selama 2 minggu, dan kebanyakan pekerja dirumahkan atau diliburkan sementara untuk mencegah penyebaran Covid-19. Dari semua informasi yang peneliti dapat dari informan, peneliti simpulkan bahwa tidak hanya untuk wajib pajak saja tetapi untuk PO Bus pariwisata yang tidak beroperasi juga mendapatkan keringanan.

“Tentunya ada (keringanan), diberlakukan sistem pemutihan selama 3 bulan pada bulan September-November.” (Informan E)

“Dengan cara mengajukan surat keringanan dari pihak yang ingin meminta keringanan disertai foto, disposisi, dan surat keterangan disertai tanda tangan dari atasannya.” (Informan A)

Sistem aplikasi JR-Ku mempermudah pembayaran untuk pihak PO Bus dan angkutan umum. Mereka tidak perlu susah payah datang ke tempat untuk melakukan pembayaran, cukup dengan melalui aplikasi JR-Ku maka semua sudah bisa terproses cukup mudah dan tidak perlu keluar rumah. Begitupun dengan adanya sistem ini juga akan mudah dipantau dari kantor pusat sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan.

“Untuk penggunaan aplikasi JR-Ku sebenarnya bisa mempermudah melakukan pembayaran karena melalui via gadget langsung pemilik, pengurus PO Bus dan pemilik kendaraan angkutan umum. Berhubung selama masa pandemi ada yang jalan dan ada yang tidak.”
(Informan E)

“Iya, dengan menggunakan aplikasi JR-Ku maka PO Bus dapat melakukan pembayaran untuk premi IWKBU secara lebih mudah dan bisa dilakukan setiap saat tanpa ada batasa waktunya.” (Informan A)

“Iya, diterapkannya aplikasi JR-Ku disini dapat mempermudah pengolahan pendapatan sehingga tidak ada kecurangan dalam melakukan penyetoran pembayaran.” (Informan S)

Aplikasi JR-Ku resmi diterbitkan pada bulan Mei 2019 dan masa percobaan sampai dengan 2020, kehadiran aplikasi JR-Ku saat ini dinilai cukup optimal karena dapat melayani masyarakat secara digital, seperti pengajuan santunan secara online, selain itu aplikasi ini juga melayani pembayaran IWKBU untuk pemilik otobus, pengecekan masa berlaku SWDKLLJ, serta sejumlah fitur lain. Selain itu, lewat aplikasi ini masyarakat dapat melaporkan apabila ada kecelakaan alat angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Masyarakat juga bisa memberikan informasi daerah rawan kecelakaan agar pengguna lain dapat berhati-hati apabila melalui daerah tersebut. Dengan adanya aplikasi JR-Ku juga mempermudah untuk melakukan pembayaran dan lebih efisiensi waktu, tidak perlu susah payah keluar rumah pun tetap bisa membayar. Adanya aplikasi ini juga ketika ada masyarakat yang membayar pun langsung tersistem ke pusat, jadi juga mengurangi kecurangan dalam hal pendapatan ataupun penyetoran.

PEMBAHASAN

Sistem Kas Penerimaan Normal pada PT Jasa Raharja

Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti bahwa di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Madiun penerimaan kas berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) yang diperoleh dari wajib pajak yang membayar pajak setiap tahunnya di SAMSAT. Alur pembayaran SWDKLLJ dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan alur pembayaran IWKBU ada pada Gambar 3. Nominal yang harus ditanggung wajib pajak sudah diterteraan di STNK wajib pajak. Dalam sistem penerimaan kas di PT Jasa Raharja (Persero) cabang

Madiun terdapat fungsi yang terkait yaitu sebagai berikut : (1) Fungsi Penagihan, Di PT Jasa Raharja penagihan dilakukan di setiap SAMSAT di 7 wilayah yaitu wilayah Pacitan, Ponorogo, Madiun Kota, Madiun Kabupaten, Ngawi, Widodaren, dan Magetan. Kemudian pendapatan yang diperoleh langsung masuk ke bagian pendapatan di PT Jasa Raharja. Fungsi dari penagihan ini bertujuan agar masyarakat ketika membutuhkan sumbangan dari Jasa Raharja bisa mengeklamkan dana dan diberikan kepada masyarakat. (2) Fungsi Kas, Fungsi kas di PT Jasa Raharja untuk menerima pendapatan dari berbagai wilayah yang telah masuk dalam pembagaian wilayah yang telah ditentukan. (3) Fungsi Akuntansi, Fungsi akuntansi di PT Jasa Raharja yaitu untuk mencatat semua penerimaan kas dari berbagai wilayah yang telah ditentukan beserta bukti yang di bawa untuk membuat laporan keuangan. (4) Fungsi Dokumentasi/Arsip, Fungsi dokumentasi/arsip di PT Jasa Raharja yaitu untuk mengarsip dokumen dan laporan keuangan yang telah dibuat dari bagian kasir dan ditanda tangani oleh kepala perwakilan.

Dalam sistem penerimaan kas di PT Jasa Raharja (Persero) cabang Madiun dokumen yang digunakan yaitu : (1) Slip Tagihan, Slip tagihan ini berupa lembaran STNK dari wajib pajak, slip tagihan ini digunakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak agar masyarakat tau berapa jumlah tagihan yang harus dibayarkan. (2) Bukti Penerimaan Kas, Bukti penerimaan kas ini dibuat dengan memerlukan laporan harian penerimaan SWDKLLJ dan IWKBU dari pegawai SAMSAT, bukti setor bank, tanda terima uang dan cash register. (3) Kwitansi, Kwitansi dibuat dari bagian kasir untuk mencatat dan mencetak bukti penerimaan kas.

Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) cabang Madiun dalam sistem penerimaan kas yaitu: (1) Jurnal Penerimaan Kas, Pengelolaan jurnal penerimaan kas di PT Jasa Raharja dilakukan oleh bagian tehnik kemudian disetorkan pada bagian kasir untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai SAMSAT. (2) Jurnal Rekonsiliasi Bank, Dalam jurnal rekonsiliasi bank ini digunakan oleh pihak bagian teknik dan kasir untuk mencocokkan catatan perusahaan dengan catatan bank.(3) Kartu Piutang, Kartu piutang digunakan oleh bagian tehnik kemudian dilaporkan pada bagian kasir untuk mencatat berkurang atau bertambahnya piutang di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun. Jika wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pembayaran SWDKLLJ dan IWKBU maka PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun akan mengalami penurunan pendapatan. Maka ketika itu terjadi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun akan meminta bantuan dana ke PT. Jasa Raharja Pusat.

Unsur pengendalian internal yang sudah diterapkan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun yaitu: (1) Pencatatan dalam catatan akuntansi sudah diberlakukan di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Madiun, dengan adanya dokumen dan surat-surat yang valid dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. (2) Jumlah pendapatan yang diterim dari wajib pajak maupun PO Bus disetor seluruhnya ke bank pada setiap sore hari sebelum bank tutup. (3) Perhitungan saldo pendapatan yang ada di bagian kasir secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi internal.

Sistem Meminta Keringanan Melalui Aplikasi SIAP JR dan JR-Ku

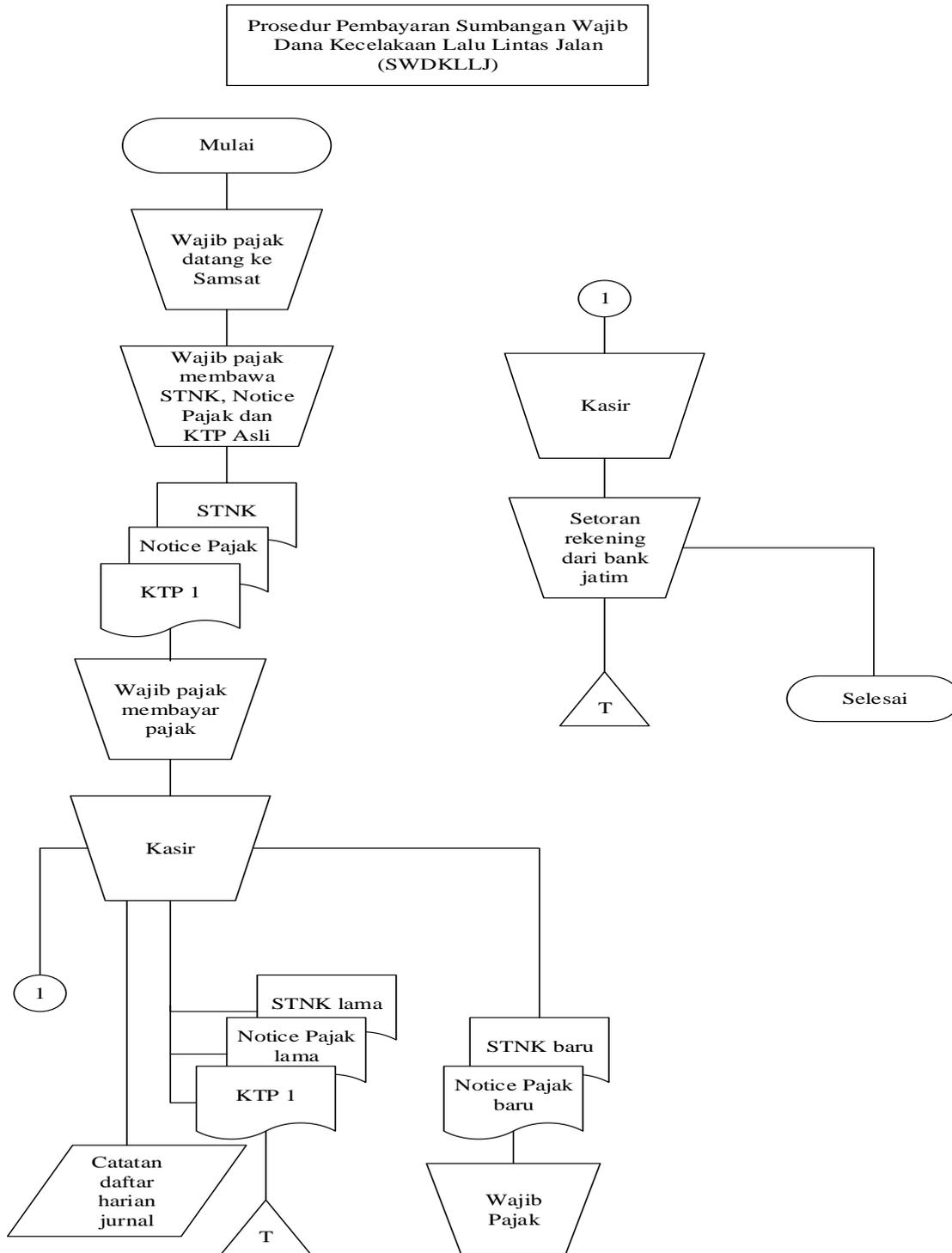
Dokumen yang di-*entry* pihak PO Bus melalui SIAP JR: (1) Disposisi, Disposisi adalah lembar yang dikeluarkan oleh PO Bus untuk permohonan penangguhan pembayaran IWKBU yang berisi tentang adanya dilakukan survei, data dan kelengkapan persyaratan, melakukan negoisasi, kemudian disetujui sebagai persyaratan di masa pandemi. (2) Surat keterangan meminta keringanan pembayaran IWKBU, Surat keterangan meminta keringanan pembayaran IWKBU dikeluarkan oleh pihak PO Bus sebagai pengajuan awal utuk mendapatkan keringanan membayar setengah dari pembayarn penuh. (3) Foto Kendaraan/ Bus, Foto kendaraan ini bertujuan untuk memberikan bukti bahwa selama masa pandemi Bus tidak bisa beroperasi. Jika ketiga dokumen itu sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIAP JR kemudian pihak PO Bus membayar melalui aplikasi JR-Ku.

Dokumen yang dicek pihak Jasa Raharja melalui aplikasi SIAP JR dan JR-Ku. (1) Disposisi, (2) Surat keterangan, (3) Foto kendaraan, (4) Pembayaran pajak dari pihak PO Bus. Setelah dokumen-dokumen itu lengkap dan sudah dicek bagian teknik maka diserahkan kepada kepala perwakilan untuk diotorisasi dan ditanda tangani dilembar surat keterangan meminta keringanan pembayaran IWKBU. Kemudian dokumen-dokumen pengajuan keringanan akan diotorisasi melewati sistem SIAP JR. Kemudian setelah semua dokumen-dokumen lengkap dan sudah diotorisasi dari kepala perwakilan maka kembali kebagian teknik untuk diarsipkan untuk membuktikan bahwa sudah pernah mengajukan surat keringanan pembayaran IWKBU. Alur pengajuan keringanan melalui aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.

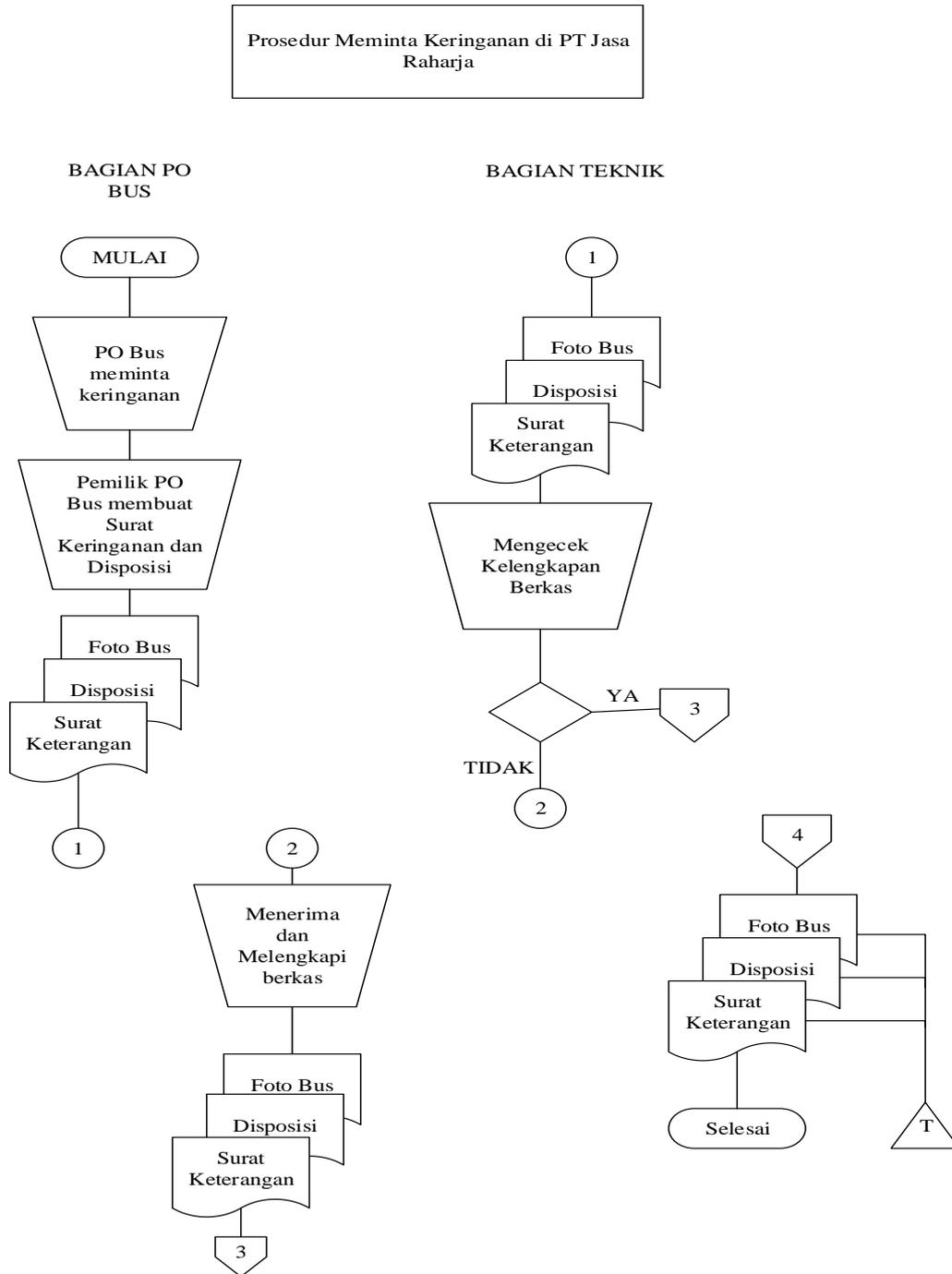
Perbedaan antara alur normal dengan aplikasi JR-Ku : (1) Alur normal mengharuskan pemilik PO Bus datang langsung ke SAMSAT untuk membayar IWKBU dengan membawa dokumen fisik atau *hardfile*, sedangkan melalui sistem aplikasi JR-Ku

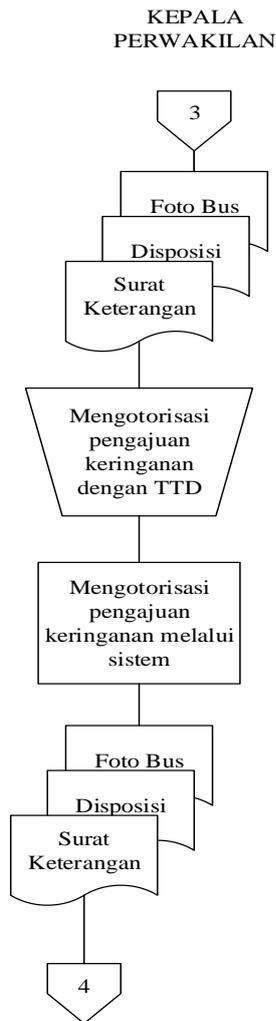
PO Bus dapat melakukan transaksi dari rumah melalui aplikasi dengan mengirimkan *softfile*. (2) Sebelum pandemi pihak Jasa Raharja mendatangi langsung ke lokasi pemilik PO Bus, sedangkan sesudah adanya aplikasi JR-Ku petugas dengan mudah memantau siapa yang menunggak karena dalam aplikasi tersebut menyertakan nomor telepon. Maka petugas dapat menindaklanjuti dengan cara menelepon langsung dengan pihak yang bersangkutan. Manfaat adanya aplikasi JR-ku, Adanya pandemi semua berdampak dan tidak beroperasi secara lancar, dengan diterapkan sistem aplikasi JR-Ku maka akan mempermudah pembayaran untuk pihak PO Bus dan angkutan umum. Maka mereka tidak perlu susah payah datang ke tempat untuk melakukan pembayaran, cukup dengan melalui aplikasi JR-Ku maka semua sudah bisa terproses cukup mudah dan tidak perlu keluar rumah. Begitupun dengan adanya sistem ini juga akan mudah dipantau dari kantor pusat sehingga tidak ada kecurangan yang dilakukan.

Gambar 2
Prosedur Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)



Gambar 4
Prosedur Meminta Keringanan di PT Jasa Raharja





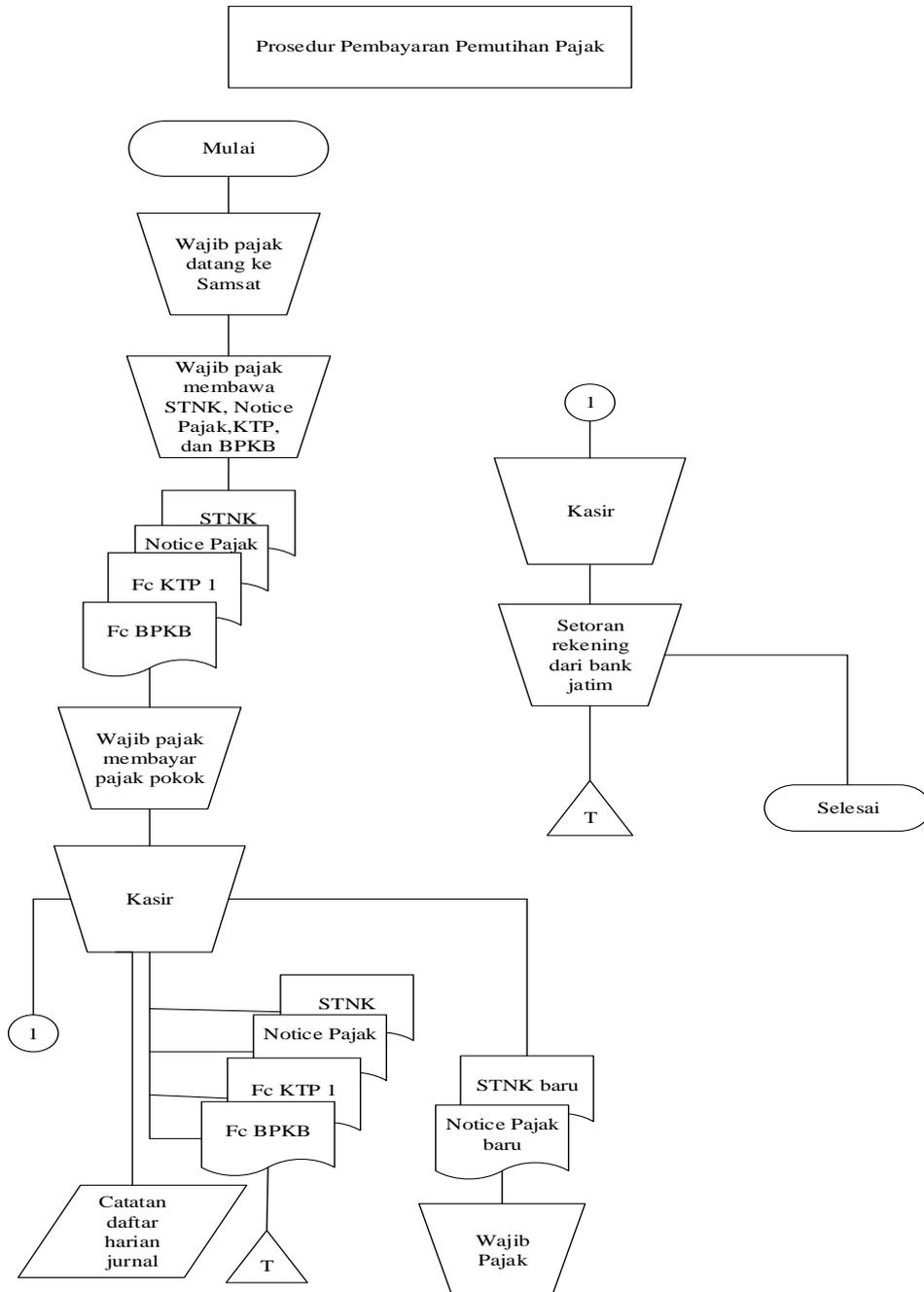
Sistem pemutihan selama pandemi untuk wajib pajak

Alur untuk sistem pemutihan selama pandemi untuk wajib pajak ada pada Gambar 5. Dokumen yang harus di bawa untuk mendapatkan pemutihan pajak adalah (1) STNK, STNK fotokopi digunakan sebagai syarat saat melakukan pembayaran pajak di SAMSAT, sedangkan STNK yang asli akan diminta oleh bagian kasir yang akan digunakan sebagai arsip, (2) KTP, KTP asli disertakan saat pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak kendaraan satu tahun maupun lima tahun, (3) BPKB, BPKB digunakan sebagai syarat melakukan pembayaran pajak, yang digunakan sebagai bukti pemilik kendaran bermotor. Jika ketiga dokumen itu sudah dimasukkan ke dalam map kemudian diserahkan ke kasir untuk membayar pajak.

Dokumen yang dicek oleh pihak SAMSAT, yaitu: (1) STNK, (2) KTP, (3) BPKB. Dokumen-dokumen yang sudah dicek dibagian kasir akan langsung diproses. Setelah pemrosesan, bagian kasir akan memberitahu jumlah pajak yang harus dibayarkan. Setelah melakukan pembayaran, kasir akan memunculkan STNK baru. Wajib pajak yang

ingin mendapatkan pemutihan hanya perlu membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat dan tidak memerlukan surat permohonan. Pemutihan pajak hanya berlaku untuk kendaraan bermotor dan mobil. Dalam sistem pemutihan, Jasa Raharja memiliki keterlibatan pada bagian administrasi. Apabila SAMSAT telah mengupload data pendapatan yang tersistem oleh Bapenda, dimana setiap pendapatan yang diterima dari pembayaran pajak akan dihitung oleh bagian kasir Bank Jatim dan bagian kasir Bapenda, sesuai dengan slip setor yang dibuat. Selanjutnya data itu akan ditarik oleh sistem Dasi JR untuk melihat pendapatan hari itu juga.

Gambar 5
Sistem Pemutihan Selama Pandemi untuk Wajib Pajak



Perbedaan antara alur normal dengan adanya sistem pemutihan, Sebelum adanya pandemi wajib pajak membayar pajak secara penuh, wajib pajak akan dikenakan denda jika telat membayar pajak sehingga besaran tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah sejumlah pokok pajak beserta dendanya. Sedangkan saat pandemi, diberlakukan sistem pemutihan selama 3 bulan. Dimana dengan adanya pemutihan pajak ini maka wajib pajak akan dibebaskan dari denda pajak dan hanya akan membayarkan sejumlah pokok pajak yang terutang.

KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa PT Jasa Raharja memiliki sistem pendapatan yang terdiri dari dua, yaitu pendapatan dari IWKBU dan SWDKLLJ. Sebelum adanya pandemi tidak diberlakukan pengajuan sistem keringanan untuk IWKBU karena pada saat sebelum adanya pandemi PO Bus dan angkutan umum dapat beroperasi dan pendapatan stabil sehingga bisa untuk membayar pajak, sedangkan untuk wajib pajak kendaraan bermotor dan mobil pribadi juga dapat membayar pajak tepat waktu dikarenakan masih bisa beroperasi dalam bekerja dan melakukan aktifitas diluar rumah. Pada saat pandemi covid-19 tahun 2020, IWKBU terdapat pengajuan keringanan dan SWDKLLJ diberlakukan sistem pemutihan. Sistem pengajuan keringanan IWKBU yaitu dengan cara mengirimkan dokumen soft file yang berisi dokumen surat keterangan, disposisi, dan foto kendaraan melalui aplikasi Siap JR dan pembayaran dilakukan melalui aplikasi JR-Ku.

Untuk wajib pajak yang ingin mendapatkan sistem pemutihan dokumen yang dibutuhkan dokumen fisik atau hard file sebagai prosedur yang harus dipenuhi yaitu STNK, Notice Pajak, KTP, BPKB dan pembayaran dilakukan dengan datang ke SAMSAT. Perbedaan dengan masa normal yaitu pada aspek pembayaran. Sedangkan perbedaan untuk sistem pemutihan SWDKLLJ dengan masa normal yaitu pada aspek besaran tarif yang harus dibayar. Keunggulan dari sistem pengajuan keringanan IWKBU adalah dapat mempermudah pembayaran untuk pihak PO Bus dan angkutan umum, dimana saat ingin melakukan pembayaran tidak harus bersusah payah datang ke tempat untuk melakukan pembayaran. Cukup dengan melalui aplikasi JR-Ku maka semua sudah bisa diproses selain itu sistem JR Ku yang sederhana, cepat, tepat dan mudah. Sedangkan sistem pemutihan SWDKLLJ adalah wajib pajak akan mendapat keringanan pada saat membayar pajak dimana pembayaran hanya membayarkan pokok pajak tanpa membayar denda, hal ini dikarenakan pada masa pandemi perekonomian masyarakat tidak normal.

Keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti tidak bisa secara langsung mewancarai pemilik PO Bus untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan untuk meminta keringanan pembayaran IWKBU pada masa pandemi.

Saran kepada pihak Jasa Raharja adalah sebaiknya sistem aplikasi JR-Ku tetap diberlakukan dan terus ditingkatkan, mengingat pandemi masih terus berlangsung. Selain itu aplikasi ini dapat mempermudah dan lebih efisien waktu pada saat melakukan pembayaran IWKBU. Untuk peneliti selanjutnya karena adanya keterbatasan peneliti

dalam melakukan wawancara kepada pemilik PO Bus diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik PO Bus.

REFERENSI

- Respati, A. (2019). Jasa Raharja Gencar Lakukan Inovasi Digital, ini Alasannya. Retrieved Sept 04, 2019, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/jasa-raharjo-gencar-lakukan-inovasi-digital-ini-alasannya/?page=2>
- Arianita, L. (2016). Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT. Epsilon Bantam. *Measuremen*, 3(2), 98–113.
- Bimantara, Zeska, A., & Dwiatmanto. (2017). Analisis Pengendalian Intern Dalam Sistem Akuntansi Pasien Umum (Studi Pada Rumah Sakit Ibnu Sina Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 45(1), 203–209. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1775/2147>
- Fauzi, A. (2018). Pengaruh Pendapatan Premi Asuransi Dan Hubungannya Dengan Beban Klaim Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Jasa Raharja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, IV(1), 164–180. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/5676/4940>
- Fitriani, A., & Rosdiana, W. (2018). Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah Tahun 2017 Di Kabupaten Mojokerto (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 Di Kecamatan Kranggan). *Publika*, 6(8), 1–7.
- Kandouw, V. (2013). Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Pada P.T Catur Sentosa Adiprana Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 433–442. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2058>
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Putri, S. E. (2015). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Bogor. *Jurnal Akuinida*, 2(1), 27–42.
- Retno. (2020). Jasa Raharja:Asuransi Perlu Adopsi Teknologi Digital. Retrieved Sept 09, 2020, from <https://republika.co.id/berita/qgchw7370/jasa-raharjo-asuransi-perlu-adopsi-teknologi-digitalc>
- Riftiasari, D., & Sugiarti, S. (2020). Analisis Faktor Mempengaruhi Laba Bersih Perusahaan Asuransi Pt Jasa Raharja (Persero). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 37–46. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.79>
- Sastri, I. A. I. P., Sujana, E., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta
- Suratno, Margono, & Puspaningrum. A. (2016). Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Value, Trust Dan Loyalitas Pengguna Jasa PT. Jasa Raharja (Persero) Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 40-35.
- Sugiastuti, R.H, Dzulkirom, M, dan Dwiatmamto. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pembayaran Klaim Kecelakaan Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Intern (Studi Kasus pada PT.Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 13(1), 1–10.

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dewi Nasiroh, Nyimas Wardatul Afiqoh
Universitas Muhammadiyah Gresik
dewinasiroh20@gmail.com

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1232

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	01 September, 2022
Tanggal Revisi	20 November, 2022
Tanggal diterima	01 Desember. 2022

Keywords:

*Tax Knowledge,
Tax Awareness,
Tax Sanctions,
Tax Compliance*

Abstract:

This study aims to know the extent of the influence of tax knowledge, tax awareness, and tax sanctions in increasing the compliance of individual taxpayers. This research uses quantitative research methods. The data was obtained through the distribution of questionnaires by applying the accidental sampling technique. Respondents in this study amounted to 98 people who are individual taxpayers. The questionnaire was processed using the IBM SPSS Statistics 22 application at a significance value of 5% or 0,05. The results of the study show that tax knowledge did not have a positive effect on individual taxpayer compliance. This is caused by the low knowledge of taxpayers, thus making taxpayers less motivated to carry out their tax obligations. Meanwhile, tax awareness and tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Pengetahuan
Perpajakan,
Kesadaran
Perpajakan,
Sanksi
Perpajakan,
Kepatuhan
Perpajakan

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Data didapat melalui penyebaran kuesioner dengan mengaplikasikan teknik *accidental sampling*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 orang yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kuesioner diolah dengan memanfaatkan aplikasi IBM SPSS Statistics 22 pada nilai signifikansi 5% atau 0,05. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, sehingga menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan salah satu pemasukan tertinggi bagi negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Partisipasi antara kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemerintah menjadi peran penting dalam perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pembayaran kewajiban perpajakan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan benar (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018). Wajib pajak yang tunduk berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh (Suryanti & Sari, 2018).

Namun kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan serta penerapan sanksi yang kurang tegas (Widiantari, dkk. 2021). Selain itu, fenomena lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya seperti mendaftarkan diri, menghitung pajak, membayar atau penyetoran pajak, dan melaporkan SPT. Sehingga, penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan harapan hasil penelitiannya mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam meningkatkan taraf kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan acuan utama bagi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya (Zakya, 2014:32). Suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk meningkatkan pengetahuan secara mendalam dengan harapan dapat mengukur kebenaran akan sebuah persoalan yang terjadi. Wajib pajak yang menguasai pengetahuan perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak tersebut (Suryanti & Sari, 2018).

Menurut Rosyida (2018) suatu kesadaran mampu dinilai pada keseriusan serta kemauan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku ingin memahami dan menunaikan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2012:7 dalam Ramdani,

dkk. 2019). Kesadaran perpajakan akan meningkat ketika masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pajak (Rizki & Saleh, 2018). Penilaian positif yang dimaksud adalah timbulnya kesadaran wajib pajak akan sarana yang telah diberikan oleh pemerintah dan dapat dinikmati secara tidak langsung.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya melibatkan faktor pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan, tetapi juga perlu adanya penerapan sanksi perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau asas perpajakan yang akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan istilah lain, sanksi perpajakan yakni sarana untuk penghindaran wajib pajak supaya tidak menyimpang dari kaidah perpajakan. Sanksi perpajakan diberlakukan pada dasarnya untuk mencegah penyimpangan dan membangun kepatuhan wajib pajak dalam proses pelaksanaan kewajibannya.

Teori yang mendasari dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* atau TPB. Teori ini mendeskripsikan perilaku pada diri seseorang atau individu. Kunci terpenting dalam TPB yakni *intention* atau niat individu guna melaksanakan perilaku tertentu. Dalam hal ini, individu yang dimaksud yaitu wajib pajak. Untuk menentukan perilaku individu tersebut TPB memiliki 3 (tiga) ciri diantaranya: Pertama, *Behavioral Beliefs* adalah keyakinan seseorang atau individu terkait hasil dan penilaian atas tindakan yang dilakukan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya tentu mempunyai keyakinan terkait hasil dari tindakan tersebut. Dengan ini, *behavioral beliefs* memiliki keterkaitan dengan kesadaran perpajakan.

Kedua, *Normative Beliefs* adalah keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Faktor ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang luas akan berdampak pada keyakinan wajib pajak dalam menentukan perilaku yang tunduk terhadap pajak. Ketiga, *Control Beliefs* adalah keyakinan mengenai eksistensi faktor yang mendukung maupun menghalangi dari tindakan yang ditunjukkan serta persepsi dari faktor tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diamati berdasar persepsi wajib pajak perihal seberapa kuat sanksi perpajakan tersebut akan berpengaruh.

Terdapat sebagian peneliti yang juga melakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan variabel sama maupun berbeda. Menurut Anggarini, dkk (2019) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan pada penelitian Muhamad, dkk (2019) hasilnya membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, Ermawati (2018) juga menunjukkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putri & Agustin (2018) hasilnya membuktikan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

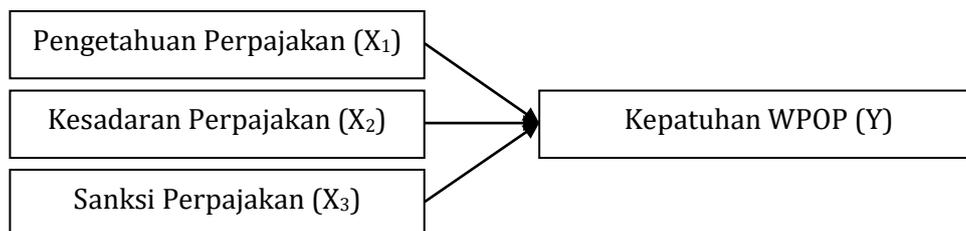
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melangsungkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Berikut adalah kerangka penelitian yang memperlihatkan bahwasanya pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan ditaksir memiliki hubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan ini, penulis mencetuskan beberapa hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₂: Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₃: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Gambar 1
Kerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif yang berwujud hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Populasi penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Gresik, yaitu KPP Pratama Gresik dan KPP Madya Gresik. Penentuan sampel penelitian ini adalah dengan teknik *Accidental Sampling* atau

bersifat kebetulan. Siapa saja yang kebetulan berpapasan dengan peneliti serta dinilai sesuai kriteria, maka dapat dipergunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013:85).

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2013) kriteria penentuan sampel yang memadai dalam sebuah penelitian adalah sekitar 30 sampai dengan 500. Dengan ini, peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Kualifikasi sampel untuk penelitian ini yaitu WPOP yang tercatat pada KPP di Kabupaten Gresik dan telah memiliki NPWP sebagai karyawan swasta dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun. Jenis dan sumber datanya berupa data primer dengan penyebaran kuesioner skala *likert* 1-5. Berikut adalah pengukuran indikator untuk variabel dependen dan independen:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
 - a. Kepatuhan saat pemberian data;
 - b. Kepatuhan saat pembayaran pajak; dan
 - c. Kepatuhan saat melaporkan SPT;
2. Pengetahuan Perpajakan (X_1)
 - a. Pengetahuan akan fungsi pajak;
 - b. Pengetahuan akan peraturan perpajakan; dan
 - c. Pengetahuan akan tarif dan tata cara pelaporan pajak.
3. Kesadaran Perpajakan (X_2)
 - a. Sadar bahwasanya pajak merupakan penunjang pembangunan negara;
 - b. Sadar bahwasanya pajak ditetapkan berdasarkan kebijakan; dan
 - c. Sadar bahwasanya pajak adalah sebuah kewajiban.
4. Sanksi Perpajakan (X_3)
 - a. Sanksi yang diberikan harus jelas dan tegas;
 - b. Sanksi yang diberikan tidak mengenal toleransi; dan
 - c. Sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Bersumber pada Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif, dapat disimpulkan bahwasanya responden yang mengisi kuesioner dan sesuai dengan kualifikasi atau kriteria adalah sebanyak 98 responden.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif					
Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Standar Deviasi
Valid N (listwise)	98	-	-	-	-
Pengetahuan Perpajakan	98	1	5	4,33	0,771
Kesadaran Perpajakan	98	1	5	4,33	0,791
Sanksi Perpajakan	98	1	5	4,13	1,068
Kepatuhan WPOP	98	1	5	4,41	0,726

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas diterapkan guna mengukur valid atau tidaknya butir pernyataan dalam suatu kuesioner. Suatu variabel dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai signifikan $< 0,05$ (Ghozali, 2018:52). Dalam penelitian ini, semua butir pernyataan untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1), Kesadaran Perpajakan (X_2), Sanksi Perpajakan (X_3), dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} , sehingga dapat ditetapkan seluruh variabel dinyatakan valid.

Uji reliabilitas diterapkan guna mengukur suatu kuesioner yang menjadi bagian indikator dari variabel. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* yang dimiliki $> 0,70$ (Ghozali, 2018:46).

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Ket.
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,757	0,70	Reliabel
Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,802	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,880	0,70	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,765	0,70	Reliabel

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan guna memperlihatkan hubungan linear yang ada antara variabel independen atau bebas. Uji multikolinearitas diukur berdasarkan *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* yang dimiliki $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10,0$ maka tidak timbul multikolinearitas. Hasil pengolahan data yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan bahwasanya nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,0 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya model regresi tidak timbul masalah multikolinearitas. Berikut adalah tabel hasil uji multikolinearitas:

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

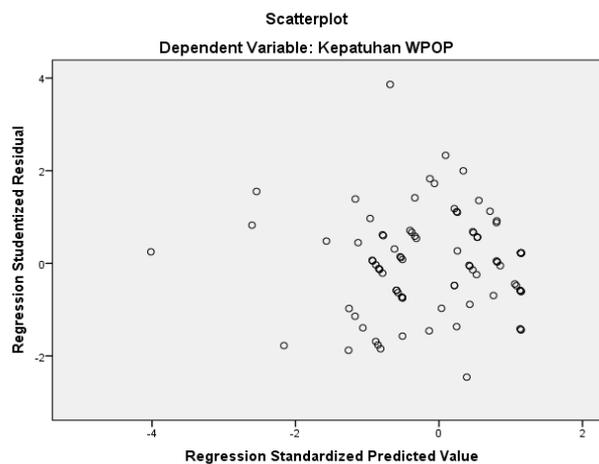
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,345	2,894
Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,373	2,682
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,376	2,657

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas diterapkan guna memeriksa timbulnya ketidaksamaan varian maupun residual dari satu observasi ke observasi lain (Ghozali, 2018:137). Salah satu cara untuk memeriksa ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melalui grafik *Scatterplot*.

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwasanya tidak ditemukan pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar hingga menyempit) dan titik-titik tersebar baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga tidak timbul heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas diterapkan guna memeriksa terjadinya distribusi normal atau tidak pada variabel dependen serta independen pada model regresi. Pengujian normalitas dalam penelitian ini diukur dengan mengaplikasikan Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Seandainya nilai signifikan yang dimiliki $> 0,05$ maka ditetapkan berdistribusi normal.

Tabel 4
Uji Normalitas

Keterangan	<i>Unstandardized Residual</i>
N	98
Test Statistics	0,084
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,082

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Bersumber pada Tabel 4 diatas, menunjukkan bahwasanya nilai signifikansi yang dimiliki adalah sebesar 0,082 atau lebih besar dari 0,05 sehingga data ditetapkan berdistribusi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda diterapkan guna mengetahui pengaruh antara satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama maupun parsial. Hasil pengujian regresi linear berganda pada ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat dibuktikan pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	5,587	1,064	0,000
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,024	0,076	0,748
Kesadaran Perpajakan (X_2)	0,644	0,068	0,000
Sanksi Perpajakan (X_3)	0,098	0,045	0,034

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

1. Bersumber dari persamaan regresi diatas, diperoleh nilai konstanta sebesar 5,587 yang berarti apabila variabel bebas nilainya konstan atau tetap, maka nilai kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 5,587.
2. Nilai koefisien dari Pengetahuan Perpajakan (X_1) pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni sejumlah 0,024.
3. Nilai koefisien dari Kesadaran Perpajakan (X_2) pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni sejumlah 0,644.
4. Nilai koefisien dari Sanksi Perpajakan (X_3) pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni sejumlah 0,098.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) diterapkan guna mengetahui kapasitas sebuah model dalam menerangkan beberapa variabel dependen atau terikat. Rentang nilai untuk koefisien determinasi yakni 0 (nol) hingga 1 (satu).

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,888	0,788	0,782

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Bersumber pada Tabel 6 di atas, koefisien *adjusted R²* adalah sejumlah 0,782 dimana menandakan bahwa 78,2% pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan untuk 21,8% dijabarkan variabel lain yang tidak diuji pada penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini diterapkan guna mengetahui apakah variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut adalah hasil pengujian simultan (uji F):

Tabel 7
Uji Simultan (Uji F)

Model	F	Sig.
Regression	116,693	0,000

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Bersumber pada Tabel 7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 116,693. Sedangkan untuk F_{tabel} dengan signifikansi 0,05 yakni sejumlah 2,47. Dengan begitu, nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($116,693 > 2,47$) dan dapat ditetapkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Parsial (Uji T)

Pengujian ini diterapkan guna memeriksa pengaruh dari setiap variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat.

Tabel 8
Uji Parsial (Uji T)

Model	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.
Pengetahuan Perpajakan (X_1)	0,322	1,660	0,748
Kesadaran Perpajakan (X_2)	9,508	1,660	0,000
Sanksi Perpajakan (X_3)	2,148	1,660	0,034

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2022

Kriteria pada pengujian parsial atau uji T adalah apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada nilai signifikan $< 0,05$, maka H_1 diterima. Bersumber pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X_1) mempunyai nilai t_{hitung} sejumlah 0,322 ($< 1,660$) pada taraf signifikansi sebesar 0,748 ($> 0,05$), sehingga H_1 ditolak yang artinya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sedangkan untuk variabel kesadaran perpajakan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 9,508 ($> 1,660$) pada taraf signifikansi sejumlah 0,000 ($< 0,05$), sehingga H_2 diterima yang artinya kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian untuk variabel sanksi perpajakan (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sejumlah 2,148 ($> 1,660$) pada taraf signifikansi sejumlah 0,034 ($< 0,05$), maka H_3 diterima yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,322 ($< 1,660$) dan signifikansi sebesar 0,748 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Rosyida (2018) pengetahuan perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak yang memiliki ilmu dan paham akan kewajibannya saja yang akan berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Salah satu faktor dalam TPB yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah *Normative Beliefs*. Faktor tersebut menjabarkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut. Namun, dari

hasil yang diperoleh dalam penelitian adalah wajib pajak tidak taat terhadap pajak yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak. Sehingga hal ini menjadikan wajib pajak kurang termotivasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya 85 dari 98 wajib pajak merupakan lulusan SMA. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan juga turut serta dalam ketaatan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini, dkk (2019) dan Ermawati (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Agustin (2018) yang mana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian variabel kesadaran perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 9,508 ($> 1,660$) dan signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kesadaran perpajakan merupakan sikap wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya dengan tidak ada paksaan dan secara sadar bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban (Ermawati, 2018). *Behavioral Beliefs* merupakan keyakinan seseorang atau individu akan hasil dari suatu tindakan dan penilaian atas hasil tersebut. Faktor ini memiliki keterkaitan dengan kesadaran perpajakan. Wajib pajak sebelum melakukan kewajibannya, tentu mempunyai keyakinan mengenai hasil yang diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya, memiliki keyakinan bahwa dengan membayar pajak dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini, dkk (2019), Muhamad, dkk (2019) serta Ermawati (2018) yang menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil pengujian variabel sanksi perpajakan memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 2,148 ($> 1,660$) dan signifikansi sebesar 0,034 ($< 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat sanksi yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah tanggungan akan ketetapan undang-undang perpajakan atau norma perpajakan yang akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. *Control Beliefs* merupakan keyakinan mengenai eksistensi faktor yang mendukung atau menghalangi perilaku yang ditampilkan serta persepsi tentang seberapa kuat faktor yang mendukung dan menghalangi perilakunya tersebut (*preceived power*). Hal ini berkaitan erat dengan sanksi perpajakan yang dibuat untuk mendukung serta mendorong agar wajib pajak mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi perpajakan akan berpengaruh atau mampu mendukung perilaku wajib pajak agar taat pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggarini, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad, dkk (2019) beserta Putri & Agustin (2018) yang mana sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Kedua, kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan Ketiga, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peneliti turut memberi masukan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel seperti sosialisasi perpajakan yang dikira mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

REFERENSI

- Anggarini, L. P. I., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 9(1), 48–61.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 106–122.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi* (XVII). Andi Offset.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 1–9.
- Ramdani, R. F., Faridah, E., & Badriah, E. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Akuntapedia*, 1(1), 72–95.
- Rizki, N., & Saleh, M. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh Tahun 2012-2015). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 416–430.
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, dan Pengetahuan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, 1(1), 29–43.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *Jurnal Ilmu Akuntansi (AKUNNAS)*, 16(2), 14–26.
- Widiantari, P. A., Mahaputra, I. N. K. A., & Ardianti, P. N. H. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(3), 221–229.
- Zakya, I. (2014). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Alaf Riau.

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN, DAN MOTIVASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Rizma Nadiyah Safitri, Nyimas Wardatul Afiqoh

Universitas Muhammadiyah Gresik

rizmanadyhh@gmail.com

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1233

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	17 Agustus, 2022
Tanggal Revisi	01 Desember, 2022
Tanggal diterima	12 Desember. 2022

Keywords:

*Tax Knowledge,
System
Effectiveness,
Tax Motivation*

Abstract:

The purpose of this study is to examine the effect of tax knowledge, system effectiveness and tax motivation on individual taxpayer compliance. The population in this study are all individual taxpayers registered at KPP Pratama Gresik. The sampling technique used in this research is accidental sampling. Data collection used a questionnaire. This research uses Multiple Linear Regression Analysis technique. Based on the results of the analysis, it can be concluded that tax knowledge has no effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the effectiveness of the taxation system and tax motivation have a positive effect on individual taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Pengetahuan
Perpajakan,
Efektivitas
Sistem, Motivasi
Pajak

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem dan Motivasi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Adapun Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Accidental Sampling. Pengumpulan data yang digunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sedangkan pada Efektivitas sistem perpajakan dan Motivasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak memegang kontribusi yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara terutama Kelangsungan bagi sistem pemerintahan, karena pajak sebagai pendapatan

terbesar negara. Penerimaan pajak ini digunakan pemerintah untuk pembiayaan segala bentuk kebutuhan negara setiap kebutuhan pemerintah seperti pembiayaan dan pengeluaran pembangunan (Rika, 2021). Penerimaan yang diperoleh dari pajak dapat ditingkatkan melalui kepatuhan Wajib Pajak. Apabila kepatuhan perpajakan dengan kondisi yang tinggi, maka diharapkan dapat menunjang sektor pendapatan negara agar dapat difungsikan sebagai penopang infrastruktur ataupun kesejahteraan masyarakat lainnya (Ananda, 2015).

Fenomena yang dapat dijumpai dan mengakibatkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dilihat saat ini yaitu kurangnya pengetahuan perpajakan, Wajib Pajak belum mengerti tentang sistem perpajakan dan banyaknya persepsi publik yang negatif perihal pajak (Amelia & Lailatul, 2020). Hal tersebut membuat orang ragu untuk membayar pajaknya dan melakukan penghindaran karena takut pembayaran pajak akan disalahgunakan oleh pejabat yang berwenang. Dengan rendahnya perihal kepatuhan Wajib Pajak tersebut membuat prosentase pencapaian pajak tidak memenuhi target yang akan dicapai (Afifah, 2021).

Pengetahuan mengenai perpajakan dapat diartikan ketika 1) Wajib Pajak mengetahui semua peraturan yang terkait dengan kewajiban perpajakan 2) Memahami fungsi pajak bagi pemerintah dan masyarakat (Amelia & Lailatul, 2020). Efektivitas sistem perpajakan adalah ukuran seberapa tujuan sistem telah tercapai (kualitas, kuantitas dan waktu). Sistem perpajakan yang digunakan saat ini seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-NPWP*, *e-Registrasion*, *e-Billing* yang memberikan fasilitas kemudahan terhadap pembayaran dan pelaporan perpajakan. Hal ini tentunya memberikan tanggapan dan citra perpajakan baik (Kurniawati, dkk 2017).

Motivasi pajak adalah kemampuan potensial yang berasal dari Wajib Pajak yang mampu melatarbelakangi pembayaran pajak dengan secara sukarela (Setiyani dkk, 2018). (Ginting dkk, 2017) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi petugas pajak wajib menyampaikan penjabaran secara konkret mengenai manfaat pajak serta menumbuhkan kesadaran pajak yang digunakan sebagai kemakmuran rakyat agar menumbuhkan motivasi sehingga kepatuhan dari Wajib Pajak dapat dijalankan dengan baik.

Pada penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan penelitian terhadap pengujian variabel pengetahuan perpajakan dan motivasi perpajakan. Menurut penelitian (Amelia dan Lailatul, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbeda dengan penelitian (Ningsih Ernawati, 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian (Setiyani dkk, 2018) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi, sedangkan pada penelitian Ginting, dkk (2017) menyebutkan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi. Karena perbedaan dalam penelitian tersebut peneliti termotivasi untuk meneliti kembali mengenai pengetahuan dan motivasi Wajib Pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa aspek yang berkenaan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Pada variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, efektivitas sistem perpajakan dan motivasi pajak dan variabel dependen yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian pada penelitian ini sampel yang digunakan diperoleh dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar pada KPP Pratama Gresik dan telah bekerja minimal satu tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut : (H1) Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?. (H2) Apakah Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?. (H3) Apakah Motivasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?. Berdasarkan hipotesis dan latar belakang diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Untuk mengetahui Apakah Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Untuk mengetahui Apakah Motivasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berupa angka angka untuk dianalisis menggunakan analisis statistik (Sugiyono, 2013) . Penggunaan pendekatan penelitian ini hubungan kausal. Penelitian ini memakai jenis data subjek. Penelitian ini memerlukan sumber data berupa data primer. Sumber data untuk penelitian ini didapat secara langsung dari jawaban atas kuesioner yang telah dibagi kepada responden, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Gresik mempunyai NPWP dan telah bekerja minimal lebih dari satu tahun.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini menggunakan berupa semua Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada pada KPP Pratama Gresik. Sampel yang digunakan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di KPP Pratama Gresik mempunyai NPWP dan telah bekerja minimal lebih dari satu tahun. Dalam hal ini, sampel yang diperoleh ditentukan dengan metode *accidental sampling*, yaitu pengambilan sampel didasarkan sepenuhnya pada kebetulan, yaitu setiap orang yang bertemu dengan peneliti dapat digunakan sampel bila dilihat orang yang bertemu tersebut cocok digunakan sebagai sumber data (Sugiyono, 2013) dan untuk jumlah responden digunakan sebanyak 95 responden.

Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang didapat dalam penelitian ini berbentuk kuesioner. Kuesioner adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang tertuju kepada responden dan wajib dijawab (Sugiyono, 2013) Pengukuran pada penelitian ini memakai skala likert 1-5 poin dan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1
Pengukuran Variabel

No	Kategori Jawaban	Interval
1.	SS = Sangat Setuju	5
2.	S = Setuju	4
3.	N = Netral	3
4.	TS = Tidak Setuju	2
5.	STS = Sangat Tidak Setuju	1

HASIL PENELITIAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	95	1,00	5,00	4,0252	0,64619

Efektivitas Sistem Perpajakan	95	3,00	5,00	4,2063	0,56285
Motivasi Pajak	95	2,00	5,00	4,2105	0,56408
Kepatuhan Wajib Pajak	95	3,00	5,00	4,1596	0,47886
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Hasil data diolah (2022)

Menurut tabel 2 dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 95 responden.

Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas merupakan uji yang bertujuan mengetahui tingkat kevalidan dari kuisisioner serta mampu mengungkap sesuatu yang diukur dari kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Pada penelitian diperoleh bahwa keseluruhan dari indikator variabel pengetahuan pajak (X1), efektivitas sistem perpajakan (X2) dan motivasi pajak (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) mempunyai nilai sig $< 0,05$ dan nilai $r_{Hitung} >$ daripada r_{Tabel} maka dapat dikatakan keseluruhan dari indikator dinyatakan valid serta dapat dianalisis lebih dalam.

Uji reabilitas merupakan alat uji yang bertujuan memastikan jawaban dari responden dapat dipercaya atau diandalkan (Ghozali, 2018). Reabilitas dari tiap butir pertanyaan diuji menggunakan cronbach alpha dimana ditetapkan sebesar $> 0,7$ maka dinyatakan reliabel.

Tabel 3
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Alpha	Kesimpulan
Pengetahuan Pajak	0,701	0,7	Reliabel
Efektivitas Sistem	0,787	0,7	Reliabel
Motivasi Pajak	0,700	0,7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,708	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil data diolah (2022)

Data tabel 3 diatas diperoleh hasil uji reabilitas pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem pajak dan motivasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak semua mempunyai Cronbach Alpha $> 0,7$ hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen pada penelitian ini artinya reliabel serta layak digunakan.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui sebuah data variabel indepen dan variabel dependen pada model regresi berdistribus normal atau tidak. Dalam pengujian normalitas dilakukan dengan uji normalitas kolmogrov Smirnov. Sebuah data dikatakan normal apabila nilai signifikasi atau probabilitas $>0,05$.

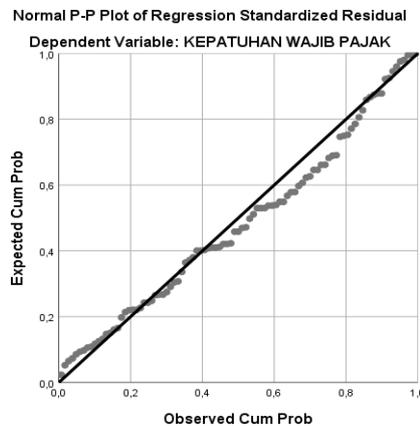
Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		95
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,41043626
Most Extreme Differences	Absolute	0,085
	Positive	0,085
	Negative	-0,041
Test Statistic		0,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,085 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Hasil data olahan (2022)

Berdasarkan hasil data diatas didapat nilai signifikasi $> 0,05$ yaitu 0,085 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual tersebut berdistribusi normal. Adapun hasil pada Sedangkan grafik normal probability plot of standarized residual sebagai berikut:

Gambar 1
grafik normal probability plot



Berdasarkan pada data grafik tersebut menunjukkan bahwa sebaran data tersebar merata pada diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa hubungan linear pada model variabel independen. Gejala multikolinearitas dapat diamati melalui 1) Korelasi melalui pada nilai VIF jika nilai VIF <10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. 2) Sedangkan jika nilai tolerance daripada >0,1 maka terdapat gejala multikolinearitas.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients		
Model	Collienarity Statistic	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pengetahuan perpajakan	0,858	1,166
Evektivitas Sistem Pajak	0,915	1,092
Motivasi Pajak	0,822	1,216

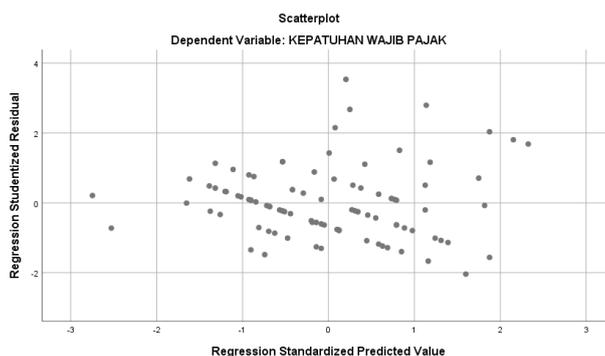
Sumber: Hasil data olahan (2022)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel independen terhadap model regresi yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pola regresi terjadi Ketidakseragaman varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara memeperkirakan gejala heteroskedastisitas pada sebuah pola regresi dapat diamati dari pola gambar scatterplot tersebut.

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas



Tidak ada heterokedastisitas bila ditemukan tidak ada pola yang jelas (bergelombang,melebar kemudia menyempit) pada gambar scatterplot, serta titik titik menyebar diatas serta dibawah 0 pada sumbu Y. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa data menyebar diatas dan dibawah angka 0 yang terletak pada sumbu Y dan tidak ditemukan suatu pola yang jelas maka dapat diperoleh kesimpulan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menentukan arah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan apakah masing masing variabel independen mempunyai hubungan positif atau negatif.

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,115	2,151		3,773	0,000
	Pengetahuan Pajak	0,109	0,073	0,129	1,487	0,140
	Efektivitas Sistem	0,354	0,075	0,398	4,736	0,000
	Motivasi Pajak	0,286	0,076	0,335	3,777	0,000
A. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Hasil data olahan (2022)

1. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 8,115. Kosntanta positif dapat diartikan apabila semua variabel independen menunjukkan pengaruh yang searah bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka jumlah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gresik nilainya sebesar 8,115.
2. Nilai koefisien pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai 0,109 koefisien bernilai positif, sehingga pengetahuan perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Searah.
3. Nilai koefisien efektivitas sistem perpajakan (X2) memiliki nilai 0,354 koefisien bernilai positif, sehingga efektivitas sistem perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Searah.
4. Nilai koefisien motivasi pajak (X3) memiliki nilai 0,286 koefisien bernilai positif, sehingga motivasi pajak dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Searah.

Uji T Parsial

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dimana hipotesis diterima jika nilai signifikansi $t < 0,05$ dan jika signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Tabel 7
Hasil Uji T

No	Variabel	Signifikasi	A	t Hitung	t Tabel
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	0,140	0,05	1,487	1,661
2.	Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)	0,000	0,05	4,736	1,661
3.	Motivasi Pajak (X3)	0,000	0,05	3,777	1,661

Sumber: Hasil data olahan (2022)

Berdasarkan tabel 7 diperoleh hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) memiliki nilai signifikansi 0,140. Karena tingkat signifikansi variabel pengetahuan perpajakan lebih besar dari 0,05 ($0,140 > 0,05$) dan t hitung sebesar 1,487 yang lebih kecil dari t tabel 1,661 ($1,487 < 1,661$) maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.
2. Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel efektivitas sistem perpajakan (X2) memiliki nilai signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi variabel efektivitas sistem perpajakan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung sebesar 4,876 yang lebih besar dari t tabel 1,661 ($4,876 > 1,661$) maka dapat disimpulkan H_2 diterima.
3. Motivasi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel motivasi pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi variabel motivasi pajak lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan t hitung sebesar 3,777 yang lebih besar dari t tabel 1,661 ($3,777 > 1,661$) maka dapat disimpulkan H_3 diterima.

Uji F Simultan

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan pengaruh semua variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130,835	3	43,612	21,223	,000 ^b
	Residual	186,997	91	2,055		
	Total	317,832	94			

Sumber: Hasil data olahan (2022)

Pada tabel8 tersebut dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang dimiliki sebesar 0,000 yang < dari 0,05. Maka dapat diperoleh kesimpulan variabel independen yaitu pengetahuan pajak (X1), efektivitas sistem perpajakan (X2) dan motivasi pajak (X3) secara bersama sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi merupakan nilai yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun kriteria pengujian apabila R² mendekati 1 (semakin tinggi nilai R²) maka dikatakan semakin kuat kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,642 ^a	0,412	0,392	1,43350	1,848

Sumber: Hasil data olahan (2022)

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh bahwa pada R *square* adalah sebesar 0,412 hal ini menunjukkan 41% kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan dan motivasi pajak dan sisanya sebesar 59% dipengaruhi oleh faktor faktor lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat pendidikan yang dimiliki responden pada penelitian ini yaitu wajib pajak didominasi pendidikan terakhir SMA sebanyak 76% hal tersebut membuat pengetahuan yang dimiliki masih rendah. Rendahnya pengetahuan membuat Wajib Pajak belum memahami informasi terkait fungsi dan tata cara dalam hal perpajakan. Ketidapahaman informasi terkait perpajakan yang membentuk Wajib Pajak tidak menjalankan tanggung jawab perpajakannya dan tidak memahami sanksi yang akan diterima. Hal tersebut yang menyebabkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut (Amelia Desyanti & Lailatul Amanah, 2020) dalam peningkatan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penyempurnaan dalam proses sistem administrasi yang digunakan dalam pelayanan perpajakan. Adanya sistem yang saat ini digunakan seperti *e-registration*, *e-Filing* dan *e-Billing* yang efektif, efisien yang memudahkan Wajib Pajak dalam mengemat biaya dan menghemat waktu akan memberikan persepsi baik pada Wajib Pajak.

Dikaitkan dengan Prinsip *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa penerimaan penggunaan teknologi didasarkan pada kemudahan pemakaian sehingga termotivasi dalam memenuhinya. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan sistem perpajakan. Dengan diberikan kemudahan pada sistem yang digunakan diharapkan dapat mendorong perilaku seseorang agar patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pengaruh Motivasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi. Menurut (Bayu dkk, 2015) menjelaskan bahwa motivasi merupakan daya dorong yang menjadi penggerak Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tingginya motivasi yang diperoleh Wajib Pajak diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib

Pajak. Motivasi yang dimiliki dapat diperoleh dari dalam diri maupun lingkungan Wajib Pajak itu sendiri.

Dikaitkan dengan prinsip *Theory of Planned Behavior* menerangkan bahwa terdapat perihai yang menghambat atau menggerakkan niat individu dalam melakukan tindakan. Hal tersebut berkenaan dengan motivasi pajak. Jika Wajib Pajak banyak mendapatkan motivasi yang bersumber dari diri maupun motivasi yang berasal dari fiskus hal tersebut tentunya dikehendaki akan mampu mendorong Wajib Pajak agar melaksanakan sikap taat dan patuh terhadap perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. (2) Efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. (3) Motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

REFERENSI

- Afifah, I. I. . Kurnia. (2021). Pengaruh kualitas pelayanan dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10 (2), 2-3.
- Amelia, D., & Lailatul, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9 (4), 1-25. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2874>
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan (Jejak)*, 6 (2).
- Bayu, C., Susilo, H., & Zahroh, Z. A . (2015). Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1). <https://media.neliti.com/media/publications/193161-ID-pengaruh-pengetahuan-perpajakan-kualitas.pdf>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (9th ed.). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ginting, A. V., Sabijono, H & Pontoh, W. (2017). Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Kecamatan Malalayang Kota Manado). *Jurnal EMBA (Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi)*, 5 (2).
- Kurniawati, N.K.K., Yasa, I.N.P., & Kurniawan. P. S. (2017). Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Penyuluhan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Gianyar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8 (2).
- Ningsih, E. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan

- perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, 10(1), 106–122.
- Rika, F. (2021). Penerapan E-Filing Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak. *JURNAL AKUNTANSI*, 10 (1), 107–115. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/290>
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 4 (4), 1–18.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EXPENDITURE DAN KINERJA
PERUSAHAAN**

Celine Florencia Wedjaja, Rizky Eriandani

Universitas Surabaya

rizky.eriandani@staff.ubaya.ac.id

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1317

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	15 September, 2022
Tanggal Revisi	24 Desember, 2022
Tanggal diterima	02 Januari, 2023

Keywords:

CSR expenditure
Firm performance

Abstract:

This study aims to analyze the effect of Corporate Social Responsibility Expenditure on company performance and the effect of firm-specific economic variables on Corporate Social Responsibility Expenditure. The research population is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) except for the banking sector and other financial institutions from 2016 to 2019. Based on the purposive sampling method, 372 samples were obtained. The data is taken from the company's financial statements and tested using the multiple linear regression method. The results of this study indicate that CSR expenditure has a significant effect on ROA, but has no significant effect on CFO. Other findings show that CFO, size, and PM have a significant effect on CSR expenditure. Meanwhile, cash, ATO, and leverage have no significant effect on CSR expenditure.

Kata Kunci:

CSR expenditure
Kinerja perusahaan

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility Expenditure* terhadap kinerja perusahaan dan pengaruh variabel ekonomi spesifik perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Expenditure*. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali sektor bank dan lembaga keuangan lainnya periode 2016-2019. Berdasarkan metode *purposive sampling* diperoleh 372 sampel. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan dan diuji menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR expenditure berpengaruh signifikan terhadap ROA, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap CFO. Temuan lainnya menunjukkan bahwa CFO, size, dan PM berpengaruh signifikan terhadap CSR expenditure. Sedangkan cash, ATO, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR expenditure.

PENDAHULUAN

Saat ini banyak perusahaan yang didirikan dengan tujuan tidak mengalami kebangkrutan atau hanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun tujuan perusahaan yang hanya mementingkan sisi ekonomi sudah tidak relevan saat ini, dikarenakan perusahaan saat ini tidak sebatas mendapatkan keuntungan, melainkan mereka juga dituntut memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Corporate Social Responsibility merupakan salah satu program yang dapat dilaksanakan perusahaan demi menciptakan kesejahteraan sosial serta melestarikan lingkungan. Saat ini hanya ada peraturan untuk BUMN, yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 tahun 2007. Perusahaan harus menyisihkan dua persen dari laba untuk PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Meski demikian sudah banyak perusahaan swasta yang menerapkan CSR karena mereka sadar akan pentingnya aktifitas tersebut. Disisi lain masih ada pula perusahaan yang belum menerapkan CSR dengan benar dan merusak lingkungan sekitarnya dengan membuang limbahnya pada tempat yang tidak seharusnya dan setelah membuang limbah sembarangan dan menyebabkan rusaknya lingkungan sekitar perusahaan memberikan sumbangan kepada masyarakat sekitar dan menyebut sumbangan tersebut sebagai kegiatan tanggung jawab sosial korporasi, dan ada pula perusahaan yang menggunakan CSR sebagai alat untuk membangun atau memperbaiki citra perusahaan (Mahendra, 2019). Penelitian ini menguji dampak dari CSR Expenditure pada kinerja perusahaan. Dalam penelitian sebelumnya (El Ghouli et al., 2017; Luo & Bhattacharya, 2009; Waddock & Graves, 1997) mengemukakan hubungan positif antara CSR dan kinerja perusahaan, yang mengarah pada peningkatan profitabilitas. (Freeman, 1994) mengemukakan bahwa dari perspektif pemangku kepentingan CSR memiliki efek positif pada kinerja keuangan perusahaan. Karena perusahaan memiliki hubungan dengan pemangku kepentingan yang berbeda, termasuk pemerintah, pesaing, konsumen, dan pendukung lingkungan, peningkatan sosial pengeluaran dapat meningkatkan hubungan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya mengurangi biaya sosial perusahaan dan meningkatkan peluang pasar, mengarah ke kinerja keuangan bersih yang lebih tinggi. (Statman & Glushkov, 2009) menemukan bahwa perusahaan dengan peringkat CSR tinggi umumnya menyediakan pengembalian yang lebih tinggi daripada mereka yang peringkat CSR-nya rendah. Sedangkan (Friedman, 1970) melihat CSR sebagai masalah keagenan dan menunjukkan bahwa CSR memiliki efek negatif pada kinerja keuangan perusahaan karena CSR

perusahaan memerlukan biaya. CSR sukarela mengasumsikan bahwa rata-rata perusahaan menghabiskan tingkat optimal CSR mereka. Dengan demikian, mungkin tidak ada hubungan cross-sectional antara kinerja perusahaan masa depan dan pengeluaran CSR (Himmelberg et al., 1999). Selain itu, (Lys et al., 2015) menunjukkan bahwa CSR sukarela tidak menyebabkan laba di masa depan tetapi hanya dapat menandakan laba di masa depan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak CSR expenditure pada kinerja perusahaan dan juga pengaruh variabel ekonomi spesifik perusahaan terhadap CSR expenditure. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi investor, yaitu memberi informasi tambahan yang bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.

Teori agensi menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *good news*, akan cenderung memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi tentang kondisi perusahaan, dengan harapan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Informasi yang diungkapkan melalui laporan tahunan tersebut dianggap sebagai sinyal untuk investor (Scott, 2015). Semakin detail pengungkapan informasi dalam laporan tahunan maka semakin mudah bagi investor untuk membuat keputusan investasi. Perusahaan yang mengeluarkan *good news*, kemungkinan besar risiko perusahaan dimasa mendatang akan berkurang karena dianggap memiliki prospek baik (Ghozali & Chariri, 2007).

Hubungan antara kegiatan CSR dan kinerja perusahaan didasarkan pada gagasan “maksimisasi nilai pemangku kepentingan”. Pandangan tersebut mengemukakan beberapa alasan teoritis untuk mendukung klaim bahwa kinerja perusahaan dapat ditingkatkan melalui kegiatan CSR. Pertama, komitmen tinggi terhadap kegiatan CSR bisa diartikan sebagai fokus kepentingan perusahaan terhadap stakeholder yang meningkatkan keinginan stakeholder dalam mendukung tindakan yang dilakukan perusahaan yang akhirnya meningkatkan kinerja perusahaan (Kitzmueller & Shimshack, 2012). Kedua, kegiatan CSR mengarah pada peningkatan profitabilitas perusahaan karena berkurangnya biaya transaksi terkait transaksi dengan stakeholder. Selain itu, kegiatan CSR meningkatkan aksesibilitas perusahaan ke pasar produknya yang meningkatkan permintaan produk dan, dengan demikian, profitabilitas perusahaan (Narver, 1971). Ketiga, bisnis sering diartikan sebagai jaringan perjanjian eksplisit dan implisit antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui kegiatan CSR yang dilakukan, perusahaan berharap dapat menciptakan serta mempertahankan posisi untuk kewajiban perusahaan yang berhubungan dengan kontrak implisit, yang

pada gilirannya memfasilitasi pengadaan sumber daya kritis mereka (Coase, 1937; Jensen & Meckling, 1976). Akhirnya, kegiatan serta pengeluaran CSR bisa memajukan hubungan antara kelompok-kelompok pemangku kepentingan (Preston & O'Bannon, 1997; Waddock & Graves, 1997) yang bisa membantu dalam penyelesaian konflik antara para pemangku kepentingan (Jo & Harjoto, 2011). Secara keseluruhan, argumen teoretis yang kuat menambah hipotesis bahwa kegiatan dan pengeluaran CSR adalah investasi strategis yang dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan kinerja perusahaan (Nollet et al., 2016). Eriandani (2020) menunjukkan hal yang sama, investasi CSR akan meningkatkan kinerja dimasa mendatang. Hasil penelitian oleh (Bhattacharyya & Rahman, 2019) menyatakan bahwa CSR expenditure berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

H1: CSR Expenditure berpengaruh terhadap *Return On Assets*

H2: CSR Expenditure berpengaruh terhadap *Cash Flow Operation*

Pendukung "*shareholder expense view*" berpendapat bahwa CSR expenditure yang dilakukan organisasi yang menghasilkan laba tidak konsisten dengan tujuan perusahaan. Pandangan tersebut sebagian didukung oleh beberapa penelitian yang menemukan bahwa pengeluaran untuk kegiatan CSR merupakan pemborosan sumber daya perusahaan yang berharga. Sebagai contoh, (Campbell, 2007) menyatakan bahwa perusahaan dengan sumber daya surplus harus menggunakan sebagian dari surplus sumber daya mereka untuk kegiatan CSR sebagai investasi sosial. Pendapat serupa, dimana perusahaan dengan surplus menggunakannya untuk kegiatan CSR juga dikemukakan oleh (Kubik et al., 2012). Kedua penelitian tersebut secara implisit mengasumsikan bahwa surplus sumber daya perusahaan dimanfaatkan untuk kegiatan CSR. Asumsi tersebut menyatakan bahwa CSR expenditure mirip dengan pengeluaran untuk filantropi bisnis. Hal tersebut memiliki arti bahwa CSR expenditure dilakukan tanpa harapan meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Bhattacharyya & Rahman, 2019) menemukan bahwa menunjukkan bahwa CSR expenditure didorong oleh faktor ekonomi spesifik perusahaan. Faktor ekonomi spesifik menunjukkan kondisi ekonomi perusahaan seperti SIZE, LEVERAGE, ATO, CASH dan CFO)

H3: Variabel ekonomi spesifik perusahaan berpengaruh terhadap CSR Expenditure

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampling yaitu *purposive sampling*, dan sampel yang diambil tentunya telah memenuhi kriteria sebagai objek dalam penelitian ini. Pertama, badan usaha yang *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali Bank dan Lembaga Keuangan lainnya pada periode 2016 hingga 2019. Kedua, menerbitkan laporan tahunan. Ketiga, mengungkapkan biaya CSR. Berdasarkan kriteria sampel yang ditetapkan, didapatkan 372 emiten.

Kinerja perusahaan diproksi dengan return on assets (ROA) dan operating cash flow (CFO). ROA diukur dengan membandingkan net income dengan total asset. CFO didapatkan dari nilai arus kas dari operasi dibagi dengan total asset. CSR expenditure (ACSR) merupakan kontribusi aktual CSR yang dihabiskan untuk kegiatan CSR sepanjang tahun. Angka dari ACSR disini didapat dari *annual report* yang diterbitkan oleh perusahaan. ACSR dihitung dengan natural log dari biaya CSRA. Variabel control dalam penelitian ini, yaitu ada ATO (*assets turnover ratio*), Leverage (tingkat utang), PM (*profit margin*), dan Size (ukuran perusahaan).

Tiga model penelitian ini menerapkan metode *ordinary least square* (OLS), yang mana menguji pengaruh CSR expenditure terhadap kinerja perusahaan; dan menguji pengaruh variabel ekonomi spesifik perusahaan terhadap CSR expenditure.

Model Penelitian 1:

$$ROA_{t+1} = \alpha_b + \beta_{1a}ACSR_t + \mu_{i,a}SIZE_{i,t} + \mu_{i,a}ATO_{i,t} + \mu_{i,a}LEVERAGE_{i,t} + \mu_{i,a}PM_{i,t} + \varepsilon$$

Model Penelitian 2:

$$CFO_{t+1} = \alpha_b + \beta_{2a}ACSR_t + \mu_{i,b}SIZE_{i,t} + \mu_{i,b}ATO_{i,t} + \mu_{i,b}LEVERAGE_{i,t} + \mu_{i,b}PM_{i,t} + \varepsilon$$

Model Penelitian 3:

$$ACSR_{t+1} = \beta_0 + \delta_jCFO_{Sj,t} + \delta_jCASH_{Sj,t} + \delta_jSIZE_{Sj,t} + \delta_jATO_{Sj,t} + \delta_jLEVERAGE_{Sj,t} + \delta_jPM_{Sj,t} + \varepsilon$$

Variabel dependen pertama dari penelitian pertama ini yaitu ROA_{t+1} , yang mana diukur menggunakan angka ROA satu tahun ke depan. Lalu, variabel dependen kedua dari penelitian pertama adalah CFO_{t+1} , yang mana diukur menggunakan angka CFO untuk satu tahun ke depan. Terakhir, variabel dependen ketiga yang dipakai pada penelitian kedua merupakan $ACSR_{t+1}$, yang mana diukur menggunakan angka ACSR satu tahun kedepan yang diambil dari *annual report* yang diterbitkan perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Tabel di bawah ini menampilkan hasil statistik deskriptif dari 372 sampel yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	372	-0.5728	0.7301	0.061954	0.1131375
CFO	372	-0.2554	0.4969	0.062529	0.0961573
ACSR	372	16.6691	27.8803	21.225001	2.1916590
SIZE	372	25.2156	32.9598	29.087574	1.4966184
ATO	372	0.0018	3.7472	0.806497	0.5943423
LEVERAGE	372	0.0335	5.0733	0.537360	0.5112196
PM	372	-74.9768	17.8345	-0.049418	4.0595794
Valid N (listwise)	372				

Sumber : data diolah (2021)

Variabel ROA memiliki rata-rata 0.061954 yang memiliki arti untuk setiap 1 rupiah aset mampu menghasilkan tingkat pengembalian aset perusahaan sebesar 0.061954. Variabel CFO memiliki rata-rata 0.062529. lalu variabel ACSR memiliki nilai minimum 16.6691, nilai maksimum 27.8803, dan rata-rata 21.225001. Variabel cash menunjukkan nilai minimum 0.0008, nilai maksimum 2.8793, nilai rata-rata 0.118792. Variabel size memiliki nilai minimum 25.2156, nilai maksimum 32.9598, nilai rata-rata 29.087574. Variabel ATO memiliki nilai rata-rata 0.806497, nilai minimum 0.0018, nilai maksimum 3.7472. Variabel leverage memiliki nilai rata-rata 0.537360, nilai minimum 0.0335, nilai maksimum 5,0733. Variabel PM memiliki nilai rata-rata -0.049418, nilai minimum -74.9768, nilai maksimum 17.8345.

Pada tabel 2 dapat dilihat hasil uji dari model 1, pengaruh CSR expenditure terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel ACSR adalah sebesar 0.009, nilai positif memiliki arti jika variabel ACSR meningkat maka variabel ROA juga akan mengalami peningkatan sebesar 0.009, dan dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel ACSR adalah 0.005 yang berarti bahwa ACSR sebagai variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependennya yaitu ROA.

Tabel 2
Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.217	0.114		-1.907	0.057
	ACSR	0.009	0.003	0.184	2.858	0.005
	SIZE	0.002	0.005	0.020	0.306	0.760
	ATO	0.060	0.010	0.315	6.250	0.000
	LEVERAGE	-0.028	0.011	-0.125	-2.550	0.011
	PM	8.706E-05	0.001	0.003	0.064	0.949

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil uji dari model 2, pengaruh CSR expenditure terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel ACSR adalah sebesar 0.009, dan variabel ACSR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.057 maka dapat dikatakan bahwa ACSR sebagai variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu CFO.

Tabel 3
Uji Regresi Linier Berganda Model 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.284	0.099		-2.863	0.004
	ACSR	0.006	0.003	0.125	1.906	0.057
	SIZE	0.007	0.004	0.114	1.693	0.091
	ATO	0.037	0.008	0.230	4.472	0.000
	LEVERAGE	-0.025	0.009	-0.133	-2.664	0.008
	PM	0.001	0.001	0.033	0.663	0.508

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa hasil uji dari model 3, pengaruh variabel ekonomi spesifik perusahaan terhadap CSR expenditure menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel CFO adalah sebesar 4.187 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang memiliki arti yaitu CFO berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ACSR. Nilai koefisien dari variabel *cash* adalah 0.530 dan nilai signifikansi sebesar 0.276 yang berarti bahwa *cash* tidak berpengaruh terhadap ACSR. Nilai koefisiensi dari variabel size adalah sebesar 1.005 dengan nilai signifikansi 0.000 maka dapat dikatakan jika size berpengaruh positif dan signifikan pada ACSR.

Tabel 4
Uji Regresi Linier Berganda Model 3

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-8.384	1.777		-4.718	0.000
	CFO	4.187	0.947	0.177	4.420	0.000
	CASH	0.530	0.486	0.042	1.092	0.276
	SIZE	1.005	0.060	0.658	16.721	0.000
	ATO	0.171	0.155	0.045	1.106	0.270
	LEVERAGE	-0.010	0.171	-0.002	-0.059	0.953
	PM	0.043	0.021	0.077	2.065	0.040

Sumber: Data diolah (2021)

Nilai koefisiensi dari variabel size adalah sebesar 1.005 dengan nilai signifikansi 0.000 maka dapat dikatakan jika size berpengaruh positif dan signifikan pada ACSR. Nilai koefisien dari variabel ATO adalah 0.171 dan nilai signifikansi 0.270 maka dapat dikatakan bahwa ATO tidak berpengaruh pada ACSR. Nilai koefisiensi dari variabel leverage adalah sebesar -0.010, nilai negatif memiliki arti jika variabel leverage mengalami peningkatan maka variabel ACSR akan mengalami penurunan 0.010, dan bisa dilihat bahwa nilai signifikansi dari leverage adalah 0.953, yang memiliki arti bahwa leverage tidak berpengaruh pada ACSR. Nilai koefisien dari variabel PM adalah 0.043 dan nilai signifikansi 0.040 yang berarti bahwa PM berpengaruh positif dan signifikan pada ACSR.

PEMBAHASAN

Pertama dari penelitian ini ditemukan bahwa CSR expenditure berpengaruh signifikan pada ROA. Hasil ini menunjukkan bahwa CSR mampu meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang. Perusahaan yang tidak hanya fokus hanya pada keuntungan saja, tetapi juga harus memperhatikan *stakeholdernya*, akan mendapatkan dukungan dari para *stakeholder*. Pada akhirnya, dukungan tersebut mampu mendorong nilai perusahaan menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Bhattacharyya & Rahman (2019) dan Utomo et al. (2017) yang menjelaskan bahwa *CSR expenditure* berpengaruh signifikan pada ROA.

Namun hasil penelitian ini menemukan bahwa *CSR expenditure* tidak berpengaruh signifikan terhadap CFO. Hal ini berarti bahwa pengeluaran CSR yang dikeluarkan badan

usaha indonesia ditujukan untuk filantropi Chapple & Moon, (2005). Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian dari Widiastuty & Soewarno, (2019)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa CFO, *SIZE*, dan PM berpengaruh terhadap CSR *expenditure*. Hal ini mendukung keberadaan teori legitimasi. Stakeholder perusahaan, seperti karyawan, masyarakat, konsumen, dan pemerintah, akan memiliki tuntutan sesuai kepentingannya masing-masing. Perusahaan menggunakan program CSR sebagai bentuk legitimasi, agar tetap bertahan hidup Umar, (2018). Program CSR yang dijalankan tersebut akan membutuhkan alokasi dana perusahaan. Hal ini juga mendukung keberadaan dari *Slack Resource Theory*, semakin besar badan usaha, semakin besar sumber daya tersedia yang dapat dikeluarkan atau digunakan untuk aktivitas CSR perusahaan. Sejalan dengan penelitian dari Bhattacharyya & Rahman (2019) dan Lys et al. (2015) yang menjelaskan bahwa CFO dan *SIZE* berpengaruh signifikan terhadap CSR *expenditure*.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian dari Chauhan & Amit (2014) dimana penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran perusahaan secara signifikan memengaruhi pengeluaran CSR. Hasil penelitian ini juga didukung penelitian dari Candrayati & Saputra (2013) dan Rosyada & Astrina (2018) yang menjelaskan semakin besar laba badan usaha, maka badan usaha dituntut untuk lebih peduli terhadap *stakeholdernya*.

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *CASH*, *ATO*, dan *LEVERAGE* tidak berpengaruh terhadap CSR *expenditure*. Hal ini didukung penelitian dari Lys et al. (2015) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa *CASH* dan *ATO* tidak berpengaruh terhadap CSR *expenditure*. Hal tersebut dapat dikarenakan baik badan usaha yang mempunyai tingkat laba dan aset yang rendah maupun tinggi kini mulai sadar akan pentingnya tanggung jawab sosial.

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian dari Chauhan & Amit, (2014) dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa *LEVERAGE* tidak berpengaruh terhadap CSR *expenditure* perusahaan. Hal ini dapat dikarenakan jika perusahaan tidak dapat melunasi utangnya, maka kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit menjadi besar. Oleh sebab itu badan usaha berupaya untuk mengurangi biaya-biaya, salah satunya dengan mengurangi biaya kegiatan CSR.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian pengaruh *CSR Expenditure* terhadap *kinerja perusahaan* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) kecuali Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya periode 2016-2019, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, *CSR expenditure* berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa jika *CSR expenditure* mengalami peningkatan maka ROA badan usaha juga akan mengalami peningkatan. Kedua, *CSR expenditure* tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas dari aktivitas operasi. Artinya, tingkat *CSR expenditure* yang tinggi tidak menjamin tingkat arus kas dari aktivitas operasi badan usaha yang tinggi. Ketiga, arus kas dari aktivitas operasi, ukuran perusahaan, dan *profit margin* berpengaruh positif dan signifikan pada *CSR expenditure*. Dengan kata lain, arus kas dari aktivitas operasi, ukuran perusahaan, dan *profit margin* yang tinggi dapat meningkatkan pengalokasian dan untuk membiayai program-program CSR badan usaha. Keempat, Kas dan setara kas, *assets turnover ratio*, dan utang perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *CSR expenditure*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kas dan setara kas, *assets turnover ratio*, dan utang perusahaan yang tinggi tidak menjamin badan usaha untuk mengalokasikan dan yang digunakan untuk membiayai program-program CSR.

Penelitian ini juga tidak terhindar dari keterbatasan yang mana mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu hanya menggunakan variabel ROA dan CFO sebagai proksi dari kinerja badan usaha sehingga belum dapat mencerminkan pengaruh CSR expenditure terhadap kinerja badan usaha secara keseluruhan. Dari adanya keterbatasan tersebut, diharapkan peneliti selanjutnya sebaiknya menambah atau menggunakan variabel lain sebagai proksi kinerja badan usaha.

REFERENSI

- Bhattacharyya, A., & Rahman, M. L. (2019). Mandatory CSR expenditure and firm performance. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2019.100163>
- Campbell, J. L. (2007). Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *Academy of Management Review*, 32(3), 946–967.
- Candrayati, A.A., & Saputra., D. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Chapple, W., & Moon, J. (2005). Corporate social responsibility (CSR) in Asia a seven-country study of CSR Web site reporting. *Business and Society*, 44(4), 415–441. <https://doi.org/10.1177/0007650305281658>

- Chauhan, S., & Amit. (2014). A Relational Study of Firm's Characteristics and CSR Expenditure. *Procedia Economics and Finance*, 11(14), 23–32. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(14\)00172-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(14)00172-5)
- Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386–405. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x>
- El Ghouli, S., Guedhami, O., & Kim, Y. (2017). Country-level institutions, firm value, and the role of corporate social responsibility initiatives. In *Journal of International Business Studies*, 360-385 (Vol. 48, Issue 3). <https://doi.org/10.1057/jibs.2016.4>
- Eriandani, R. (2020). The Economic Impact of Corporate Social Responsibility. *17th International Symposium on Management (INSYIMA 2020)*, 214–218. https://doi.org/10.1007/978-3-7908-2118-5_1
- Freeman, R. E. (1994). The Politics of Stakeholder Theory. *Business Ethics Quarterly*, 4(4), 409–421. <https://doi.org/10.5840/10.2307/3857340>
- Friedman, M. (1970). A Friedman doctrine - The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. *New York Times Magazine*, 6(Newspaper Article), 33,122-124.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himmelberg, C. P., Hubbard, R. G., & Palia, D. N. (1999). Understanding the determinants of managerial ownership. In *Journal of Financial Economics*, 353-384 (Vol. 53).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jo, H., & Harjoto, M. A. (2011). Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 103(3). <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y>
- Kitzmueller, M., & Shimshack, J. (2012). *Economic Perspectives on Corporate Social Responsibility*. 51–84.
- Kubik, J. D., Scheinkman, J. A., & Hong, H. G. (2012). Financial Constraints on Corporate Goodness. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1784357>
- Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2009). The debate over doing good: Corporate social performance, strategic marketing levers, and firm-Idiosyncratic risk. *Journal of Marketing*, 73(6), 198–213. <https://doi.org/10.1509/jmkg.73.6.198>
- Lys, T., Naughton, J. P., & Wang, C. (2015). Signaling through corporate accountability reporting. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 56–72. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.03.001>
- Mahendra, D. (2019). *Pencitraan oleh CSR*. Kompasiana.Com.
- Narver, J. C. (1971). Rational Management Responses to External Effects. *Academy of Management Journal*, 99–115. <https://doi.org/10.5465/254714>
- Nollet, J., Filis, G., & Mitrokostas, E. (2016). Corporate social responsibility and financial performance: A non-linear and disaggregated approach. *Economic Modelling*. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.09.019>
- Preston, L. E., & O'Bannon, D. P. (1997). The corporate social-financial performance relationship: A typology and analysis. *Business and Society*, 36(4), 419–429. <https://doi.org/10.1177/000765039703600406>
- Rosyada, A., & Astrina, F. (2018). Pengaruh Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Pearson Education Limited.

- Statman, M., & Glushkov, D. (2009). The wages of social responsibility. *Financial Analysts Journal*, 65(4), 33–46. <https://doi.org/10.2469/faj.v65.n4.5>
- Umar, S. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Per-usahaan, Leverage, Umur Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen dalam Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Utomo, S. D., Meylinasari, V., & Machmuddah, Z. (2017). Biaya Csr: Voluntary Disclosure, Investasi Dan Sinyal? *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 24(1), 15–23.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The corporate social performance-financial performance link. *Strategic Management Journal*, 303–319. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199704\)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199704)18:4<303::AID-SMJ869>3.0.CO;2-G)
- Widiastuty, E., & Soewarno, N. (2019). Csr expenditure and company performance: Charity or signal? Evidence from Indonesia. *Quality Innovation Prosperity*, 23(3), 22–37. <https://doi.org/10.12776/QIP.V23I3.1273>

Pengaruh *Financial Pressure, Stability* dan Target terhadap *Financial Statement Fraud*

Indra Lukmana Putra
Politeknik Negeri Malang
Indra.lukmana@polinema.ac.id

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1350

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	23 September, 2022
Tanggal Revisi	23 Desember, 2022
Tanggal diterima	27 Desember, 2022

Keywords:

*Financial,
Agency Theory,
Financial
Pressure,
Stability
Financial target,
Financial
Statement Fraud*

Abstract:

This study focusing determine the effect of financial pressure, stability, and financial targets on financial statement fraud with agency theory. The population selected in this research were infrastructure, utilities and transportation companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period so that after purposive sampling, 138 observers from 46 business entities were obtained. Purposive sampling was adopted as the sampling technique and a quantitative research approach was used as the main research method. Secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) is used as the main source of information. Testing the research hypothesis places Multiple Linear Regression Analysis as a testing tool with the results showing that financial stability as an independent variable has an important impact on financial statement fraud, which indicates that pressure on the industry might increase fraudulent behavior while the other two variables are stability and financial targets does not affect acts of fraud in the preparation of financial statements.

Kata Kunci:

*Financial,
Teori Keagenan,
Financial
pressure,
Stability,
Financial Target,
Financial
Statement Fraud*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial pressure, stability, dan financial target* terhadap *financial statement fraud* yang berkaitan dengan teori agensi. Populasi yang dipilih dalam riset ini adalah perusahaan infrastruktur, utilitas, dan transportasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 sehingga mendapat 78 perusahaan setelah dilakukan *purposive sampling* diperoleh 138 observer dari 46 entitas usaha. *Purposive sampling* diadopsi sebagai teknik pengambilan sampel dan pendekatan penelitian kuantitatif digunakan sebagai metode utama riset. Data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan sebagai sumber informasi utama. Pengujian hipotesis riset ini menempatkan Analisis Regresi Linear Berganda sebagai alat pengujian dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan sebagai variabel independen memiliki

dampak penting pada kecurangan laporan keuangan, yang menandakan bahwa tekanan pada industri mungkin meningkatkan perilaku kecurangan sedangkan dua variabel lain yaitu berupa kestabilan dan target keuangan tidak berpengaruh terhadap tindak kecurangan pada penyusunan laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Teori keagenan merupakan korelasi agensi dimana terdapat satu pihak (*principal*) yang menyewa pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu tindakan jasa dan menguasai wewenang dalam menyusun kebijakan untuk pihak penyewa tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2012). Teori keagenan (*agency theory*) dideskripsikan selaku korelasi yang berdasarkan kontrak kerja yang dibangun oleh pemegang saham sebagai *principal* dan pihak manajemen sebagai *agent* (Romadona, 2016). Pihak manajemen selaku operasional industri bertujuan mencerna sumber energi industri secara efisien serta efektif. Disisi lain pula membagikan informasi kepada para pemegang saham serta investor tentang kondisi sebuah entitas usaha yang disajikan lewat *financial statement* atau pelaporan keuangan.

Laporan keuangan (*financial statement*) disusun untuk memberikan gambaran terkait kondisi laba keuangan, hasil kerja, dan sirkulasi kas industri kepada pihak manajemen sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil langkah manajerial, investasi, dan kebijakan ekonomi, serta merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak manajemen terkait pemakaian sumber energi yang telah dipercayakan (Jalinan Akuntan Indonesia, 2018).

Pada tahun 2018, tersebar kabar terkait pelaporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk. yang ditengarai bermasalah. PT Garuda Indonesia melaporkan nominal laba bersih (*net profit*) senilai Rp11,33 miliar atau mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2017 yang mengalami kerugian mencapai tiga triliun rupiah. Hasil pemeriksaan dan audit laporan keuangan tersebut oleh auditor menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PT Garuda Indonesia menjalin kontrak kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada PT Garuda Indonesia yang selanjutnya akan dilunasi dengan kebijakan kerja sebagai bentuk kompensasi. Utang yang dimiliki oleh PT Mahata berkaitan dengan jasa instalasi jaringan wifi yang belum ditunaikan. Pihak PT Garuda Indonesia tidak

melakukan pencatatan transaksi sebagai bentuk penunaian kewajiban, sebaliknya mencatat transaksi tersebut sebagai pemasukan yang menambah besaran laba (Hartomo, 2019).

Dalam kasus PT Garuda Indonesia telah mengklaim salah dalam menyajikan laporan keuangan atas pendapatan yang telah dicapai oleh PT Mahata Aero Teknologi dalam pencatatan akuntansi masuk dalam akun piutang namun telah diklai sebagai akun pendapatan perusahaan pada tahun 2018. Kasus yang terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut berada pada tiga sektor yang berbeda yaitu, sektor perusahaan manufaktur properti perumahan, dan sektor infrastruktur, utilitas & transportasi. Dari kasus tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan objek penelitian mengambilsalah satu sektor yaitu sektor infrastruktur, utilitas & transportasi.

Berdasarkan penjelasan. diatas, dalam melakukan *fraudulent financial reporting* didasari oleh beberapa faktor seperti adanya tekanan untuk memanipulasi karena keinginan dari dalam diri yang disebabkan kebutuhan serta menjadi sebuah upaya untuk mempertahankan perusahaan ditengah keadaan yang memburuk, selain itu juga adanya kesempatan untuk melakukan *fraud* seperti mencari investor dalam hal permodalan serta faktor rasionalisasi terkait penggunaan sistem akrual dalam akuntansi yang dapat mengakui pendapatan diawal, serta kerjasama yang dilakukan untuk mempermudah melakukan kecurangan dalam upaya mempertahankan stabilitas keuangan dalam sebuah entitas usaha merupakan Urgensi yang sangat mendasar dilakukan penelitian juga tanggung jawab peneliti sebagai akademisi agar terhindar dalam kasus diatas tidak terulang kembali serta pembelajaran bagi praktisi sebagai tindakan representatif pencegahan.

Teori keagenan dilandasi oleh anggapan bahwa informasi merupakan benda komoditi yang transaksional yaitu menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013). Teori keagenan mengasumsikan terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara manajemen selaku pengelola dengan pemegang saham. Manajemen berperan untuk memperoleh imbalan, bonus, ataupun insentif dalam capaian kinerja yang efisien serta efektif, sebaliknya pemegang saham mengharapkan imbalan yang merupakan hasil pengorbanan dari proses investasi. Hal ini yang melatarbelakangi pihak manajemen perlu dibebani sasaran keuangan yang diperuntukan untuk memenuhi harapan besar

pemegang saham. Sasaran keuangan yang dimaksud dapat berbentuk pencapaian laba yang wajib dicapai oleh pihak manajemen (Tessa dan Harto, 2016).

Pihak manajemen mempunyai informasi sekaligus mengenali secara mendalam suatu keadaan baik secara operasional, area kerja, dan industri secara totalitas. Permasalahan yang sering timbul merupakan bentuk ketidakseimbangan atau biasa dikenal dengan asimetri informasi. Penerbitan laporan keuangan merupakan bentuk solusi yang diharapkan dapat meminimalkan permasalahan tersebut (Romadona, 2016).

Dalam keadaan tersebut, timbul sebuah tekanan situasional akibat adanya sasaran keuangan yang wajib dipenuhi oleh pihak manajerial. Tekanan situasional ini mendorong munculnya kesempatan kecurangan yang dipicu oleh lemahnya pengawasan pihak internal organisasi, didukung rendahnya kontrol, dan penyalahgunaan kewenangan. Adanya wewenang yang diperoleh dari suatu posisi strategis memberi kesempatan lebih luas untuk melakukan tindakan penyelewengan. Rasionalisasi ataupun pembenaran untuk para pelaku kecurangan untuk menyembunyikan tindakannya yang tidak jujur. Rasionalisasi merupakan faktor yang berkaitan erat dengan pergantian direksi pada suatu industri (Laksana, 2016). Bertujuan untuk menampilkan indeks capaian kerja yang sesuai dengan harapan *owner*; pihak manajemen terdorong untuk ikut serta lebih jauh dalam manipulasi laporan keuangan. Serangkaian tekanan dan pengaruh yang diterima oleh manajemen, umumnya berakibat pada munculnya kecenderungan untuk menginisiasi suatu tindak kecurangan (Setiawati dan Baningrum, 2018).

Tuntutan yang ditujukan kepada pihak manajerial untuk mencapai nilai *profit* atau mengurangi kerugian akan mendesak para pengurus sebuah entitas usaha melakukan kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Adanya tekanan memiliki dampak dalam penetapan *financial pressure*, *stability*, dan *financial target* yang dapat mendorong terbentuknya perilaku kecurangan pada para pelaporan keuangan.

Financial pressure diperoleh pihak manajerial sebagai akibat dari kewajiban untuk memperoleh bonus utang dalam bentuk pembiayaan serta nilai ekuitas. Aprilia (2017) mendeskripsikan situasi adanya tekanan dari pihak eksternal berakibat menimbulkan manajemen mencari sebuah solusi ekonomi yaitu melalui pinjaman dari pihak lain, sehingga industri mampu bersaing dan mendukung dalam persaingan yang kompetitif.

Financial stability adalah faktor yang merupakan tuntutan untuk manajemen melindungi kestabilan keuangan dalam sebuah entitas. Beban mengkondisikan *financial stability* dapat menjadi dorongan melaksanakan kecurangan oleh pihak manajemen. Keadaan *financial stability* akan mengalami ancaman sehingga harus tetap dalam kondisi baik secara operasional dan manajerial.

Financial target merupakan sasaran dari suatu pencapaian dalam satu periode yang sudah ditetapkan oleh *owner* kepada pihak manajemen agar dapat mencapai kondisi keuangan tertentu. Pamungkas dalam risetnya (2018) mengemukakan bahwa sasaran nilai keuangan mempengaruhi secara positif dan berbanding lurus dengan signifikansi pada ketidakjujuran pelaporan keuangan, sebaliknya hasil riset yang dilakukan oleh Sari (2016) menyimpulkan bahwa sasaran nilai keuangan tidak berpengaruh signifikan pada kecurangan pelaporan keuangan.

Setelah melakukan penelitian empiris yang bersumber pada beberapa penelitian terdahulu serta kajian latar belakang, dapat dikatakan bahwa tuntutan serta tekanan kepada pihak manajerial yang tercermin pada capaian keuangan dapat memunculkan kecurangan pada pelaporan keuangan dengan tujuan untuk memperlihatkan performa industri tetap baik. Sistem pengendalian manajemen serta pengawasan yang tegas mendorong terciptanya pengambilan kebijakan yang baik pada industri serta bebas dari kecurangan. Penelitian ini menitikberatkan pada pada pengujian dampak *financial pressure, stability* dan *financial target* yang berpotensi mendorong munculnya kecurangan pelaporan keuangan (*financial statement fraud*). Sumber data diperoleh dari industri infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020.

METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan riset kuantitatif selaku pendekatan riset eksplanasi (*explanatory research*). Riset eksplanasi dapat digunakan untuk mengembangkan serta menyempurnakan teori lebih mendalam yaitu kebalikannya melemahkan dan memperbarui teori (Mulyadi, 2013). Menguji korelasi antar variabel terhadap *Sample* dari Populasi yang telah digunakan dalam riset ini merupakan suatu Entitas usaha berjenis Infrastruktur, Utilitas serta Transportasi yang *Listing* di Bursa Efek di Indonesia tahun 2018 hingga 2020 dengan jumlah sebanyak 78 Perusahaan. Penggunaan Teknik

Purposive terhadap sampel adalah sebuah pengilustrasian dengan pertimbangan tertentu (Tiffani, 2015). Pemilihan ilustrasi dicoba dengan memfilter data yang memiliki kesesuaian serta mempunyai keterkaitan dengan riset. Ada pula kriteria selaku berikut:

Tabel 1
Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2020	78
2.	Perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang tidak mengeluarkan laporan keuangan tahunan dan <i>annual report</i> lengkap dan berturut-turut selama tahun pengamatan 2018-2020	(22)
3.	Data yang berkaitan dengan variabel penelitian tidak tersedia secara lengkap pada publikasi 2018 – 2020	(2)
4	Perusahaan mencatatkan kerugian berturut-turut selama tahun pengamatan 2018-2020	(8)
	Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat	46

Variabel dependen dalam riset ini merupakan Kecurangan Pelaporan keuangan dengan perhitungan Model perhitungan sebuah *Fraud* atau yang biasa disebut *F-score*, dimana model tersebut telah dipopulerkan oleh (Dechow *et al.*, 2011) dan seperti riset yang dilaksanakan oleh (Siddiq *et al.*, 2019). Model Perhitungan *F-score* merupakan enumerasi dari variabel yang berjumlah dua yaitu kualitas dari nilai akrual dengan performa keuangan sebuah entitas dapat di formulasikan sebagai berikut

F-Score = Accrual Qualities + Financial Performa

$$\text{RSST Accrual} = \frac{(\Delta\text{WC} + \Delta\text{NCO} + \Delta\text{FIN})}{\text{average total asset}}$$

Keterangan:

WC (*working off capital*) = (*current off assets* – *current off liability*)

NCO (*non current operating accrual*) = (*total assets* – *current assets* – *invest advance*)
– (*total liabilities* – *current off liability* – *long term debt*)

FIN (*financial accrual*) = *total investment* – *total off liability*

ATS (*average total assets*) = Merupakan Kinerja dari keuangan (*financial performance*) yang telah tercermin dari nilai sebuah perubahan piutang, Angka jumlah persediaan, fluktuasi penjualan secara *Cash* dan Fluktuasi pada *earnings before interests and tax* (EBIT) dengan perhitungan sebagai berikut:

The Financial Perform = change on receivables + change in inventory + changing cash sales + changing in earn

Financial target merupakan Nominal laba yang diberikan kepada jajaran manajemen merupakan tolak ukur sebuah kinerja Entitas usaha yang sesuai harapan. Proksi dari *financial target* riset ini diukur melalui ROA atau *Return on Asset* dengan Formula untuk menghitung sebuah nilai *Return on Asset* berikut ini :

$$ROA = \frac{Net\ Profit}{Total\ Assets}$$

Tekanan eksternal dapat diperoleh dalam jajaran manajerial merupakan imbas dari kepentingan untuk memperoleh sebuah masukan hutang atau peningkatan ekuitas supaya mampu bersaing secara kompetitif, hal tersebut juga pengeluaran tambahan biaya untuk melakukan pengembangan dan proses pembangunan atau permodalan. Penekanan Keuangan pada Variabel bebas dari riset ini menggunakan penilaian tingkat *leverage* dengan formula:

$$LEV = \frac{Total\ Hutang}{Total\ Aset}$$

Jika keadaan keuangan pada posisi stabil akan lebih memotivasi para investor untuk melakukan kegiatan investasi baik jangka panjang maupun pendek. Tingkat pertumbuhan sebuah aset yang dimiliki dapat mencerminkan posisi kestabilan kondisi keuangan, sehingga dapat digunakan untuk menilai sebuah *financial stability* yaitu ACHANGE, dengan formula:

$$ACHANGE = \frac{Total\ Aset\ (t) - Total\ Aset\ (t-1)}{Total\ Aset\ (t)}$$

Tabel2

Ringkasan Indikator dan Pengukuran Variabel

No.	Nama Variabel	Kode	Indikator	Pengukuran
1	<i>Financial statement fraud</i>	Y	<i>Fraud score model</i>	Variabel dummy Kode 1, jika nilai F-score > 1 Kode 0, jika nilai F-score < 1
2	<i>Financial target</i>	X ₁	<i>Return on Assets</i>	$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$
3	<i>External pressure</i>	X ₂	<i>Leverage</i>	$LEV = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$
4	<i>Financial stability</i>	X ₃	Tingkat pertumbuhan aset	$ACHANGE = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t)}}$

HASIL PENELITIAN

Hasil dari Analisis statistik dan deskriptif bertujuan untuk memberikan kondisi atau mendeskripsikan informasi sampel dari penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
F-SCORE	138	0	1	,06	,235
Financial Target	138	-1,4653	,6594	,004086	,1733585
External Pressure	138	,0858	3,1386	,590198	,4833538
Financial Stability	138	-1,5607	,9861	,023533	,3135653

Penjelasan dari Tabel statistika yang diperuntukan variabel terikat berupa *Financial Statement Fraud* dihitung dengan F-Score memiliki hasil rata-rata senilai 0,06 telah menggambarkan bahwa Sebuah Entitas usaha yang bergerak di segmen Infrastruktur, Utilitas dan alat transportasi periode 2018 hingga 2020 memiliki tingkat yaitu *Financial Statement Fraud* keuangan senilai 6%. dengan pencapaian standar deviasi dari sebuah variabel kecurangan pelaporan keuangan senilai 0,235. Tingkatan standar dari deviasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat *Average* mengindikasikan informasi telah menyebar secara heterogen.

Financial pressure merupakan *Variable Independent* dengan *Financial stability* dan *target*. Untuk *Financial pressure* diukur dengan *leverage* (LEV) yang merupakan kemampuan sebuah Entitas usaha dalam membayar liabilitasnya melalui total aset.

Capaian statistik deskriptif menunjukkan pencapaian nilai rata-rata variabel *Financial pressure* di nilai 0.5902. Kondisi ini membuat sebuah Entitas usaha mendapatkan tekanan yang cukup tinggi dalam usahanya kegiatan pembiayaan diakibatkan total aset yang dimiliki belum mampu melunasi seluruh hutangnya. Informasi memiliki nilai simpangan yang kecil, sehingga variasi nilai informasi yang diperoleh semakin homogen (bahkan hampir sama) antara informasi satu dengan informasi yang lainnya.

Financial stability yang diukur menggunakan perubahan dari Seluruh Jumlah Aset (ACHANGE). Capaian statistik berupa *mean* di besaran 0,02353 yang mengindikasikan bahwa sebuah capaian Entitas usaha dalam kegiatan mengelola aset yang dimiliki. Kondisi menurunnya total jumlah aset yang dimiliki sebuah Entitas usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Standar deviasi dari variabel bebas yaitu *financial stability* mempunyai angka senilai 0,3136 dan lebih tinggi dibanding rata-rata sebuah Entitas usaha sampel, sehingga informasi yang didapat mengenai *financial stability* telah menyebar secara heterogen (bervariasi).

Capaian statistik deskriptif untuk *financial target* diukur dengan Formula *Return on Assets* menunjukkan mean (rata-rata) 0,0041 yang menggambarkan rata-rata tingkat kemampuan sebuah Entitas usaha dalam mencetak profit untuk sebuah entitas usaha. Standar deviasi dari *financial target* bernilai 0,1734 dan lebih tinggi dari nilai *Average*, informasi *Variable Independent* yaitu *financial target* menyebar secara heterogen (bervariasi).

Adapun capaian Uji pengaruh dari ketiga variabel bebas satu persatu pada variabel terikat secara parsial menggunakan alat ukur yaitu uji wald telah membandingkan nilai *wald* dengan *chi-square table* menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0.05$). Capaian sebuah pengujian telah digambarkan pada tabel hasil berikut ini :

Tabel 4
Uji Regresi

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	External Pressure	2,142	,823	6,771	1	,009	8,513	1,698	42,721
	Financial Stability	5,509	3,874	2,023	1	,155	246,929	,125	489718,528
	Financial Target	-6,419	3,926	2,672	1	,102	,002	,000	3,586

a. Variable(s) entered on step 1: Financial Pressure, Stability, Target.

Dari hasil tabel capaian analisis regresi logistik diatas, uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1) Nilai *wald* dari *Financial pressure* senilai 6,771, sedangkan capaian pada *chisquare* Tabel menunjukkan (sig. $\alpha = 0,05$ dan $df=1$ senilai 3,841) maka *wald* 6,771 > *chi-square* tabel 3,841 dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Ditarik kesimpulan bahwa Variabel Independen yaitu *Financial pressure* memberikan signifikan terhadap *financial statement fraud*.

2) Nilai *wald* dari *financial stability* yaitu senilai 2,023, sedangkan capaian *chisquare* Tabel menunjukkan bahwa (sig. $\alpha = 0,05$ dan $df=1$ senilai 3,841) maka nilai *wald* 2,023 < *chi-square* pada tabel adalah 3,841 serta nilai signifikansi 0,155 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Variabel bebas yaitu *financial stability* tidak berpengaruh signifikan pada *financial statement fraud*.

3) Nilai *wald* Variabel *financial target* senilai 2,672, sedangkan capaian angka *chisquare* tabel menunjukkan (sig. $\alpha = 0,05$ dan $df=1$ senilai 3,841) maka *wald* 2,034 < *chi-square table* yaitu 3,841 dan nilai signifikansi 0,102 > 0,05. Dapat ditarik berupa kesimpulan ketiga yaitu *financial target* dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan pada variabel independen yaitu *financial statement fraud*.

PEMBAHASAN

Variabel Independen *Financial pressure* dapat diukur menggunakan rasio *leverage* (LEV) memiliki signifikan pada *financial statement fraud*. Dalam hal ini *Financial pressure* berkaitan erat terhadap Sebuah Teori Keagenan berbunyi agen seyogyanya dituntut memenuhi pembiayaan ekuitas melalui tambahan utang atau agar tetap bersaing secara kompetitif, termasuk kegiatan pembiayaan untuk riset serta pengeluaran ketika melakukan pembangunan maupun penguatan modal. Pengukuran kinerja juga merupakan sebuah unsur vital dalam melihat performa entitas usaha untuk menghasilkan laba. Level pengembalian atas laba yang dilihat dari Return on Equity perusahaan menelaah besaran pengembalian atas ekuitas pemegang saham dan melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang menjadi hak bagi pemegang saham. Sehingga untuk menjaga perusahaan agar terlihat tetap stabil, manajemen akan melakukan kecurangan laporan keuangan.

Sebuah Entitas usaha dapat memperoleh tambahan berupa dana dengan pertimbangan Nilai Tingkat *Leverage*, dikatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* maka kemampuannya untuk mengembalikan Hutang semakin tinggi sesuai dengan tingkat *Leverage* entitas usaha tersebut namun begitupun sebaliknya. Sehingga sebuah Entitas usaha memiliki kemungkinan bertindak *Financial Statement Fraud* mengaharapkan tujuan untuk menurunkan atau membuat tingkat *leverage* nampak minim dengan harapan bahwa investor (melakukan akan penambahan Modal) dan pihak kreditor (hutang) berpeluang untuk menghindari resiko tinggi dalam kegiatan pendanaan.

Berdasarkan hasil studi empiris bahwa riset menunjukkan nilai koefisien senilai 2,142 dan nilai Exp(B) senilai 8,513. Hal tersebut menunjukkan untuk peluang untuk melakukan sebuah kecurangan pelaporan keuangan akan semakin tinggi jika nilai dari *Financial pressure* yang diukur menggunakan rasio *leverage* yang tinggi juga.

Variabel independen *financial stability* yang telah dikalkulasi menggunakan perubahan total aset yang dimiliki satu tahun (ACHANGE) dinyatakan tidak memiliki signifikansi keterkaitan pada Variabel terikat yaitu *financial statement fraud* pada hasil uji hipotesis setelah dilakukan proses riset.

Teori agensi berbunyi bahwa Agen harus tetap menjaga kondisi keuangan sebuah Entitas usaha yang stabil. Kestabilan sebuah Entitas usaha yang dapat ditentukan dari nilai tingkat pertumbuhan total aset. Nilai Rasio sebuah pertumbuhan total aset yang positif berarti Aset telah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, namun begitupun sebaliknya. Tingginya total aset yang dimiliki sebuah Entitas usaha begitupun akan mengundang perhatian para investor tertarik menambah maupun memperpanjang kegiatan investasi dalam sebuah Entitas usaha. Berdasarkan Tabel yang telah dianalisa, menyebutkan nilai mean (rata-rata) sebuah Entitas usaha yang dijadikan sampel riset menunjukkan angka senilai 0,0235 merupakan sebuah nilai minimum atau dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat pertumbuhan aset belum maksimal ataupun terbilang masih minim.

Financial target telah dihitung dengan sebuah formula *Return on Asset* bahwa tidak terdapat yang signifikan hubungan dengan Variabel terikat yaitu *financial statement fraud*.

Teori agensi beranggapan bahwa dalam *Conflict of Interest* telah terjadi sebuah perbedaan antara dua pihak yaitu pihak manajerial dengan pemilik maupun investor pemilik telah berharap sebuah Entitas usaha yang dikelola oleh agen dapat menciptakan nilai profit tinggi maupun yang dikehendaki sedangkan disisi lain pihak Manajerial malah menitik beratkan pada kepentingan karyawan yaitu untuk mendapatkan Gratifikasi maupun Bonus atau kenaikan upah serta capaian kinerja selama satu periode . Sehingga agen akan melakukan apapun dan metode cara agar nilai profit sebuah Entitas usaha tinggi dengan berusaha optimal dari Aktiva yang dimiliki dengan tingkat hasil laba yang tinggi akan menunjang performa serta seberapa efektif dan efisien kinerja Masing-masing Manajerial.

Informasi empiris dari riset menunjukkan bahwa nilai koefisien senilai -6,419 serta nilai Exp(B) senilai 0,002. Koefisien yang bernilai sisi negatif menunjukkan bahwa peningkatan nilai *financial target* akan menurunkan kemungkinan terjadinya atau berbanding terbalik antara *financial target* terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan capaian analisis bahwa rata-rata sebuah Entitas usaha sampel hanya mampu mencapai nilai ROA senilai 0,0041 yang artinya capaian tingkat profit atas pengembalian asset entitas perusahaan masih tahap minimum.

KESIMPULAN

Tujuan melakukan Riset ini adalah secara empiris mengetahui pengaruh *Financial Pressure, Stability dan Target* terhadap Variabel terikat *Financial statement fraud* pada sebuah Entitas usaha dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang telah *listing* di Bursa Efek di Indonesia (BEI) periode 2018 hingga 2020. Setelah melakukan Riset maka dapat dinyatakan dalam beberapa buah kesimpulan yaitu:

1. Variabel *Financial pressure* telah memiliki pengaruh secara signifikan pada *financial statement fraud*, sehingga makin tinggi nilai *Financial pressure* akan menambah peluang untuk melakukan tindak kecurangan dalam pelaporan keuangan agar mencapai sebuah tujuan yaitu menarik para investor.
2. Variabel kedua yaitu *financial stability* tidak memiliki signifikansi pengaruh pada *financial statement fraud*, dikarenakan nilai beberapa sample rata-rata menunjukkan tingkat kestabilan kondisi sebuah keuangan Entitas usaha masih di tingkat rendah.
3. Variabel *financial target* juga tidak mempunyai signifikansi terhadap Variabel terikat yaitu *financial statement fraud*, karena nilai rata-rata industri menunjukkan bahwa

sektor industri dalam riset ini memiliki kesulitan untuk memenuhi target keuangan yang ditetapkan oleh Investor maupun Pemilik saham sebuah entitas usaha.

REFERENSI

- Anthony, Robert N. Govinda, Vijay. (2012). Penerbitan, Jakarta : Salemba Empat.
- Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Sebuah Entitas usaha Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. JURNAL ASET (AKUNTANSI Riset), 9 (1), 2017, 101-132. ISSN: 2541-0342
- Dechow, Larson, & R. G., S. (2011). *Predicting Material Accounting Misstatements*. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Laksana, I. (2016). *Analisis Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Perilaku Kecurangan Keuangan terhadap Manajemen Laba*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mulyadi. (2013). *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pamungkas, Pungky Aji. (2018). Analisis Faktor Risiko Kecurangan Teori Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Sebuah Entitas usaha yang Terdaftar dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ramadona, Aulia (2016). "Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi", *JOM Fekon*, Vol .3. No.1. Hlm. 2357-2370
- Sari, S. T. (2016). Pengaruh Financial Stability, External Pressure, Financial Targets, Ineffective Monitoring, Rationalization pada Financial Statement Fraud dengan Perspektif Fraud Triangle. *Jom Fekon*, 665-678.
- Setiawati, E. dan Baningrum, R.M. (2018). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Analisis Fraud Pentagon, *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Tessa, Chyntia dan Harto, Puji. (2016). Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud Pentagon pada Sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung: Simposium Nasional Akuntansi XIX.
- Tiffani, Laila dan Marfuah. (2015). Deteksi Financial Statement Fraud Dengan Analisis Fraud Triangle Pada Sebuah Entitas usaha Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAAI*, 19 (2), 112-125.
-

MEMAHAMI SUASANA DILEMATIS ANTARA HUTAN DAN UANG MELALUI SEMIOTIKA AKUNTANSI

Sudrajat Martadinata

Universitas Teknologi Sumbawa

sudrajat.martadinata@uts.ac.id

DOI: 10.32815/ristansi.v3i2.1400

Informasi Artikel

Tanggal Masuk	07 November, 2022
Tanggal Revisi	19 Desember, 2022
Tanggal diterima	20 Desember, 2022

Keywords:

*Forest,
Money,
Semiotics,
Environmental
Social
Accounting*

Abstract:

This paper aims to understand the dilemma between forests and money. Conduct an analysis of the lyrics of the song titled When I Pulang which was popularized by Katon Bagaskara in the 90s. Based on the stages of Roland Bartes' semiotic analysis, the following interesting findings are produced. Denotatively explaining the situation of damaged forests resulting in global warming and the extinction of ecosystems. Connotatively found the philosophy that the forest is a source of life. So in a dilemma situation, when we are asked to choose between forests and money. Based on the context of this research, what should be our main choice is to protect the forest so that it remains sustainable. Contribution to the science of accounting that profit (money) should not be the end of accounting activities. But it must also coincide with the goal of safety for other humans, as well as the goal of sustaining the ecosystem and the universe.

Kata Kunci:

Hutan,
Uang,
Semiotika,
Akuntansi Sosial
Lingkungan

Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk memahami bagaimana suasana dilematis antara hutan dan uang. Melakukan analisis atas lirik-lirik lagu berjudul Ketika Ku Pulang yang dipopulerkan oleh Katon Bagaskara pada era 90-an. Berdasarkan tahapan analisis semiotika Roland Bartes, dihasilkan temuan menarik berikut. Secara denotatif menjelaskan tentang situasi hutan yang rusak membawa akibat kepada panasnya bumi, dan punahnya ekosistem. Secara konotatif ditemukan falsafah bahwa hutan adalah sumber kehidupan. Maka dalam suasana yang dilematis, ketika kita diminta untuk memilih antara hutan dan uang. Berdasar konteks penelitian ini yang harus menjadi pilihan utama kita ialah menjaga hutan agar tetap lestari. Kontribusi bagi ilmu akuntansi bahwa profit (uang) tidak boleh menjadi akhir dari kegiatan akuntansi. Melainkan harus juga berbarengan dengan tujuan keselamatan bagi manusia lain, serta tujuan keberlangsungan ekosistem dan alam semesta.

PENDAHULUAN

Fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia berulang setiap tahun. Data terakhir dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa sekitar 33 ribu hektar lahan terbakar dalam kurun waktu empat bulan. Kondisi ini terjadi sejak bulan Januari sampai dengan bulan April pada tahun 2022 (CNN, 2022). Luas kebakaran hutan serta lahan (karhutla) di Indonesia sebanyak 358.867 hektare (ha) pada 2021. Jumlah tersebut bertambah 20,85% dibanding pada 2020 yang seluas 296.942 ha (DataIndonesia.id, 2021). Kebakaran hutan ditimbulkan oleh bermacam aspek area semacam hawa, keadaan penutupan lahan, tipe tanah, serta aspek area bio-fisik yang lain (Yusuf et al., 2019). Selain disebabkan oleh faktor lingkungan, kebakaran hutan pula diakibatkan oleh aspek manusia. Seperti membuka lahan dengan cara membakar, mencukupi kebutuhan pakan ternak dengan merambah hutan, dan kekecewaan terhadap pengelolaan hutan yang memicu maraknya *illegal logging* (Rasyid, 2014).

Keberadaan hutan mampu memberi manfaat kesehatan, estetika, dan menyeimbangkan ekosistem (Syahadat & Putra, 2020). Tidak hanya itu hutan pula membagikan sebagian khasiat, antara lain: selaku penyerap karbon, melindungi keanekaragaman biologi, menghindari erosi serta melindungi tata air dan menciptakan bermacam tipe hasil hutan bukan kayu yang bisa menolong perekonomian warga sekitarnya, sehingga tekanan terhadap kawasan hutan jadi menurun (Nurhaedah & Hapsari, 2014).

Mari kita menggarisbawahi pernyataan di atas yang menyebutkan bahwa hutan dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Fakta yang terjadi sesungguhnya adalah justru dengan adanya tuntutan ekonomi, dan terbukanya akses terhadap sumber daya yang ada di hutan, akan menjadi pintu masuk awal bagi terancamnya kelangsungan hutan itu sendiri. Terlebih lagi jika tuntutan ekonomi itu disuarakan oleh para pemilik modal. Kerap kali abai untuk memperhatikan manfaat lain dari adanya hutan, selain hanya melihat manfaat ekonomi semata. Maka eksploitasi atas hutanlah yang kemudian terjadi secara terus-menerus. Karena laba telah menjadi tujuan utama berdirinya korporasi yang berorientasi ekonomi (Irianto, 2006).

Menyimak kondisi hutan yang secara luasan dan kualitas dari tahun ke tahun dengan tampak wajah yang mengkhawatirkan. Menyulut munculnya paradigma baru

untuk serius mendiskusikan hubungan ekonomi dengan ketahanan hutan. Lebih khusus lagi kajian yang mengkaitkan antara ilmu ekonomi akuntansi dalam hubungannya dengan pelestarian alam dan lingkungan. Sebut saja *Triple Bottom Line*, diajukan pada tahun 1999 oleh John Elkington dalam bukunya yang berjudul "Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business" (Febrina & Suaryana, 2011). Konsep *Triple Bottom Line* ini mengusulkan agar tuntutan ekonomi yang diukur dengan satuan uang, harus diimbangi dengan unsur-unsur kehidupan yang lain yakni manusia dan alam semesta. Sehingga kegiatan keseharian kita sebagai individu, kelompok, entitas, dan korporasi tidak hanya berfokus kepada uang (*profit*). Tetapi juga ikut menimbang-nimbang tercapainya kesejahteraan masyarakat (*people*), dan memperhatikan lestarnya alam dan lingkungan (*planet*) (Sawitri, 2017).

Beberapa penelitian lain ikut bersinggungan dengan pikiran-pikiran Elkington pada masa satu dasawarsa terakhir setelah gagasannya diluncurkan. Terutama penelitian yang mencoba memasukkan isu kebakaran hutan ke dalam ilmu akuntansi. Telaah saja apa yang dihasilkan dalam penelitian berikut ini. Disebutkan bahwa pelaporan biaya lingkungan dalam akuntansi hijau, bisa menolong para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Selain itu dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan guna mendukung kegiatan usaha yang berkelanjutan (Nyoman & Werastuti, 2022). Namun, terdapat salah satu hasil penelitian menarik yang patut untuk disampaikan di sini. Ternyata ada alasan penghematan biaya bagi para petani. Ketika mereka membuka lahan dengan cara membakar hutan. Meskipun setelah dibandingkan dengan akibat yang diterima, alasan penghematan berubah menjadi *cost inefisiensi* di akhir cerita (Rahayu, S et al., 2021). Hasil penelitian lain pun menjelaskan bahwa jika *green accounting* dapat diterapkan maka akan memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial korporasi (Yoshi Aniela, 2012). Bertolak belakang dengan hasil penelitian lainnya. Dimana disampaikan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap *economic performance* korporasi (Rosaline et al., 2020).

Akuntansi yang dipraktikkan hari ini dibangun dari ide kapitalis. Diperuntukkan hanya bagi para pemilik modal. Menjadi pemicu terjadinya eksploitasi dan krisis sumber daya sosial, alam dan lingkungan (Lako, 2019). Akuntansi konvensional masih saja terus berjalan, meski telah coba digugat oleh pikiran-pikiran baru dengan menawarkan ide yang lebih menyeluruh (ide akuntansi sosial dan lingkungan). Suasana

ini berkembang menjadi sangat dilematis. Di satu sisi hutan terancam, di satu sisi uang begitu terlanjur dijadikan tujuan keberadaan korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bergenre kualitatif dalam area *post positivis*. Dilakukan dengan tujuan untuk memahami suasana dilematis antara hutan dan uang yang keduanya dialihkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lirik lagu Katon Bagaskara yang dipopulerkan pada sekitar tahun 90-an berjudul Ketika Ku Pulang, dijadikan sebagai situs teliti. Lagu tersebut sangat lekat dengan isu yang sedang didiskusikan di dalam topik penelitian ini.

Beberapa referensi menjadi rujukan sehingga akhirnya memutuskan bahwa lirik lagu Ketika Ku Pulang menjadi episentrum penelitian. Menggali syair-syair lagu Ilir-Ilir pernah dilakukan kemudian dikawinkan dengan ilmu akuntansi, dimana hasilnya memberikan pengembangan bagi pendidikan akuntansi Indonesia (Darti Djuharni et al., 2019). Topik yang hampir serupa dengan penelitian sekarang ini berhubungan dengan uang. Menjadikan uang segala-galanya karena memang secara ideologi akuntansi konvensional, uang menjadi salah satu postulat (prinsip yang diyakini kebenarannya) akuntansi. dengan melakukan kajian terhadap naskah drama yang berjudul Sumur Tanpa Dasar. Temuannya sangat menarik bahwa ternyata ketika uang dijadikan sebagai postulat akuntansi, maka siapapun itu tidak akan pernah menemukan rasa damai di hatinya (Martadinata & Faturrahman, 2022). Tidak kalah menarik dengan penelitian yang menjadikan karya cerpen sebagai situs telitinya. Membahas mengenai kehadiran minimarket yang “membunuh” pedagang-pedagang kecil disekitarnya (Wahyuni, 2015). Artinya karya sastra telah dijadikan sebagai situs di dalam beberapa penelitian ilmu akuntansi sebagaimana paparan di atas. Karya sastra tidaklah sekedar karya sastra yang hanya berisi hayalan dan angan-angan semata, melainkan representasi dari dinamika sosial kehidupan masyarakat yang disajikan ke dalam bentuk sastra (Wahyuni, 2015., Martadinata & Faturrahman, 2022).

Berikutnya penelitian ini menggunakan alat analisis semiotika Roland Barthes. Dengan dua tingkatan analisis yakni denotasi, konotasi, serta mitos dan simbol (Riwu & Pujiati, 2018.,Darti Djuharni et al., 2019). Denotasi selaku analisis tingkatan awal. Konotasi, mitos, serta simbol selaku analisis tingkatan kedua. Pada analisis tingkat pertama akan menjelaskan sesuatu yang bersifat nyata atau inderawi. Selanjutnya pada

analisis kedua dimana berusaha mengungkapkan mitos dan ideologi yang ada. Sebab mitos merupakan pesan yang terdapat ideologi di dalamnya (Barthes, 2012).

HASIL PENELITIAN

Sebagaimana disampaikan pada metode di atas, bahwa penelitian ini akan dianalisis dengan semiotika Barthes melalui dua tingkatan. Tingkatan pertama untuk memahami makna denotasi dari lirik lagu Ketika Ku Pulang. Setelah itu akan dianalisis melalui tingkatan kedua untuk memahami makna konotasi, mitos, dan simbol dari lirik lagu Ketika Ku Pulang.

Analisis semiotika tingkatan pertama (makna denotasi)

Berkaca di atas air

Kali kecil nan mengalir

Bias wajahku temaram

Latar pohonan memuram

Ketika ku pulang

Yang kudapat getir menikam

Ke mana hutanku hilang?

Semak perdu merintih

Ribu hujan pun tak mampu

Bawa hijau padaku

Ke mana kicauku terbang?

Dahan ranting bersedih

Udara tak lagi ramah

Panas menyiksa bumi

Oh-hu-uh-uh

Ketika ku pulang

Yang kudapat getir menikam

Ke mana hutanku hilang?

Semak perdu merintih

Ribu hujan pun tak mampu

Bawa hijau padaku

Ke mana kicauku terbang?

Dahan ranting bersedih

Udara tak lagi ramah

Panas menyiksa bumi

Sudi bantu aku

Mewujudkan rimbaku dahulu

Bahu-membahu

Kita 'kan gapai impian (oh-ho-oh)

Hutanku hadir kembali

Semak dan perdu bersemi

Ribu hujan pun menyatu

Bawa hijau padaku (oh-ho-oh)

Kicau burung menemani

Dahan dan ranting berseri

Udara segar memadu

Menyejukkan jiwaku (oh-ho-oh)

Tabel 1
Makna Denotasi Lirik Lagu Ketika Ku Pulang

Tabel 1. Makna denotasi lirik lagu Ketika Ku Pulang		
No	Lirik	Makna
1	Berkaca di atas air	Melihat diri sendiri di air
2	Kali kecil nan mengalir	Pada sebuah kali kecil yang airnya mengalir
3	Bias wajahku temaram	Di dalam air bayangan wajahku terlihat tidak terang
4	Latar pohonan memuram	Di dalam air terlihat juga bayangan pohon di belakangku yang buram
5	Ketika ku pulang	Ketika aku pulang
6	Yang kudapat getir menikam	Aku mendapatkan kesusahan yang menusuk
7	Ke mana hutanku hilang?	Ke mana hutan ku hilang?
8	Semak perdu merintih	Tumbuhan-tumbuhan kecil yang serata tanah mengerang kesakitan
9	Ribu hujan pun tak mampu	Beribu hujan tak mampu
10	Bawa hijau padaku	Menjadikan hutan berwarna hijau
11	Ke mana kicauku terbang?	Ke mana kicau burung terbang ?
12	Dahan ranting bersedih	Dahan dan ranting bersedih
13	Udara tak lagi ramah	Udara tidak lagi menyenangkan
14	Panas menyiksa bumi Oh-hu-uh-uh	Suhu panas menyiksa bumi
15	Ketika ku pulang	Ketika aku pulang
16	Yang kudapat getir menikam	Aku mendapatkan kesusahan yang menusuk
17	Ke mana hutanku hilang?	Ke mana hutan ku hilang?
18	Semak perdu merintih	Tumbuhan-tumbuhan kecil yang serata tanah mengerang kesakitan
19	Ribu hujan pun tak mampu	Beribu hujan tak mampu
20	Bawa hijau padaku	Menjadikan hutan berwarna hijau
21	Ke mana kicauku terbang?	Ke mana kicau burung terbang ?
22	Dahan ranting bersedih	Dahan dan ranting bersedih
23	Udara tak lagi ramah	Udara tidak lagi menyenangkan
24	Panas menyiksa bumi	Suhu panas menyiksa bumi
25	Sudi bantu aku	Bersedialah membantuku
26	Mewujudkan rimbaku dahulu	Untuk mengembalikan hutanku seperti dahulu
27	Bahu-membahu	Kita bahu membahu
28	Kita 'kan gapai impian (oh-ho-oh)	Kita akan gapai impian kita
29	Hutanku hadir kembali	Yakni hutan hadir kembali
30	Semak dan perdu bersemi	Tumbuhan-tumbuhan kecil yang serata tanah bertunas
31	Ribu hujan pun menyatu	Beribu-ribu hujan akan bersatu
32	Bawa hijau padaku (oh-ho-oh)	Menjadikan hutan berwarna hijau
33	Kicau burung menemani	Kicauan burung juga akan menemani
34	Dahan dan ranting berseri	Dahan dan ranting tampak ceria
35	Udara segar memadu	Udara segar akan ikut hadir
36	Menyejukkan jiwaku (oh-ho-oh)	Membawa sejuk di jiwaku

Pada tingkatan pertama ini lirik lagu Ketika Ku Pulang dapat dipahami dengan jelas. Menceritakan tentang kondisi hutan yang rusak. Suhu bumi yang panas, menjadi akibat yang dirasakan oleh manusia, semak dan perdu, serta burung. Ada ajakan untuk membenahi kondisi hutan yang rusak. Agar harapan manusia, semak dan perdu, serta burung dapat terwujud dengan merasakan keceriaan kembali di dalam hidup.

Analisis semiotika tingkatan kedua (makna konotasi)

Pada tingkatan ini kita akan memahami makna konotasi yang berkaitan dengan mitos dan ideologi yang terkandung di dalam lirik lagu Ketika Ku Pulang. Secara rinci

akan dikaji secara lebih mendalam melalui bait per bait dari lagu tersebut. Sebagaimana ditampilkan dalam urutan berikut ini.

Bait Pertama	Makna
Berkaca di atas air Kali kecil nan mengalir Bias wajahku temaram Latar pohonan memuram	Secara konotasi, pada bait ini Katon Bagaskara ingin menyampaikan kondisi hutan yang memprihatinkan. Di mana ia melihat air kali yang semakin kecil alirannya lalu berkaca di atasnya. Wajahnya terlihat suram, senada dengan pepohonan yang ada dibelakang dirinya.
Bait Kedua	Makna
Ketika ku pulang Yang kudapat getir menikam	Secara konotasi, pada bait ini dapat dimaknai setelah sekian lama ia tinggalkan kampung halaman. Tiba-tiba ia terkejut melihat kondisi hutan kampungnya yang sudah rusak. Tidak lagi seperti dulu.
Bait Ketiga	Makna
Ke mana hutanku hilang? Semak perdu merintih Ribu hujan pun tak mampu Bawa hijau padaku	Secara konotasi, pada bait ini dijelaskan kondisi hutan yang sudah hilang. Tumbuh-tumbuhan sudah hilang. Hujan bertahun-tahun juga tidak mampu mengembalikan hutan menjadi hijau kembali.
Bait Keempat	Makna
Ke mana kicauku terbang? Dahan ranting bersedih Udara tak lagi ramah Panas menyiksa bumi	Secara konotasi, pada bait ini dijelaskan selain tumbuhan, hewan pun pergi, udara, cuaca tidak lagi bersahabat buat planet bumi kita.

Bait Kelima	Makna
Sudi bantu aku Mewujudkan rimbaku dahulu Bahu-membahu Kita 'kan gapai impian	Secara konotasi, pada bait ini muncul ajakan agar secara bersama-sama kita memperbaiki hutan yang sudah rusak. Dengan diperbaikinya hutan, maka cita-cita hidup kita pasti akan tercapai.

Bait Keenam	Makna
Hutanku hadir kembali Semak dan perdu bersemi Ribu hujan pun menyatu Bawa hijau padaku (oh-ho-oh)	Secara konotasi, pada bait ini menjelaskan dengan kembalinya hutan seperti dahulu maka tumbuh-tumbuhan dapat hidup subur dan rindang di dalamnya. Ketika hutan itu rindang, curah hujan pun menjadi semakin tinggi.

Bait Ketujuh	Makna
Kicau burung menemani Dahan dan ranting berseri Udara segar memadu Menyejukkan jiwaku (oh-ho-oh)	Secara konotasi, pada bait ini melanjutkan bait sebelumnya. Berkenaan dengan jika kembalinya hutan, tumbuhan, hewan, dan kita manusia pun akan merasakan sejuknya udara di kosmos bumi.

PEMBAHASAN

Dari pemaknaan seluruh bait lagu di atas. Ditemukan satu ide yang dapat dijadikan falsafah hidup. Bahwa hijaunya hutan adalah harapan kita bersama selaku pengelola makrokosmos ini. Diyakini bahwa dengan terpeliharanya hutan, kita manusia telah mampu menenggang rasa bersama hewan dan tumbuhan. Beberapa kasus yang dapat kita jadikan contoh dalam pelestarian hutan. Tidak hanya hutan kayu, hutan

mangrove pun menjadi bagian hutan yang harus terpelihara. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya peranan mangrove dalam ekosistem pesisir telah mendorong pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Untuk menghindari atau memperkecil kerugian yang ditimbulkan dari pemanfaatan yang tidak berkelanjutan tersebut perlu diperhitungkan dampak perubahan yang terjadi, sehingga pendayagunaan pemanfaatan mangrove dapat dilakukan dengan optimal dan lestari. Dalam ekosistem pesisir, hutan mangrove mempunyai beranekaragam peranan antara lain sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis udang, habitat berbagai gastropoda, dan sebagai pelindung pantai (Adriaman et al., 2020). Selain itu hutan mangrove dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Dengan dijadikannya hutan sebagai salah satu destinasi wisata, akan menggerakkan masyarakat sekitar hutan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dibutuhkan oleh para pengunjung. Menyiapkan tempat makan, jasa guide, jasa transportasi, dan cendra mata. (Joandani et al., 2019). Kasua lain di hutan kayu yang berada di dataran tinggi. Dapat melakukan pelestarian hutan melalui program agroforestry (Nugroho Tri Waskitho¹, 2022). Menakukan budi daya tanaman penyangga air yang juga buah atau bijinya dapat diolah guna menambah penghasilan masyarakat sekitar hutan. Melakukan pelestarian hutan dengan menanam kopi salah satunya. Bijinya dapat diolah atau dijual langsung sebagai komoditas ekonomi secara langsung bagi masyarakat. bisa juga melestarikan hutan dengan menanam buah-buahan. Buah duren salah satu buah yang cocok dibudidayakan di daerah dataran tinggi. Menanam pohon kemiri dan kayu putih juga salah satu alternatif yang dapat kita lakukan. Agar tujuan kita mendapatkan penghasilan dan menjaga hutan dapat berjalan secara beriringan. Ketika hutan rindang, cita-cita hidup kita akan tercapai.

Maka di dalam konteks penelitian ini hutan harus menjadi prioritas utama dibandingkan dengan capaian kesejahteraan ekonomi. Karena dengan menjaga hutan, sumber ekonomi kita pun ikut terjaga. Demikian pula sebaliknya, jika kita utamakan kesejahteraan ekonomi dengan mengeksploitasi hutan, kita akan kehilangan banyak hal, termasuk kehilangan kesejahteraan ekonomi kita sendiri. Pendapatan merupakan salah satu symbol yang digunakan di dalam ilmu akuntansi. Hutan yang lestari akan mendukung pendapatan masyarakat sekitar hutan terjadi secara berkelanjutan. Siapapun yang memutuskan berinvestasi secara ekonomi melalui media apa saja, termasuk melalui pemanfaatan hutan. Tujuan utama yang ingin dituju tidak lain kalau

bukan profit. Ketika ada pendapatan, seoptimal mungkin pendapatan tersebut bermuara ke dalam bentuk profit. Diskusi ini sangat erat dengan teori *Triple Bottom Line* yang diajukan oleh Elkington (1998). Teori ini sering digunakan di dalam kajian akuntansi lingkungan. Terdapat tiga unsur penting yang menjadi perhatian di dalam teori tersebut, yakni *planet, profit, dan people*. (Nabila & Arinta, 2020). Bahwa kajian ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan ilmu akuntansi. Artinya investasi ekonomi atau aktivitas akuntansi yang kita lakukan tidak boleh berhenti pada urusan profit saja. Tetapi harus mempertimbangkan bagaimana akibat dari investasi yang kita lakukan tidak membawa akibat buruk bagi manusia dan alam semesta ini.

KESIMPULAN

Sesuai dengan tahapan analisisnya kesimpulan penelitian ini diajukan secara denotatif dan konotatif. Secara denotatif menjelaskan tentang situasi hutan yang rusak membawa akibat kepada panasnya bumi, dan punahnya ekosistem. Secara konotatif ditemukan falsafah bahwa hutan adalah sumber kehidupan. Maka dalam suasana yang dilematis, ketika kita diminta untuk memilih antara hutan dan uang. Berdasar konteks penelitian ini yang menjadi pilihan utama kita ialah menjaga hutan agar tetap lestari. Dengan melakukan pengelolaan terhadap hutan dengan menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan yang membuahkan profit. Ternyata melalui kajian ini, ilmu akuntansi tidak boleh berhenti sampai tujuan profit dalam aktivitasnya. Tetapi melampaui profit, dengan mengelola keberadaan hutan menjadi aktivitas yang dapat juga memberikan profit bagi manusia lain dan alam semesta ini.

REFERENSI

- Adriman, Fauzi, M., Fajri, N. El, Purwanto, E., & Prianto, E. (2020). Penyuluhan Konservasi Hutan Mangrove di Desa Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Journal of Rural and Urban Community Empowerment*, 2(1 SE-), 42–49.
- CNN, I. (2022). *Data KLHK: 33 Ribu Hektare Lahan Terbakar Selama Januari-April. 8.5.2017*, 2003–2005.
- Darti Djuhari, Sonhaji, S., & Azis, N. A. (2019). Internalisasi nilai “ilir-ilir” pada pendidikan akuntansi: Dari “sandang” menuju “ageman.” *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 4(2), 24–43. <https://doi.org/10.34202/imanensi.4.2.2019.24-43>
- DataIndonesia.id. (2021). “Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia Meningkat pada 2021.”
- Febrina, & Suaryana, I. G. N. A. (2011). Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21-22 Juli 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21-22 Juli 2011. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011*, 21–22.
- Irianto, G. (2006). Dilema “laba” dan rerangka teori. *Tema*, 7(2), 141–153.
- Joandani, G. K. J., Pribadi, R., & Suryono, C. A. (2019). Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata Sebagai Upaya Konservasi Mangrove Di Desa Pasar Banggi, Kabupaten

- Rembang. *Journal of Marine Research*, 8(1), 117–126.
<https://doi.org/10.14710/jmr.v8i1.24337>
- Lako, A. (2019). Menuju Akuntansi Hijau 4.0. *Artikel, April*, 80–84.
https://www.researchgate.net/publication/332544784_Menuju_Akuntansi_Hi%0Ajau_4_0
- Martadinata, S., & Faturrahman, F. (2022). SEEING MONEY MEASUREMENT WHEN USED AS ACCOUNTING. *Ijariie*, 8(4), 341–345.
- Nabila, R., & Arinta, Y. N. (2020). *Development Green Economy Model for Welfare Indonesia*. 6(2), 327–335.
- Nugroho Tri Waskitho1, A. S. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KHDTK UMM DALAM KONSERVASI KAWASAN HUTAN MELALUI SISTEM AGROFORESTRI*. 04(02), 1–9.
- Nurhaedah, M., & Hapsari, E. (2014). HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT Nurhaedah M. dan Evita Hapsari. *EBONI*, 11(1), 27–36.
- Nyoman, D., & Werastuti, S. (2022). *BAGAIMANA PERAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI HIJAU DI INDONESIA ? Komang Tri Yasrawan*. 14(3), 151–161.
- Rahayu, S., Yudi, Y., Rahayu, R., Lutfillah, N. Q., & Sari, D. P. (2021). Cost [in]Efficiency Di Balik Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 351–369.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.20>
- Rasyid, F. (2014). *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. 4, 47–59.
- Riwu, A., & Pujiati, T. (2018). Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film 3 Dara. *Deiksis*, 10(03), 212. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v10i03.2809>
- Rosaline, V. D., Wuryani, E., Ekonomi, F., Surabaya, U. N., & Surabaya, K. (2020). Pengaruh Penerapan Green Accounting dan Environmental Performance Terhadap Economic Performance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 569–578.
<https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26158>
- Sawitri, A. P. (2017). Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan dan Kinerja Lingkungan terhaap Nilai Perusahaan. *Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama Malang*, (4), 1–11.
- Syahadat, R. M., & Putra, P. T. (2020). Manfaat visual keberadaan hutan kota Padang Golf Halim. *Jurnal Arsitektur Lansekap*, 6(1), 107.
<https://doi.org/10.24843/jal.2020.v06.i01.p12>
- Wahyuni, A. S. (2015). Predatory Pricing: Persaingan Harga Minimarket dan Gadde-gadde dalam Metafora Cerpem. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 237–244.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6019>
- yoshi Aniela. (2012). Peran Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(No. 1, Januari 2012), 15–19. <http://jurnal.wima.ac.id/index.php/BIMA/article/view/24>
- Yusuf, A., Hapsah, H., Siregar, S. H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 67.
<https://doi.org/10.31258/dli.6.2.p.67-84>